

## BAB IV

### Deskripsi Hasil Temuan

#### 4.1 Kondisi Umum Desa Nelayan Puger

Komunitas nelayan di pesisir pantai Puger ini berada di dua desa yaitu desa Puger Wetan dan desa Puger Kulon. Berikut gambaran umum mengenai kedua desa ini :

##### 4.1.1 Desa Puger Wetan

Desa Puger Wetan merupakan salah satu desa di kecamatan Puger. Desa ini jaraknya kurang lebih 30 km dari ibu kota kabupaten Jember kearah selatan. Luas desa Puger Wetan sekitar 525.520m<sup>2</sup>, dari wilayah tersebut di desa Puger Wetan, areal persawahan ada sekitar 10,008m<sup>2</sup> dan ladang sekitar 1,835m<sup>2</sup>. Desa Puger wetan tahun 2008, jumlah penduduk laki-laki ada sekitar 5.308 orang, jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.187 orang, dan jumlah kepala keluarga sekitar 2.906 KK (monograf desa Puger Wetan). Secara administratif batas desa Puger Wetan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa Grenden dan Wonosari
- b. Sebelah Timur : Desa Lojejer
- c. Sebelah Barat : Desa Puger Kulon
- d. Sebelah Selatan : Samudera Hindia / Samudera Indonesia

Daerah terluas yaitu berupa daerah persawahan terletak dibagian utara berdekatan dengan bukit kapur padas (gunung kapur). Di wilayah ini penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani dan buruh tani. Lahan persawahan ditamani oleh berbagai macam tanaman secara bergiliran, yaitu Padi, Kedelai, dan Jagung. Penduduk disekitar wilayah persawahan itu juga memiliki hewan ternak. Sebagian penduduk yang bergerak dalam bidang perikanan juga melakukan pekerjaan sebagai petani. Ketika mereka tidak menangkap ikan dilaut maka mereka melakukan pekerjaan pertanian.

Sedangkan wilayah selatannya yaitu merupakan wilayah tanjung kecil yang digunakan nelayan untuk melabuhkan perahu/jukung nelayan. Sebelah selatan pesisir/tanjung itu ada tempat wisata yang dikenal dengan Kucur. Yaitu sesuatu tempat dihilir gunung Watangan. Ditempat tersebut terdapat hutan yang dilengkapi dengan tempat pemandian. Tempat pemandian merupakan peninggalan Jepang/Belanda. Tempat rekreasi ini ramai terutama ketika waktu liburan tiba. Desa Puger Wetan saat ini telah mengalami perubahan yang cukup besar.

Pembangunan perumahan dan jalan desa sudah cukup baik. Di sebelah selatan /pesisir pantai ada sebuah dusun yang di beri nama Mandaran. Diberi nama Mandaran karena di dusun tersebut terdapat banyak orang yang berasal dari suku Mandar, Sulawesi yang sudah menetap di desa Puger Wetan.

Kondisi perumahan penduduk sudah ber dinding bata. Jalan desa di desa Puger Wetan kondisinya sudah cukup baik saat ini, tidak ada lagi lubang dan sudah beraspal. Desa Puger Wetan ini dilintasi oleh sungai Bedadung yang bermuara di pesisir laut selatan (Samudera Hindia/ Samudera Indonesia). Sungai ini berbatasan langsung dengan desa Lojejer (batas timur desa Puger Wetan). Sungai Bedadung ini juga dimuara samudera Hindia yang bertemu dengan sungai Besini yang mengalir di desa Puger Kulon.

#### 4.1.2 Desa Puger Kulon

Desa Puger Kulon ini terletak berdampingan dengan desa Puger Wetan. Desa ini juga berada kurang lebih 30 km dari pusat kota Jember ke arah selatan. Luas Desa Puger Kulon sekitar 388.800m<sup>2</sup>. Desa Puger Kulon areal persawahan luasnya 6,955m<sup>2</sup> dan areal ladang 21,394m<sup>2</sup>. Di desa Puger kulon ini selain memiliki pesisir, juga memiliki tambak. Pada tahun 2009, Jumlah penduduk desa puger kulon, jenis kelamin laki-laki berjumlah sekitar 6842 orang, perempuan 6856 orang sedangkan jumlah kepala keluarga sekitar 4006 KK. Jadi secara keseluruhan jumlah penduduk pada tahun 2009 sekitar 13.698 orang, sedangkan jumlah penduduk tahun yang lalu sekitar 13.250 orang (monograf desa Puger Kulon). Secara administratif batas desa Puger Kulon adalah :

- a. Sebelah Utara : Desa Grenden
- b. Sebelah Selatan : Samudera Hindia/ Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat : Desa Mojosari
- d. Sebelah Timur : Desa Puger Wetan

Seperti halnya dengan desa Puger Wetan, wilayah utara desa Puger Kulon ini juga merupakan areal persawahan dan ladang. Masyarakat yang berada disekitar wilayah itu penduduknya juga bekerja sebagai petani dan ada juga sebagai nelayan. Areal ladang dan persawahan selain ditanami oleh Padi, Jagung dan Kedelai juga ditanami oleh buah Semangka dan Melon. Selain itu penduduknya juga bekerja di usaha pembakaran batu kapur. Tempat pembakaran batu kapur menjadi usaha rumah tangga penduduk desa Puger kulon. Usaha dagang

ini menjadi tumpuan utama penduduk yang berada disekitar gunung kapur (gunung Sadeng). Gunung ini berada di wilayah desa Puger Wetan, Puger Kulon dan Grenden. Saat ini tepatnya di sekitar kaki gunung kapur saat ini dibangun pabrik semen yang berencana beroperasi 2011.

Sedangkan diwilayah pesisirnya dijadikan tempat wisata pantai yang diberi nama Pantai Pancer. Sebelah timur pantai ini merupakan tempat wisata gunung Watangan yang dikenal dengan Kucur. Di tempat ini terdapat pemandian yang konon menurut cerita peninggalan Jepang atau Belanda. Selain itu juga ada goa peninggalan Jepang yang berada di puncak gunung Watangan. Tempat wisata ini bisa dicapai dengan memakai perahu atau jukung menyebrangi muara sungai Bedadung dan Besini. Masjid besar Jamik Al Himah terletak di desa Puger Kulon begitu juga dengan gereja. Selain itu Bank BRI, Danamon, Puskesmas, kantor kecamatan serta kantor Polisi juga berada di wilayah desa Puger Kulon.

#### **4.1.3. Masyarakat pesisir di desa Puger Wetan dan Puger Kulon**

Kawasan pesisir pantai Puger berada di sebelah selatan desa Puger Kulon dan Puger wetan. Di wilayah tersebut terdapat Tempat Pelelangan Ikan dan pelabuhan. Banyak kapal/perahu dan jukung yang menambatkan armadanya di sepanjang pelabuhan dan di bantaran sungai Bedadung dan sungai Besini. Ikan juga diperdagangkan di TPI tersebut. Namun perdagangan yang dijalankan hanya untuk kebutuhan konsumen rumah tangga, bukan untuk kebutuhan konsumen besar/ perusahaan/pabrik. Berbagai jenis hasil laut yang diperdagangkan antara lain, ikan asin, terasi, petis, ikan segar, ikan pindang, kepiting, serta cumi. Sedangkan untuk penjualan secara besar-besaran nelayan biasanya langsung menjualkan ikannya kepada pengambek. Jadi nelayan hanya mendaratkan ikannya di TPI baru kemudian diangkut ke tempat pengambek.

Cerita sejarah mengenai nama Puger sendiri masih belum ada penelitian secara ilmiah. Cerita mengenai sejarah Puger diturunkan secara turun-temurun melalui oral. Karena dituturkan dari mulut kemulut maka informasi yang diperoleh juga masih simpang siur. Tidak ada informasi yang pasti mengenai bagaimana sejarah keberadaan masyarakat Puger. Apakah berasal dari pendatang atau memang ada warga asli Puger. Di komunitas nelayan Puger terdapat masyarakat yang bersuku Bugis, Mandar, Jawa dan Madura. Tidak banyak informasi yang didapat suku mana yang ada di wilayah Puger sekarang. Tentang sejarah nama Puger sendiri, tidak banyak masyarakat yang mengetahuinya. Hanya informasi-informasi yang simpang-siur dan dari mulut

kemulut. Belum ada penelitian secara ilmiah mengenai sejarah kecamatan Puger ini. Saat ini mereka saling berinteraksi dan dalam komunikasinya menggunakan bahasa Jawa dan Madura sedangkan bahasa Mandar atau Bugis tidak digunakan dalam bahasa sehari-hari. Menurut informasi yang diterima peneliti bangsa Mandar yang ada di Puger saat ini merupakan generasi yang ke 5-6 dari keturunan bangsa Mandar yang pertama kali datang ke Puger. Perkawinan antar etnis baik Jawa, Mandar, Bugis dan Madura memberi kontribusi yang besar dalam peleburan semua bahasa tersebut.

Di wilayah Puger sendiri terdapat banyak makam-makam kuno yang masyarakat Puger sendiri masih belum mengetahui secara pasti milik siap makam tersebut. Makam-makam kuno tersebut berada di daerah pesisir dan digunung-gunung. Ada dua gunung yang ada di Puger ini yaitu gunung Sadeng dan gunung Watangan. Makam yang ada di gunung Watangan, tepatnya di Pulau Kucur diberimana makam mbah Tanjung. Sedangkan makan yang ada di gunung Sadeng diberi nama makam Sentono, makam tersebut saat ini telah dibangun oleh seseorang yang tidak ketahui namanya, namun yang pasti seseorang itu adalah dari kalangan militer berpangkat Danjen. Tempat itu digunakan untuk besemedi orang-orang yang ingin mendapatkan wangsit. Tidak jauh dari pesisir pantai Puger kearah selatan terdapat Pulau Nuso Barong. Di Pulau ini juga terdapat makam yang dibrimana makam mbah Sindu. Luas pulau Nuso Barong ini lebih kurang 3 km<sup>2</sup>. Selain pulau Nuso Barong sebagai pulau yang terbesar, ada juga pulau Suka Made yang luasnya sekitar 1,5 km<sup>2</sup>. Pulau ini saat ini digunakan sebagai tempat penangkaran Penyu. Selain dua pulau terbesar itu ada pulau-pulau lain yang lebih kecil seperti pulau Kodok, pulau Glinding, dan pulau Crengkek. Jika dilihat dari ekosistem perairan Puger, menurut nelayan sudah banyak yang rusak di wilayah karang. Hal ini karena banyaknya penggunaan bom atau racun. Saat ini dipuger sedang digalakkan untuk mengembalikan ekosistem ini. Meski ada sebagian nelayan yang memakai bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan secara sembunyi-sembunyi dalam menangkap ikan.

Wilayah pelabuhan atau tempat perahu ditambatkan berada di sekitar pinggir bibir kedua desa tersebut. Wilayah pelabuhan ini berada masuk diantara dua pertemuan sungai besar yaitu sungai Bedadung dan sungai Besini. Dan pertemuan kedua sungai tersebut berada didekat gunung Watangan. Jadi ada semacam delta untuk masuk ke pelabuhan Puger. delta tersebut sering terjadi pendangkalan, oleh karena itu dalam jangka waktu tertentu dilakukan pengerukan. Delta yang sekaligus pintu keluar masuknya perahu nelayan disebut dengan "Plawangan".

”Plawangan” ini sering memakan korban. Terutama ketika sebelum dibangunnya *break water*. Wilayah plawangan ini bawahnya merupakan karang dan tidak cukup lebar jika dilalui oleh dua perahu payang. Biasanya hanya satu perahu yang dapat melewati plawangan. Selain itu harus melihat keadaan air dan gelombang. Kondisi air pasang dan gelombang tidak besar merupakan kondisi yang baik untuk melewati plawangan tersebut. Untuk dapat melewatinya, baik keluar pelabuhan maupun masuk pelabuhan nelayan harus menghitung gulungan ombak yang masuk. Dengan hitungan yang tepat maka nelayan dapat dengan selamat melewati pelawangan tersebut.

Banyaknya korban dan naik turunnya hasil tangkapan ikan inilah yang mendorong nelayan untuk diadakannya suatu upacara sedekah laut. Upacara itu dikenal dengan upacara larung sesaji ”Petik Laut”. Upacara petik laut ini sudah dilakukan sejak lama oleh nelayan Puger. dulu upacara ini dilakukan dengan sederhana, hanya sekumpulan nelayan yang melarung sesaji ke laut. Perkembangan upacara petik laut sekarang tidak sesederhana dahulu. Perubahan yang significant terjadi ketika kepemimpinan camat bapak Bambang Wahyudi sekitar tahun 1992/1993. Upacara petik laut dikemas dengan menggunakan paket wisata. Jadi tidak hanya dilakukan oleh nelayan sekelompok saja, namun diadakan semacam upacara formal, dengan berbagai macam doa. Setelah itu diadakan kirap bersama dengan sesaji-sesaji yang akan dilarung di laut. Upacara ini sangat meriah sekali, apalagi di tambah dengan adanya hiburan wayang dan pameran hasil pembangunan dari kedua desa. Biaya untuk upacara petik laut ini hasil dari swadaya masyarakat nelayan Puger dan dari bantuan sponsor-sponsor lain. Tradisi upacara petik laut tersebut terus berlangsung sampai sekarang.

Upacara petik laut ini akhirnya dijadikan salah satu agenda wisata di kecamatan Puger. Potensi wisata tidak hanya ini saja, namun ada tempat wisata yang lain seperti wisata pantai pancer dan wisata pulau kucur. Bahkan saat ini kawasan pantai Puger akan dijadikan kawasan wisata oleh pemkab Jember. Nantinya kawasan ini diharapkan dapat berkembang dengan pesat seiring dengan adanya Jalur Lintas Selatan yang saat ini sedang dalam proses pembangunan. Dimana nantinya akan dibangun sebuah jembatan yang melintasi delta di pesisir pantai Puger. Dengan pembangunan ini diharapkan dapat memberikan perubahan yang positif bagi perkembangan masyarakat Puger terutama bagi komunitas nelayan Puger.

Wilayah pesisir kedua desa ini dapat dikatakan memiliki perkembangan yang pesat. Pembangunan diwilayah pesisir ini tumbuh dengan pesat dari tahun-ketahun. Pembangunan perumahan merupakan pembangunan yang menonjol di komunitas nelayan Puger ini. Saat ini

sudah ada pabrik es yang memasok kebutuhan es nelayan, yang digunakan untuk membantu menyimpan hasil tangkapan nelayan. Untuk pabrik-pabrik yang lain tidak ada di wilayah pesisir Puger. Tahun lalu sempat akan didirikan pabrik tepung ikan, namun pengoperasiannya tidak dilanjutkan. Hal ini disebabkan karena pembuangan limbah pabrik tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan lingkungan. Pembuangan limbah pabrik tepung dibuang begitu saja diareal perumahan penduduk. Akhirnya nelayan melakukan aksi protes terhadap pabrik tersebut, dan hingga saat ini pabrik tersebut tidak beroperasi. Perumahan dipemukiman nelayan mayoritas sudah berdinding tembok. Fasilitas seperti sekolah sudah banyak berkembang di kedua desa. Mulai dari pendidikan usia dini sampai SMA dan SMK. Di Puger Kulon terdapat satu SMK kelautan dan SMK yang lain. Jika dilihat dari tingkat pendidikan terutama dikomunitas nelayan Puger, banyak yang sudah menamatkan pendidikan sampai tingkat SLTP. Untuk jenjang pendidikan selanjutnya banyak yang tidak melanjutkan atau berhenti ditengah tingkat. Dan selanjutnya mereka bekerja baik sebagai nelayan atau pekerjaan yang lain. Mata pecaharian sebagaian besar adalah sebagai nelayan, baik itu sebagai juragan atau pemilik perahu dan pandhega/anak buah kapal.

Pasar dan pertokoan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beragam toko, baik itu pakaian, perlengkapan alat tangkap, obat-obatan, bahan makanan. Selain itu munculnya minimarket seperti Alfamart, Indomaret ditengah komunitas masyarakat pesisir menambah dinamisnya perubahan masyarakat. Tidak hanya itu, bank-bank seperti BRI, Danamon serta adanya ATM menandakan bahwa masyarakat pesisir Puger juga membutuhkan fasilitas ini.

#### **4.2 Struktur Sosial Komunitas Nelayan**

Struktur sosial yang ada dikomunitas nelayan disini maksudnya adalah sebuah susunan sosial yang didasarkan pada pola hubungan sosial antara para aktor yang bergerak dalam kehidupan laut. Struktur sosial komunitas nelayan Puger dibedakan berdasarkan pada alat produksi/ armada yang digunakan. Untuk perahu skoci, payang dan jukung dapat digolongkan menjadi 2 tingkatan. Kedua tingkatan tersebut yaitu nelayan pemilik (juragan darat), dan nelayan buruh (juragan laut/nahkoda dan pandhega/ABK). Nelayan pemilik merupakan nelayan yang memiliki perahu atau pemilik modal dan biasanya tidak ikut melaut. Sedangkan nelayan buruh adalah nelayan yang mengoperasikan perahu di laut. Nelayan buruh ini hanya menyumbangkan

jasa tenaga. Nelayan buruh ini terbagi jadi juragan laut atau nahkoda kapal dan ABK (anak buah kapal). ABK terbagi dalam beberapa tugas. Tugas-tugas tersebut antara lain ada yang mengangkat jaring, memancing, dan mengiring lampu.

Seorang nahkoda merupakan seorang yang bertanggung jawab penuh terhadap operasi penangkapan. Seorang nahkoda harus memiliki kemampuan serta pengetahuan yang luas tentang kelautan dan perikanan. Pengetahuan dan keahlian tersebut diperoleh dari pengalaman bekerja yang lama sehingga menjadi profesional dan sering mendapat hasil tangkapan. Bahkan ada salah seorang nahkoda senior di komunitas nelayan Puger yang menggadaikan dirinya (keahliannya) untuk mendapatkan pinjaman dari juragan. Jadi ia menjadi nahkoda suatu perahu payang dengan jaminan dirinya dan untuk mendapatkan pinjaman dari juragan tersebut. Untuk perekrutan pandhega sebuah perahu atau jukung merupakan tanggung jawab dari juragan. Juragan perahu payang merekrut pandheganya, terutama didasarkan atas saling percaya. Juragan akan mengontrak pandhega jika ada pandhega yang mau dikontrak. Juragan akan memberikan pinjaman sebesar yang pandhega inginkan, misalnya 4 juta sampai puluhan juta. Hubungan kerja akan putus jika pandhega dapat mengembalikan pinjamannya tersebut. Sedangkan untuk sistem harian, upahnya berasal dari jumlah bagian hasil tangkapan. Pandhega harian ini hanya bekerja dalam satu kali trip saja. Jadi juragan untuk operasi penangkapan berikutnya dapat mencari pandhega lainnya. Unsur kekerabatan atau ketetangaan dalam nelayan payang kurang diperhitungkan. Sedangkan untuk perahu kecil/jukung yang berawak 2-3 orang, hubungan kekerabatan dan ketetangaan cukup dipertimbangkan. Dalam organisasi penangkapan ini merupakan suatu kelompok sosial yang memiliki ikatan sosial. Ikatan sosial ini sangat dibutuhkan terutama dalam kegiatan penangkapan ikan. Ikatan sosial ini tidak hanya untuk kepentingan pekerjaan namun juga untuk mengatasi persoalan hidup rumah tangga.

Selain nelayan (juragan dan pandhega) ada pihak lain yang juga berkontribusi dalam penjualan ikan nelayan, pihak itu adalah pengambek. Pengambek memiliki hubungan kerja dengan juragan. Juragan meminjam sejumlah uang kepada pengambek. Kompensasi dari pinjaman itu adalah juragan harus menjual ikannya kepada pengambek. Pengambek yang ada di Puger cukup banyak jumlahnya. Mereka kemudian menjual ikan dari nelayan sesuai dengan kemauannya. Biasanya pengambek menganbil keuntungan Rp 1000 untuk setiap keranjang ikan untuk ikan-ikan tertentu. Harga juga akan berbeda jika hasil tangkapan yang diperoleh ikan besar seperti Tuna, dan Cakalang. Ikan hasil tangkapan nelayan dijual dalam kondisi segar atau sudah

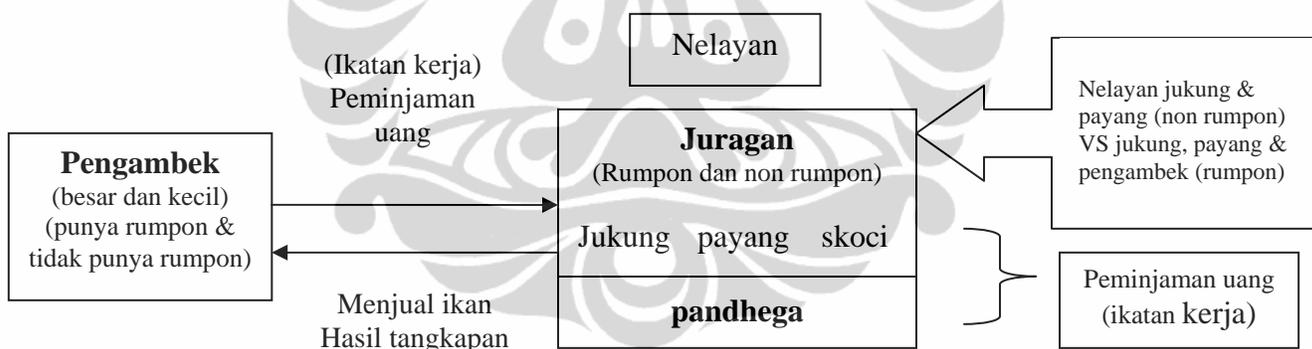
diolah (pemindangan dan pengasapan). Terdapat beberapa jenis ikan hasil tangkapan nelayan Puger. jenis ikan tersebut antara lain Tongkol, Tuna, Cakalang, Cucut, layang, Layur, bawal, Lemuru, Tenggiri, Pari, dan Tuna. Jumlah produksi perikanan di Puger tahun 2009 sebesar 6,518.85 ton. Jumlah tersebut berasal dari 2,365 perahu dan 6.608 rumah tangga nelayan (Dinas perikanan dan peternakan Jember, 2009).

Kelompok-kelompok nelayan yang terlibat dalam program rumponisasi ini adalah terutama dari nelayan skoci dan nelayan payang. Dari program rumponisasi tersebut akhirnya terbentuk kelompok-kelompok nelayan yang menggunakan rumpon. Satu rumpon dapat digunakan oleh 5 unit perahu skoci atau 7 unit campuran perahu payang dan skoci. Dalam waktu penangkapannya digunakan sistem pergantian waktu. Sedangkan untuk perahu jukung tidak terdapat kelompok-kelompok seperti pada perahu payang dan skoci. Mereka menggunakan alat tangkap dengan spesifikasinya masing-masing. Mereka tidak menggunakan alat bantu rumpon dalam penangkapannya. Konflik rumpon yang terjadi di komunitas nelayan adalah nelayan perahu payang dan skoci, dimana dalam penangkapannya di bantu dengan rumpon, dengan nelayan jukung.

Jika dilihat dari hubungan dengan pengambek, nelayan yang menggunakan rumpon memiliki porsi yang besar dalam hal peminjaman uang dari pada nelayan yang tidak menggunakan rumpon. Pengambek meminjamkan uang kepada nelayan sesuai dengan kebutuhannya. Pengambek yang berada di Puger ada yang memiliki rumpon dan ada yang tidak memiliki rumpon. Selain itu pengambek yang ada bisa digolongkan menjadi pengambek besar dan kecil. Pengambek besar merupakan pengambek yang menjual ikan dengan partau besar sekaligus juga meminjamkan uang kepada semua golongan nelayan dalam jumlah yang besar pula. Kompensasi dari peminjaman itu adalah dengan menjual hasil tangkapan kepada pengambek dengan harga jual ditentukan oleh pengambek. Ikatan ini terjalin sesuai dengan kesepakatan antara nelayan dengan pengambek. Terkadang meskipun nelayan ingin melunasi hutangnya pengambek tidak mau jika hutangnya dilunasi. Jadi ikatan tersebut tetap terjalin. Pengambek dalam konflik rumpon ini juga mempunyai peranan penting. Menurut informan dari nelayan skoci, dalam tuntutan untuk pemutusan rumpon, pengambek juga memiliki kepentingan. Kepentingan itu terkait dengan modal atau uang dari hasil penjualan ikan dari nelayan. Jika rumpon diputus maka hal ini akan mempengaruhi jumlah hasil tangkapan nelayan. Dengan tidak adanya rumpon, hasil tangkapan nelayan menurun, dan penjualan kepada pengambek juga

menurun. Karena hasilnya menurun maka penjualan ikan oleh pengambek kepada distributor yang lebih besar juga menurun, dan keuntungan yang diperoleh sedikit.

Sedangkan hubungan antara juragan dengan pandhega juga terlihat dari sistem hubungan kerja. Pandhega menerima bagian sesuai dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Selain itu hubungan juga terlihat dari kontrak kerja antara kedua belah pihak. Ikatan kerja akan terus berlangsung selama pinjaman uang yang diberikan belum terbayar. Namun terkadang dalam pola hubungan nelayan jukung, ini terlihat lebih longgar bila dibandingkan dengan nelayan perahu payang atau skoci. Pada nelayan jukung yang berisi 2 orang, modal perahu sampai penangkapannya dibagi berdua, jadi kedua nelayan tersebut memiliki porsi yang sama dalam modal yang diberikan. Dalam hal ini tidak ada pandhega atau anak buah kapal, karena kedua nelayan tersebut memiliki kedudukan yang sama. Hal ini berbeda jika satu jukung bersisi lebih dari 2 orang, salah satunya merupakan pandhega. Pembagian hasil tangkapan tergantung dari posisi tersebut, nelayan pemilik perahu akan mendapat bagian yang lebih besar dari pada pandhega. Gambaran mengenai hubungan kerja nelayan dengan konflik rumpon yang terjadi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4.1 Hubungan kerja nelayan dengan konflik rumpon

#### 4.3 Pola dan teknologi penangkapan ikan di komunitas nelayan Pantai Puger

Pola penangkapan ikan di komunitas nelayan Puger bisa dilihat berdasarkan armada dan teknologi yang digunakan oleh masing-masing nelayan. Tehnologi penangkapan atau alat tangkap yang digunakan oleh komunitas nelayan. Puger bermacam-macam sesuai dengan sumber daya yang ditangkap. Alat tangkap tersebut mengalami perkembangan dari tahun-ketahun, begitu juga dengan armada yang digunakan nelayan. Pola dan tehnologi penangkapan ikan di komunitas Puger dapat digolongkan menjadi 3 golongan berdasarkan armada yang digunakan, yaitu nelayan jukung, nelayan payang dan nelayan skoci.

#### **4.3.1 Pola dan Tehnologi Penangkapan Nelayan Jukung : Nelayan yang tidak menggunakan alat bantu penangkapan rumpon**

Nelayan golongan ini merupakan nelayan yang dalam aktivitas penangkapan dilaut menggunakan perahu/sampan kecil/jukung. Karena menggunakan armada yang kecil maka jukung ini tidak menggunakan alat bantu rumpon dalam penangkapannya. Hal ini disebabkan oleh karena rumpon tersebut di pasang di jarak minimal 30 mil dari bibir pantai pesisir Puger. Sedangkan kapasitas jukung ini tidak memadai untuk melakukan penangkapan dengan jarak 30 mil. Oleh karena itu nelayan ini hanya menggunakan lampu sebagai alat bantu penangkapan dan tidak menggunakan rumpon. Menurut nelayan jukung hasil tangkapan sebelum banyaknya nelayan yang menggunakan rumpon, mereka paling tidak mendapat 3-7 box kecil ikan sedangkan saat ini mereka paling tidak mendapat 1 box ikan atau bahkan tidak mendapat hasil tangkapan.

Golongan nelayan jukung di komunitas nelayan Puger ini jumlahnya sekitar 400-an orang pemilik jukung. Nelayan jukung ini menggunakan alat penangkapan yang bervariasi, seperti jaring dan pancing. Kayu yang digunakan untuk membuat jukung adalah kayu Suren, Jati, Bendo, Gangangan dan Takir. Nelayan biasanya mendapat kayu itu dari pembeli di luar Puger. Harga jukung ini berkisar 15 juta-an sampai 25 juta jika nelayan membuat sendiri jukungnya ataupun beli. Sedangkan untuk harga jukung bekas berkisar 12 juta-an. Dari harga tersebut biaya mesin berkisar 500 ribu, biaya cat lebih kurang 600 ribu. Lem dibutuhkan 4 kg @ 125.000. Ukuran jukung panjang 7m, lebar 60 cm, dan tingginya sekitar 70 cm. Jukung ini menggunakan "katir" disamping kanan dan kirinya yang terbuat dari bambu. Panjang "katir" masing-masing adalah 7,5 m, dan "brayungan" (kayu yang melengkung tempat "katir" dipasang) panjangnya sekitar 4 m. Jukung juga memiliki kemudi yang terbuat dari kayu, panjangnya lebih kurang 2 meter. Peralatan yang ada dalam jukung ini antara lain mesin, lampu elektronik 2 biji berwarna putih, tali "tampar", jangkar yang terbuat dari kayu dengan pemberatnya batu sebanyak 2 buah dimana masing-masing beratnya 5 kg, pengait yang terbuat dari kayu dan besi, box sebagai tempat menyimpan ikan 2 buah (box ini ukuran sedang, ukurannya 1,5m x 0,5m), prabean (alat untuk menangkap ikan tongkol, slengseng, benggol) serta pancing. Dalam sistem bagi hasilnya hanya di bagi dengan 2-3 orang dalam jukung tersebut. Bagian tersebut diberikan setelah dikurangi dengan biaya operasional. Bagian juragan/

pemilik perahu mendapat 50%, dan 50% sisanya dibagi dengan 2 pandhega lainnya. Secara spesifik alat tangkap nelayan jukung dibagi menjadi:

a. Nelayan jukung ”jaringan setet”

Nelayan jukung jaringan setet ini menangkap ikan jenis Lemuru saja. Segerombolan ikan lemuru ini nantinya akan masuk kedalam jaring mengikuti arus atau dengan kata lain ikan lemuru ini akan tersangkut pada mata jaring setet. Jaring setet ini bisa dikatakan juga sebagai jaring gillnet hanyut. Dalam operasi penangkapannya dapat dilalukan baik didasar maupun dibawah lapisan permukaan air. Jumlah nelayan dalam satu jukung ini sekitar 2-3 orang. Jika ada 3 orang dalam satu perahu maka 1 orang untuk menjaga mesin dan meluruskan arah laju perahu. Sedangkan 2 orang lainnya melakukan penangkapan ikan. jika terdapat 2 orang dalam perahu maka 1 orang menjaga perahu dan satunya melakukan penangkapan ikan. Cara pengoperasiannya adalah dengan dihanyutkan mengikuti atau searah dengan aliran arus. Jaring dilemparkan ke laut baru kemudian diikuti dengan pemberat jaring berupa batu. Didalam jaring setet ini tidak menggunakan jangkar dalam menurunkan jaringnya.

Jaring setet ini bentuknya sederhana, yaitu dengan bentuk memanjang. Ukuran yang digunakan oleh nelayan jukung jaring setet ini panjangnya minimal 125m yang terdiri dari beberapa pieces (15 pieces) yang digabung menjadi satu. Mata jaring masing-masing pieces berbeda-beda, ada yang 5 inci, 4 inci, 3 inci dan 2,5 inci. ”oloran” atau tali/senar yang menghubungkan jaring dengan perahu panjangnya sekitar 10-20m. Pelampung ”umpal” untuk jaring ada 10 buah. Pelampung ini terbuat dari gabus. Ketika beroperasi jarak antara perahu dengan jaring sekitar 20m. Jarak antara pelampung satu dengan yang lainnya sekitar 2,5m. Pemberat jaring berupa batu yang ditalikan dibawah jaring sedangkan Jarak antar pemberat batu sekitar 2m. Dalam penangkapannya juga dibantu dengan lampu pompa atau petromaks dan lampu elektronik (bila mampu). Lampu digunakan jika penangkapan dilakukan pada malam hari. Nelayan di Puger biasanya menggunakan 2 buah lampu pompa/elektronik. Operasi penangkapan nelayan jaring setet bisa malam dan siang hari. Jika berangkat pagi, maka melepaskan jaring sekitar pukul 6 maka sekitar pukul 9 pagi sudah di tarik. Daerah penangkapan nelayan jaring setet ini sekitar pantai Paseban (batas timur), Pulau Nuso Barong, dan terutama di daerah semenanjung pesisir pantai Puger sampai di sekitar pantai Getem (batas barat). Untuk jarak penangkapan minimal 3 mil dari pesisir pantai Puger.

#### b. Nelayan "pancingan"

Nelayan "pancingan" merupakan nelayan yang menggunakan pancing dalam operasi penangkapannya. Pada prinsipnya pancing ini terdiri dari dua komponen yaitu tali dan mata pancing. Tali pancing bisa dibuat dari bahan benang katun, nilon, plastik (senar). Mata pancing pada umumnya dibuat dari kawat baja-kuningan atau bahan lain yang tahan karat. Jumlah mata pancing yang terdapat pada tiap perangkat (satuan) pancing bisa tunggal maupun ganda (dua atau 3 buah) atau bahkan sampai puluhan tergantung dari jenis pancingnya. Sedangkan untuk ukuran mata pancing ini bervariasi, disesuaikan dengan besar kecilnya ikan yang akan ditangkap/dipancing. Pancing yang ada dipakai oleh nelayan kemudian dilengkapi dengan komponen-komponen lain, seperti tangkai, pemberat, dan pelampung. Pada umumnya mata pancing diberi umpan, umpan yang digunakan bisa berupa umpan tiruan/umpan palsu. Sedangkan cara pengoperasiannya, pancing-pancing ini bisa di labuh (dengan jangkar), ditarik di belakang jukung yang sedang dalam keadaan berjalan baik menelusuri permukaan air, lapisan tengah maupun di dasar perairan dan juga di hanyutkan.

Pada komunitas nelayan Puger, nelayan "pancingan" ini terdiri dari 2 orang dalam satu jukung. Tugas masing-masing orang adalah satu orang untuk menjaga mesin dan satu orang untuk melemparkan pancing. Namun terkadang penjaga mesin juga ikut memegang pancing. Dalam sekali operasi biasanya menghabiskan minimal 20 liter solar, sedangkan spesifikasi mesinnya adalah 10 kama. Ikan yang ditangkap adalah jenis ikan Peleng/Gendo dan Tuna. Nelayan jukung pancingan di komunitas nelayan Puger dibedakan menjadi nelayan jukung pancing "eretan" dan nelayan jukung pancing "methe'an". Yang membedakan keduanya adalah jenis pancing yang digunakan untuk menangkap ikan dan cara beroperasinya.

##### 1. Nelayan jukung pancing "methe'an"

Pancing yang digunakan oleh nelayan jukung "methe'an" adalah jenis pancing dimana 1 eretan senar terdiri dari 27 buah pancing. Jadi jika pancing "eretan" 1 "eretan" itu satu kail/pancing, maka pancing "methe'an" 1 eretan senar terdapat 27 kail/pancing. Panjang pancing ini 3 rol senar dimana 1 rol panjangnya sekitar 10 m. Dalam sekali operasi penangkapan nelayan biasanya hanya melepaskan 1 "eretan" saja. Dan dalam operasi penangkapannya jukung tidak bergerak. Umpan yang digunakan merupakan umpan buatan/tiruan yang terbuat dari benang emas, bulu ayam, bulu bebek serta senar

halus. Daerah penangkapan nelayan jukung pancing "methe'an" ini sekitar 30 mil dari pesisir pantai Puger.

## 2. Nelayan jukung pancing "eretan"

Jenis pancing "eretan" ini merupakan jenis pancing untuk mengambil ikan abon, tongkol (pancing kecil) dan tuna (pancing besar). Ukuran pancing yang digunakan adalah pancing no 4. sedangkan umpan yang dipakai biasanya terbuat dari benang mas, "kerean" terdiri dari bulu ayam, senar halus, dan len trik dari bulu bebek. Umpan tersebut biasanya dibuat sendiri oleh nelayan. "Pesuruh" adalah senar yang menghubungkan pancing dengan "oloran". "Pesuruh" yang dibutuhkan sebanyak 1 rol (7 meter untuk 1 pancing). "Kerekan/oloran" merupakan senar yang menghubungkan "pesuruh" dengan nelayan. "kerekan/oloran" yang dibutuhkan sebanyak 1 bendel setegah (150m). Jadi bentuk pancing ini berupa satuan (satu gulungan yang terdiri dari rangakaian memanjang mata pancing, "pesuruh", dan "kerean"). Jadi "kerean" merupakan gulungan senar yang dipegang oleh nelayan ketika menangkap ikan.

Dalam pelepasannya pancing dilemparkan satu persatu. Kail pancing yang pertama dilemparkan, kemudian "pesuruh" dan yang terakhir "oloran/kerean". Satu orang melepaskan pancing minimal 3 pancing dalam sekali waktu penangkapan. Masing-masing nelayan memegang pancing dan satu pancing lainnya diletakkan di bagian belakang jukung dekat kemudi. Ketika proses penangkapan ikan kapal bergerak. Apabila ikan sudah tersangkut, maka kemudian ikan ditarik dengan kait didaerah sekitar ingsang dan mata. Hal ini untuk mencegah agar ikan tidak rusak. Mesin yang digunakan untuk jukung ini biasanya mesin dengan kapasitas 10 Kama. Bahan bakar yang digunakan adalah solar. Dalam sekali operasi penangkapan biasanya menghabiskan 20 liter solar. Nelayan jukung biasanya berangkat melaut pada pagi dan malam hari. Jika berangkat pagi maka sore nelayan sudah datang. Dan jika nelayan berangkat melaut paada sore hari maka malam atau dini hari mereka sudah pulang. Daerah operasi penangkapan jukung pancing "eretan" ini sekitar pulau nuso barong, namun lebih jauh lagi sekitar 30 mil dari nelayan jukung jaringan.

### c. Nelayan "tethel"

Nelayan jukung "tethel" ini merupakan nelayan yang khusus memancing ikan dasar/karang. Yang membedakan dengan nelayan pancingan adalah pancing dilengkapi dengan komponen pelampung, jangkar serta jumlah mata pancing yang lebih banyak dari nelayan jukung "methe'an". Jumlah nelayan dalam jukung ini sebanyak 2-3 orang. Di komunitas nelayan Puger nelayan jukung "tethel" dibedakan menjadi pancingan "tethel" kecil dan pancingan "tethel" besar.

#### 1. Pancingan "tethel" kecil

Pada nelayan ini jumlah pancingnya secara keseluruhan lebih kurang sebanyak 300 mata pancing. Tali pancing terbuat dari bahan senar dengan diameternya 120cm. Ikan yang ditangkap untuk jenis pancing ini adalah ikan Kerapu, Putih, Kakap Merah, Bawal, Sunuk, Manyong, Pari. Kedalam ikan-ikan tersebut bervariasi, misalnya ikan kerapu kedalaman 80m, bawal kedalaman 70-80m ketika air jernih. Ketika bulan 6-9 ketika air merah, karena banyak kabut, angin bertiup ketimur dan air dingin, ikan bawal makannya pada siang hari. Selain bulan tersebut ikan bawal makannya pada malam hari. Umpan yang digunakan berupa umpan tiruan dan umpan benar. Umpan tiruan terbuat dari rangkaian benang emas dan bulu ayam. Sedangkan untuk umpan benar/ asli digunakan ikan lemuru. Ikan lemuru dibutuhkan kurang lebih 20 kg.

Nelayan pancingan ini biasanya berangkat jam 03.00 sampai sekitar sore atau siang 12.00 mereka mengakhiri proses penangkapan. Jenis pancing ini seperti bentuk pancing prawe, yaitu suatu tipe rawai dasar konvensional dalam ukuran yang relative kecil. Bentuk pancing ini terdiri dari beberapa komponen yaitu tali utama, tali cabang, unjuran, mata pancing, umpal/pelampung, dan juga jangkar. Secara keseluruhan panjang tali utama kurang lebih 300m, yang pada jarak tiap 4,5m digantungkan tali cabang (panjang  $\pm$  3m) yang pada ujungnya diberi mata pancing (no 7). Untuk memudahkan penyimpanan tiap 5 atau lebih tali cabang (5 atau lebih mata pancing) sebelum dipergunakan disimpan dalam wadah yang dibuat dalam seruas bambu yang disebut dengan "basket". Antara basket satu dengan basket lainnya diberi umpal/pelampung dari gabus yang banyaknya disesuaikan dengan banyaknya basket. Pada umpal/pelampung ini diikat dengan seutas tali yang pada ujung bawahnya diberi pemberat (andem) berupa batu. Pada umpal yang dipasang paling akhir

disambungkan dengan unjuran (panjangnya  $\pm 100\text{m}$ ) yang menghubungkan slambar dengan jukung. Diujung akhir umpal/pelampung diberi bendara yang berfungsi sebagai tanda pengenal.

Dalam pengoperasiannya topografi yang dipilih adalah paling tidak harus dasar perairan yang rata, dengan demikian dapat menghindari kemungkinan tersangkut oleh karang-karang atau benda lain yang tidak diharapkan. Dalam pengoperasinya pancing "tethel" kecil ini ditunggu lebih kurang 10-15 menit oleh nelayan sesaat setelah mereka melepaskan pancing dengan baik di laut. modal tersebut Biasanya nelayan ini melakukan 2 kali aktivitas pelemparan pancing dalam sekali waktu beroperasi. Harga ikan untuk hasil tangkapan pancing ini mendapatkan uang 300.000 sampai 3 juta dalam sekali operasi penangkapan. Modal yang dikeluarkan untuk sekali melaut nelayan pancingan ini membutuhkan Rp. 200.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli solar, umpan dan perbekalan lainnya seperti makanan selama operasi penangkapan. Modal ini dikeluarkan oleh pemilik perahu. Sedangkan anak buah kapal hanya membawa perbekalan nasi saja sedangkan untuk lauk pauk pemilik jukung yang menyediakan.

## 2. Pancingan "tethel" besar

Nelayan pancingan "tethel" besar jumlah mata pancing yang dipasang oleh nelayan sebanyak 41 mata pancing. Tali mata pancing terbuat dari bahan senar. Nelayan pancingan ini biasanya berangkat pukul 03.00 dini hari dan datang sekitar pukul 07.00. Secara spesifik komponen pancing "tethel" besar ini tidak jauh berbeda dengan pancingan "tethel" kecil. Yaitu terdiri dari tali utama, tali cabang, unjuran, mata pancing, pengga (seperti kili-kili panjang  $\pm 15\text{ cm}$ ), umpal/pelampung, dan juga jangkar (terbuat dari kayu dan batu, panjangnya 1,5m). Tali utama panjangnya lebih dari 300m, yang pada tiap 2,5m digantungkan tali cabang (panjang  $\pm 4\text{m}$ ) yang pada ujungnya diberi mata pancing (no 1) dimana sebelum mata pancing dipasang terlebih dahulu "pengga" (kili-kili). Sedangkan panjang tali (tampar) jangkar dari gabus ke dasar laut lebih kurang 200m. Cara penyimpanannya juga sama seperti penyimpanan pancingan "tethel" kecil, yaitu disimpan di basket.

Dalam pengoperasinya pancing "tethel" besar ini nelayan meninggalkannya sesaat setelah melepaskan pancing. Setelah melepaskan rangkaian pancing tersebut,

nelayan meninggalkannya ke darat. Nelayan akan kembali lagi pada keesokan paginya sekitar pukul 05.00 pagi untuk mengambil pancingan ini. Biasanya nelayan ini melakukan 1 kali aktivitas pelemparan pancing dalam sekali waktu beroperasi. Hasil tangkapan pancingan ini adalah ikan hiu, Manyung dan Tenggiri. Ikan-ikan tersebut biasanya berada dikedalaman 100m. Dalam penangkapan ikan Manyung nelayan menunggu gelombang besar. Pada saat gelombang besar ini ikan Manyung biasanya memakan umpan. Untuk penangkapan ikan Tenggiri, biasanya ketika kondisi air sedang jernih, tidak kotor, biasanya pada waktu pagi hari sekitar pukul 06.00 pagi. Untuk umpannya nelayan pancingan "tethel" besar ini menggunakan umpan tiruan/buatan dan umpan benar/asli. Umpan tiruan ini biasanya terbuat dari benang emas dan bulu ayam/bebek. Sedangkan umpan benar menggunakan ikan karang, ikan Tongkol. Besarnya umpan yang dibutuhkan untuk sekali beroperasi biasanya 1 box penuh yang beratnya sekitar 30 kg. Harga ikan untuk pancingan "tethel" besar ini lumayan besar jika dibandingkan dengan pancingan "tethel" kecil. Uang yang didapatkan nelayan paling tidak 3 juta sampai 10 juta dalam sekali operasi penangkapan sudah berada ditangan. Besar uang tersebut sudah menutupi modal yang dikeluarkan oleh nelayan. Pada nelayan pancingan "tethel" besar ini modal untuk sekali berangkat melaut sekitar Rp 200.000-Rp 300.000. modal tersebut untuk membeli solar, umpan benar/asli serta perbekalan yang lainnya.

Pendapatan nelayan pancingan ini memang cukup lumayan apalagi jika harga jual ikan dipasaran mengalami kenaikan. Pada saat ini (bulan November 2010) harga ikan Hiu bisa mencapai 25.000 /kg (berat hiu  $\pm$  50 kg). Harga ikan Bawal dengan berat 2 kg dihargai Rp 72.000, sedangkan untuk ikan Bawal dengan berat 1 kg dihargai dengan Rp 47.000. Ikan Kerapau dengan berat 1 kg keatas dihargai dengan Rp 25.000, sedangkan untuk berat diatas 7 kg dihargai dengan Rp. 50.000. Ikan Kerapu merah 1 kg dihargai Rp 32.000, ikan Kerapu Merah ekor gunting dengan berat 1 kg harganya Rp 72.000. harga ikan Putih 1 kg Rp 7.500, ikan Kakap Merah Rp 30.000/kg, ikan Manyung Rp 7.500/kg. Sedangkan untuk ikan Tenggiri Bagus (jawa) dihargai Rp 35.000/kg, dan untuk ikan Tenggiri Batang (gagak) dihargai Rp. 12.000/kg.

#### **4.3.2 Pola dan Tehnologi Penangkapan Nelayan Payang : nelayan yang menggunakan dan tidak menggunakan rumpon.**

Payang sudah lama dikenal oleh komunitas nelayan Puger. Semenjak memasuki tahun 2004/2005 nelayan payang ada sebagian nelayan yang sudah memakai rumpon dalam penangkapannya. Sedangkan beberapa nelayan yang lainnya tidak menggunakan rumpon. Mereka yang tidak menggunakan rumpon ini biasanya akan bertahan dengan perahu payangnya yang sekarang<sup>13</sup> atau beralih pada pemakaian jukung. Nelayan payang mengalami peningkatan sampai dengan sekitar tahun 2005. Setelah tahun 2005 tersebut jumlah nelayan payang dikomunitas nelayan Puger hanya mencapai puluhan perahu. Padahal sebelum tahun 2005 jumlah nelayan payang ini mencapai ratusan perahu. Banyak nelayan payang yang beralih menjadi nelayan jukung, baik itu jukung jaringan maupun jukung pancingan. Banyaknya nelayan yang beralih ke jukung disebabkan karena hasil tangkapan yang mengalami penurunan dan biaya operasi penangkapan perahu payang yang besar. Untuk hasil tangkapan, menurut nelayan payang sebelum adanya rumpon nelayan payang biasanya minimal mereka mendapat 5 kotak penuh ikan (sekat kotak di dalam lambung perahu payang) sedangkan setelah banyaknya rumpon nelayan minimal hanya mendapat 1 kotak saja. Sedangkan

Sedangkan untuk biaya yang besar ini tidak diimbangi dengan pemasukan atau ikan hasil penangkapan. Nelayan sering kali mengalami penurunan jumlah tangkapan. Uang hasil penjualan tidak mampu menutupi modal yang dikeluarkan oleh nelayan. Dalam sekali operasi penangkapan ikan pemilik perahu payang minimal harus mengeluarkan uang sebesar Rp 700.000. Modal tersebut digunakan untuk membeli bahan bakar solar, serta bekal atau uang untuk membeli makanan bagi anak buah kapalnya (pandhega) ketika akan melaut. Ketika akan berangkat melaut juragan darat akan mempersiapkan semua kebutuhan, seperti solar minimal membutuhkan 20 liter. Selain solar nelayan menyiapkan nasi tanpa atau dengan dengan lauk pauk bagi pandeganya (ABK). Jika juragan darat (pemilik perahu tidak menyiapkan nasi dan lauk pauknya, maka biasanya diganti dengan uang sekitar Rp 15.000 per orang (19-20 orang). Namun terkadang juragan memberikan uang plus dengan nasi.

Para pandhega tersebut bekerja dengan sistem kontrak dan harian. Dalam sistem kontrak ini juragan/pemilik perahu mengontrak pandhega dengan memberikan uang. Sistem kontrak ini

---

<sup>13</sup> Nelayan yang bertahan ini tidak menggunakan rumpon karena ketidak mampuan modal yang mereka miliki untuk membuat rumpon.

merupakan bentuk ikatan kerja antara juragan dan pandhega. Juragan meminjamkan uang tanpa jaminan kepada pandhega. Juragan hanya menjamin rasa kepercayaan kepada pandhega tersebut. Lama/masa kerjanya pandhega kepada juragan tergantung dari keinginan pandhega. Jika pandhega ingin keluar maka ia harus mengembalikan uang yang dipinjamnya itu kepada juragan. Selama ia belum mampu membayar pinjamannya tersebut maka selama itu ia harus bekerja pada juragan tersebut. Meskipun pandhega tersebut berstatus sebagai pandhega juragan tertentu, namun ia bisa bekerja di tempat lain. Ia bisa bekerja ditempat lain dengan syarat jika sewaktu-waktu akan pergi melaut pandhega tersebut harus siap untuk berangkat. Besaran uang yang diberikan tergantung dari permintaan pandhega dan kemampuan juragan/pemilik perahu. Besaran uang yang diberikan dikomunitas nelayan payang Puger sekitar 2 juta, 4 juta, 5 juta atau bahkan sampai puluhan juta, (17 juta, 20 juta). Sistem kontrak sangat beresiko bagi juragan, karena tidak ada jaminan didalamnya. Banyak kejadian dimana pandhega tiba-tiba berhenti tanpa pemberitahuan dan mengembalikan pinjamannya tersebut. Oleh karena itu juragan biasanya hanya menerima pandhega dengan sistem kontrak jika pandhega tersebut memang benar-benar orang yang sudah dikenalnya dan dapat dipercaya. Hal ini untuk meminimalisir resiko tersebut.

Pada juragan yang memiliki keberuntungan dalam operasi penangkapannya biasanya banyak pandhega yang bekerja ke juragan tersebut. Dengan demikian juragan tidak perlu mencari pandhega untuk operasi penangkapan di laut. Sedangkan untuk sistem harian ini, juragan mencari pandhega yang mau diajak melaut pada saat atau setiap kali melaut. Ketika mau berangkat melaut, juragan biasanya menyuruh orang lain untuk memberitahukan kapan hari dan waktu akan berangkat. Orang yang melakukan pekerjaan ini disebut sebagai "lecekan". "Lecenan" ini juga akan mendapat bagian dari hasil tangkapan sebagai upahnya memberitahukan kapan waktu berangkat melaut. Selain "lecekan" ada juga orang yang hanya bertugas membersihkan perahu. Orang ini nantinya juga mendapat upah bagian dari hasil penangkapan ikan.

Jumlah nelayan dalam perahu payang ini 19-20 orang. Dari jumlah nelayan yang ikut melaut tersebut pemilik perahu terkadang juga ikut dalam operasi penangkapan. Dari 20 orang tersebut, 1 orang sebagai nahkoda, 5 orang melempar payang ke laut, 1 orang menjaga pelampung, 1 orang yang menahan tampar ketika mengambil pelampung, dan sisanya menangkap ikan. Pada intinya ketika menjaring ikan semua nelayan di dalam perahu melakukan

kegiatan penangkapan. Keadaan perahu pada saat penangkapan ikan dalam kondisi diam atau tidak bergerak.

Perahu payang yang ada dikomunitas Puger menggunakan kayu Jati. Sedangkan ukuran perahu payang dapat dideskripsikan sebagai berikut : panjangnya lebih kurang 15 m, lebar 5,5 m dan tinggi sekitar 2 meter. Perahu payang ini memiliki beberapa tiang dibagian tengah perahu. Ada 2 tiang, yaitu tiang depan dan tiang belakang. Tiang depan ini lebih panjang dari tiang belakang. Tiang depan berukuran 3 m, tiang belakang panjangnya 2,5 m. Dua tiang tersebut dihubungkan dengan 2 buah kayu yang masing-masing panjangnya 6,5 m. Diatas 2 kayu tersebut, tepatnya diatas tiang belakang terdapat seperti rumah kecil yang berfungsi sebagai tempat pengendalian kemudi. Ditempat ini biasanya digunakan untuk tempat *tape recorder/player* dan kemudi. Kemudi dijalankan secara lebih mudah dengan gagang bundar (seperti halnya kemudi di mobil). Kemudi kayu berada di bagian samping belakang bawah perahu payang. Dulu kemudi dijalankan dari bawah, dan rumah kecil itu sebagai tempat untuk melihat arus atau gelombang. Kayu dan tiang tersebut biasanya dihias oleh nelayan dengan berbagai macam-macam kain warna warni, lonceng, serta hiasan-hiasan menarik lainnya.

Harga perahu payang baru ini berkisar 125 juta, harga tersebut belum termasuk mesin. Harga mesin untuk perahu payang ini berkisar 35 juta. Kapasitas mesin yang digunakan adalah mesin PS 120 Mitshubishi 4 silinder. Nelayan Puger biasanya membuat sendiri perahu payangnya. Mereka membuat perahu di wilayah TPI Puger. Mereka mendatangkan tukang yang memang biasa mengerjakan perahu payang. Waktu pembuatan perahu payang ini memakan waktu berbulan-bulan (4-6 bulan) dikerjakan oleh 5-8 tukang. Tahap akhir pembuatan perahu ini adalah pengecatan. Perahu payang tersebut dicat dengan berbagai macam warna yang mencolok. Pada bagian belakang perahu biasanya di beri nama oleh pemilik perahu sebagai tanda pengenal. Nama-nama itu seperti "AREMA", "SI PUTRI" dan sebagainya.

Bentuk perubahan perahu payang tidak mengalami perubahan berarti dari tahun ketahun. Perubahan yang nampak biasanya terjadi pada bentuk haluan perahu. Sebelum tahun 2005 bentuk haluan belakang perahu masih berbentuk haluan lancip panjang keatas. Sedangkan saat ini banyak nelayan yang membentuk haluan perahunya lonjong atau melengkung. jadi seperti bentuk haluan belakang perahu skoci. Perahu payang ini juga dilengkapi dengan alat komunikasi berupa HT dan alat navigasi GPS (Global Positioning System). HT (handy talky) digunakan nelayan untuk berkomunikasi dengan nelayan lainya ketika dilaut. Peranan HT ini sangat

membantu dalam pemberian informasi keberadaan ikan. Sesama nelayan, terutama sesama nelayan Payang biasanya memberikan informasi tentang banyaknya keberadaan ikan. Sedangkan GPS digunakan sebagai alat penunjuk dimana rumpon mereka pasang serta penunjuk arah ketika nelayan akan kembali ke pesisir.

Di dalam perahu payang juga dilengkapi dengan *sound system* dan *tape recorder/ cd player*. Penggunaan *sound system* ini terutama sebagai alat hiburan nelayan saja. Karena alat ini digunakan untuk memutar kaset lagu-lagu. Untuk penggunaan box sebagai alat penyimpanan ikan hasil tangkapan, nelayan perahu payang hanya menggunakan lambung perahunya. Sebagai tempat untuk membagi ikan yang berasal dari lambung perahu, nelayan menggunakan keranjang kecil. Yang paling banyak penyita tempat di perahu payang adalah seperangkat jaring payang. Untuk mengangkat atau memindahkan rangkaian jaring payang ini membutuhkan sekitar 10 orang untuk mengangkatnya. Jaring ini dilipat atau dikumpulkan bersama pelampungnya yang berupa bola sepak. Jaring ini sebelum digunakan sebelumnya dirapikan atau dilipat terlebih dahulu kemudian ditutup dengan terpal. Alat yang lainnya adalah jukung/perahu kecil yang digunakan untuk menempatkan lampu. Jukung kecil dan lampu nantinya akan dilabihkan dilaut tempat dimana ikan akan ditangkap. Lampu ini nantinya digunakan untuk membantu operasi penangkapan. Lampu ini berupa rangkaian lampu yang berjumlah 8-10 lampu listik. Masing-masing lampu memiliki kekuatan 30 watt. Lampu-lampu tersebut memiliki warna lampu yang berbeda. Warna-warna tersebut putih (6 buah), kuning (1 buah) dan merah (1 buah). Lampu-lampu tersebut digunakan untuk kondisi air yang berbeda. Ketika air bersih/jernih semua lampu digunakan, sedangkan ketika air kotor lampu yang digunakan adalah lampu berwarna putih.

Payang merupakan alat tangkap ikan yang berupa jaring. Alat tangkap ini biasanya digunakan oleh perahu besar. Payang adalah "pukat kantong lingkar" yang secara garis besar terdiri dari bagian kantong (*bag*), badan/perut (*body*) dan kaki/sayap (*leg/wing*). Namun ada juga yang cuma membagi 2 bagian yaitu kantong dan kaki. Bagian kantong umumnya terdiri dari bagian-bagian kecil yang tiap bagian mempunyai nama-nama sendiri. Secara keseluruhan jaring payang ini di bagi menjadi beberapa jaring (ukuran masing-masing jaring berbeda). Pertama, jaring jari atau "tang-pontang". Jaring ini letaknya di bagian kantong. Panjangnya kurang lebih 25 m, lebar atas 7m, lebar bawah 9 meter. Kedua, jaring payang kecil, panjangnya lebih kurang 20m, lebarnya 7m. Ketiga jaring payang sedang, panjangnya 20m. Keempat jaring payang besar, ukuran panjangnya 110m. Harga per piece jaring payang ini harganya minimal Rp 2 juta.

Jaring payang ini terbuat dari nilon dan plastik. Jaring jaring (”tang-pontang”), jaring payang kecil, jaring payang sedang, jaring payang besar ini terbuat dari nilon. Sedangkan jaring payang besar terbuat dari plastik.

Besar mata jaring mulai dari ujung kantong sampai ujung kaki berbeda-beda, bervariasi mulai dari 1 cm sampai  $\pm$  40 cm. Jaring payang berbeda dengan jaring trawl dimana bagian bawah mulut jaring lebih menonjol ke belakang. Sedangkan untuk jaring payang justru bagian atas mulut jaring yang menonjol ke belakang. Hal ini dimaksudkan karena jaring payang digunakan untuk menangkap ikan pelagik yang hidup di atas/permukaan. Apabila ikan ini ditangkap maka cenderung lari kelapisan bawah. Oleh karena itu bagian bawah jaring payang lebih menonjol agar ikan tidak dapat lolos dan akhirnya masuk kedalam jaring. Pada bagian kaki/sayap dan mulut jaring payang diberi pemberat. Sedangkan untuk bagian atas pada jarak tertentu diberi pelampung. Jumlah pelampung ini bervariasi pada masing-masing sisinya, yaitu 6-10 pelampung yang berbentuk bola. Untuk pelampung yang berukuran paling besar ditempatkan dibagian tengah (bagian tengah bibir atas) dari mulut jaring. Pada kedua ujung depan kaki/sayap disambungkan dengan tali panjang yang umumnya disebut dengan ”tali slambar” atau tali tarik.

Penangkapan dengan jaring payang dapat dilakukan baik pada malam maupun siang hari dan melihat musimnya. Apakah musim timur atau barat. Jika nelayan berangkat pada malam hari, pagi (07.00-10.00) atau siang hari nelayan pulang. Jika berangkat pada siang/sore hari keesokan harinya (sekitar pukul 06.00-08.00) nelayan pulang. Penangkapan pada malam hari (terutama tidak dalam keadaan terang bulan) nelayan menggunakan lampu listrik. Selain alat bantu lampu nelayan perahu payang juga menggunakan rumpon sebagai tempat menggumpulkan ikan. penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan tidak digunakan oleh seluruh nelayan perahu payang. Hanya beberapa nelayan payang yang mampu menggunakan rumpon. Penangkapan ikan dilakukan dengan melepaskan jaring oleh pandhega dimasing-masing sisi jaring. Jika penangkapan dilakukan pada malam hari, maka penggunaan lampu difungsikan. Seorang pandhega dibutuhkan untuk menempatkan perahu ditengah-tengah jaring. Jika ikan diras sudah mengumpul, maka jaring kemudian diangkat.

Jenis ikan yang ditangkap nelayan payang ini adalah ikan Tongkol, Bengol, Slengseng, Lemuru, Cumi-cumi dan lain sebagainya. Jadi nelayan payang ini menangkap berbagai jenis ikan yang pada saat itu ada. Hasil maksimal dari perahu payang ini adalah sekitar 1000 keranjang

kecil. Berat keranjang ini jika diisi dengan ikan bawah bisa mencapai 5 kg. Untuk daerah penangkapan nelayan payang ini sekitar pulau Nuso Barong, sampai ke perairan timur daerah pantai Watu Ulo kecamatan Ambulu. Informasi mengenai adanya keberadaan ikan didapat dari informasi oleh nelayan payang lain yang masih ada dilaut. Jika banyak nelayan payang yang mendapatkan ikan, maka nelayan payang yang lain akan berangkat.

Pembagian hasil melaut perahu payang di komunitas nelayan Puger pada umumnya bersifat bagi dua (50:50). Hasil penjualan dari tangkapan ikan dipotong dahulu untuk biaya operasional. Setelah dipotong biaya operasional (solar, dan biaya yang lain) kemudian dibagi 2 (50:50). 50% untuk juragan/pemilik perahu, sedangkan yang 50% untuk pandhega. 50% untuk pandhega ini dibagi masing-masing mendapat 1 *sara'an* (1 bagian). Jumlah total orang yang terlibat dalam operasinal perahu payang ini adalah sekitar 22 orang (1 orang "lecanan", dan 1 orang pembersih perahu). Jadi 1 orang juragan mendapat 50%, 21 orang pandhega masing-masing mendapat 1 bagian. Jika juragan ikut melaut, maka ia juga berhak mendapat 1 *sara'an* atau bagian. Selain penghasilan dari hasil penjualan tangkapan, nelayan juga mendapat hasil dari penjualan "borengan". "Borengan" bisa dikatakan sebagai bonus yang didapat nelayan dari penjualan ikan di luar penjualan hasil ikan tangkapan utama. Setiap kali pulang melaut, masing-masing pandhega akan mendapat bagian ikan yang di bawa pulang. Namun biasanya ikan itu secara bersama-sama dijual dan hasilnya dibagi sesuai dengan jumlah pandhega tersebut, ini yang disebut dengan "borengan".

#### **4.3.3 Pola dan Tehnologi Penangkapan Nelayan Skoci: menggunakan alat bantu penangkapan rumpon**

Perahu skoci baru berkembang di perairan pantai Puger sekitar tahun 2001-an. Nelayan perahu skoci pada awalnya berkembang hanya beberapa saja. Nelayan skoci berkembang seiring dengan perkembangan rumpon yang ada di Puger. Hal ini dikarenakan nelayan perahu skoci menangkap ikan disekitar rumpon milik mereka. Mereka mengakui bahwa dengan menggunakan rumpon hasil tangkapan semakin meningkat atau paling tidak mereka mendapatkan ikan setiap kali melaut. Artinya ada kepastian hasil tangkapan. Menurut nelayan ini mereka mendapatkan ikan paling tidak 5kg dalam sekali melaut<sup>14</sup>. Jarak penangkapan perahu skoci ini adalah minimal

<sup>14</sup> Untuk uang hasil penjualan yang diterima nelayan tergantung dari jenis ikan yang diperoleh. Misalnya jenis ikan Tuna harganya Rp 22.000/kg, Ikan Cakalang Rp 6000-8000/kg, ikan layar Rp 9000/kg.

30 mil dari bibir pantai Puger. Rumpon yang ditanam nelayan juga berada dalam jarak tersebut. Perahu skoci ini didesain untuk keperluan operasinal penangkapan ikan dengan jarak tempuh yang lebih jauh dari perahu yang lain. Dikomunitas nelayan Puger skoci banyak yang terbuat dari kayu. Bentuk perahu skoci ini tidak seperti jukung. Bentuknya lebih lebar dan datar serta ada tempat untuk berteduh. Perahunya didesain sedemikian rupa karena dalam operasi penangkapan ikan membutuhkan waktu sehari-hari. Secara spesifik panjang perahu maksimal sekitar 14-15m, dan minimalnya 10 m. Lebar perahu sekitar 3,5 m, sedangkan tingginya sekitar 2,5 m. Sedangkan untuk jumlah nelayan dalam perahu skoci ini ada sekitar 4-5 orang nelayan. Dari 4-5 orang tersebut 1 orang bertugas sebagai nahkoda. Sedangkan yang lainnya melakukan operasi penangkapan, seperti memancing atau menjaring. Jika dalam penangkapan ikan tidak diperlukan perahu bergerak maka nahkoda juga ikut dalam penangkapan ikan.

Berbagai peralatan dan perlengkapan dalam operasi penangkapan ikan di perahu skoci jenisnya lebih beragam bila dibandingkan dengan perahu yang lain. Peralatan tersebut antara lain

#### 1. Pancing

Selain jaring nelayan perahu skoci ini juga menggunakan pancing. Terdapat beberapa model penggunaan pancing ini yaitu "uncalan", "Prawean", "eretan", "rapala'an", "layang-layang" dan "ondel-ondel".

##### a. Pancing "uncalan"

Pancing "uncalan" ini merupakan jenis pancing yang dilempar satu persatu menggunakan tali senar. Panjang tali senar itu bisa sampai 3 rol, yang panjangnya sekitar 21 m. Setelah ikan memakan umpan maka kemudian ditarik dan dikait. Mata pancing yang digunakan biasanya bentuk mata kail balik. Umpan yang dipakai ini adalah umpan tiruan/palsu. Pada cara penangkapan ini nahkoda tidak ikut didalamnya karena posisi perahu berjalan/bergerak. Wilayah penangkapannya disekitar rumpon yang dilakukan ketika malam sampai pagi hari. Ikan yang ditangkap abon dan peleng. Jadi perahu tidak ditambatkan pada rumpon.

##### b. Pancing "Prawean"

Pancing "prawean" ini merupakan suatu pancing yang terdiri dari tali panjang (tali utama), kemudian pada tali tersebut secara berderet pada jarak tertentu

digantungkan tali-tali pendek (tali cabang) yang ujungnya diberi mata pancing. Jumlah tali cabang dan mata pancing ini sekitar 9-11 buah. Panjang pancing ini sekitar 3 rol atau 21m. Dalam operasi penangkapannya perahu ditambatkan pada rumpon, jadi perahu dalam kondisi tidak bergerak. Ikan yang ditangkap adalah cakalang, baby Tuna dan Tuna (20-100 kg).

c. Pancing "Eretan"

Pancing "eretan" ini bentuknya seperti pancing "Prawean", namun yang membedakan adalah dalam cara penangkapannya. Cara penangkapan pancing ini dengan mengerakkan perahu. Jadi pancing di lepaskan dan perahu bergerak.

d. Pancing "Rapala'an"

Pancing "rapala'an" merupakan pancing yang umpannya berupa ikan buatan. Ukuran ikan buatan ini bervariasi tergantung dari jenis ikan yang dipancing. Panjang senarnya (oloran) sekitar 30m. Pancing ini membutuhkan 1 "pesuruh" (7 meter) dan "kerean" membutuhkan 1,5 bendel/gulungan (150m). Jadi susunan pancing ini adalah kerean-oloran-pesuruh-mata pancing (rapala'an). Umpan atau "rapala'an" ini terbuat dari kayu dan diwarnai dengan cat menyerupai ikan. Dibagian atas rapala'an (dekat kepala) diberi lubang menembus sampai kebawah. Dilubang tersebut diselipkan mata pancing yang besarnya disesuaikan dengan rapala. "Rapala'an" yang kecil untuk menangkap ikan Tuna kecil, sedangkan umpan rapala yang besar untuk menangkap ikan Tuna besar yang beratnya 90 kg sampai 1 kwintal. Biasanya nelayan dalam sekali trip mendapat sampai 12 ekor atau lebih ikan Tuna.

e. Pancing "Layang-layang"

Pancing jenis ini menggunakan layang-layang dalam operasi penangkapannya. Besar layang-layang ini sekitar 1 m. Sedangkan jarak layang-layang dengan permukaan laut sekitar 3m. Antara layang-layang dengan perahu/nelayan ada benang (kerean) senar, panjangnya sekitar 100m. Kerekan ini yang menghubungkan nelayan-layang-layang-umpan rapala. Jika umpan rapala atau umpan asli dimakan maka layang akan turun dan terkena air/masuk keair. Jadi saat menangkap ikan hanya satu

layang-layang yang dinaikkan, dan jika layang-layang tersebut sudah rusak maka nelayan akan menaikkan layang-layang beserta umpan rapalanya. Nelayan hanya menaikkan satu layang-layang karena menurut arah mata angin. Jika ada dua layang-layang dikhawatirkan dapat berbenturan. Layang-layang ini tidak ada ekornya. Nelayan skoci biasanya menyediakan 150 buah layang-layang dalam penangkapannya. Ikan yang ditangkap biasanya adalah ikan Tuna, namun tidak menutup kemungkinan ikan yang lain, tergantung dari situasi ikan yang ada.

f. Pancing "Ondel-ondel"

Pancing "ondel-ondel" hampir sama dengan pancing "rapala", yang membedakan adalah jumlah pancing dan umpan rapala yang digunakan untuk memancing ikan. selain itu yang membedakan lainnya adalah jarak permukaan air laut dengan layang-layang ini sekitar 100m. Jadi layang-layang dinaikkan hingga 100m diudara. Hal ini untuk mencegah agar layang-layang tidak mudah turun. Layang-layang yang digunakan dalam sekali penangkapan hanya satu layang-layang saja. Layang-layang ini terbuat dari plastik dan memiliki ekor. Ekor ini berguna untuk menstabilkan layang-layang. Layang-layang ini biasanya tidak membuat sendiri, nelayan membeli layang-layang dengan harga sekitar 5000-10.00. Jadi satu layang-layang untuk satu beberapa kali pemancingan. Jadi ketika mata pancing dimakan ikan, hanya ikannya yang diambil sedangkan layang-layangnya tidak (layang-layang tetap diangkasa). Kecuali jika layang-layang rusak maka akan diganti. Nelayan skoci biasanya membawa cadangan layang-layang sebanyak 10 buah. Layang-layang akan lebih banyak rusak jika umpan dimakan oleh ikan Gento. Dalam satu layang-layang ada 5 mata pancing dan rapala. Jika dari 5 umpan yang dimakan hanya 2/3 ikan maka rangkaian pancing akan diangkat, ikan diambil dan kemudian rangkaian pancing dilepaskan kembali. Jadi ada beberapa kali penangkapan.

2. Jaring

Jaring perahu skoci merupakan jenis jaring yang memanjang atau empat persegi panjang. Jaring terbuat dari nilon, dimana panjang jaring 100-200m, lebarnya 30-50 m, dengan mata jaring 4-5 inci. Setiap ruang jaring memiliki mata jaring yang berbeda.

Dalam penangkapan menggunakan perahu berukuran lebih kurang 120 PK. Setelah sampai ditempat tujuan jaring ini dilepas, kemudian perahu dengan menggunakan lampu melewatkannya di atas jaring tersebut. Dengan demikian ikan yang akan terjaring itu sebelumnya mengikuti perahu sampai melewati perahu sampai akhirnya terjaring. Ikan yang ditangkap ini adalah Cakalang (1-6 kg) dan baby Tuna (3-10 kg), namun dalam keyataannya tidak hanya Cakalang yang ditangkap, namun ikan-ikan yang lain juga.

### 3. Lampu

Lampu dalam perahu skoci nelayan Puger biasanya ada 7 buah lampu. 4-5 buah lampu berada disebelah bagian atas perahu, dan 2 lampu di sebelah kiri dan kanan perahu. Letak lampu secara keseluruhan berada di tengah dan disamping dan kanan perahu. Masing-masing lampu memiliki kekuatan 400watt. Warna lampu ini ada yang berwarna kuning dan putih. Lampu kuning ini lampu yang bisa menembus air dan letaknya dibelakang. Sedangkan lampu putih bila air dalam kondisi jernih.

Lampu sebagai alat bantu penangkapan sudah sejak lama digunakan oleh nelayan di perairan puger. Lampu ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan segerombolan ikan ketika nelayan melakukan penangkapan dengan berbagai alat tangkap seperti jaring, pancing, ataupun payang. Terdapat berbagai jenis lampu yang digunakan nelayan Puger. Jenis lampu tersebut antara lain lampu petromaks dan yang sekarang ini banyak digunakan nelayan adalah lampu listrik dengan tenaga pembangkit diesel. Lampu listrik ini terdiri dari berbagai macam warna yang digunakan sesuai kondisi perairan ketika sedang menangkap ikan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan lampu ini, faktor-faktor tersebut antara lain:

#### 1. Faktor kecerahan

Kecerahan air laut ini penting untuk diketahui untuk menentukan kekuatan atau banyak sedikitnya lampu yang digunakan. Jika kecerahan kecil hal ini berarti banyak partikel-partikel yang menyebar didalam air. Dengan demikian pembiasan cahaya yang masuk akan habis terserap oleh partikel-partikel tersebut sehingga tidak menarik perhatian ikan. Nelayan Puger menyebutnya dengan "air buthek". Dalam kondisi demikian nelayan yang memiliki spesifikasi lampu untuk kondisi

air tertentu menyalakan lampu berwarna putih. Sedangkan untuk kondisi laut yang kecerahannya banyak "air bening" nelayan menggunakan lampu merah, kuning, dan putih. Untuk nelayan dengan perahu kecil biasanya menggunakan lampu petromaks dan terkadang lampu diesel namun jumlahnya tidak sebanyak nelayan perahu besar.

## 2. Faktor arus, gelombang dan angin

Arus kuat, gelombang dan angin yang besar dapat mempengaruhi kedudukan lampu. Sinar lampu yang terang dapat berubah-ubah dan akhirnya menakuti ikan akibat arus, gelombang dan angin yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan lampu dengan bentuk dan konstruksi yang disesuaikan dengan kondisi tersebut.

## 3. Faktor sinar bulan

Ketika bulan purnama sangat sulit untuk dilakukan penangkapan ikan dengan lampu. Hal ini dikarenakan cahaya terbagi rata. Sedangkan untuk penangkapan yang maksimal diperlukan keadaan yang gelap agar sinar lampu dapat terbias dengan maksimal.

## 4. Mesin

Mesin yang ada di perahu skoci ada 2-3 buah mesin. Mesin-mesin itu digunakan untuk menghidupkan mesin penggerak perahu dan lampu untuk membantu penangkapan ikan. Mesin ini berkapasitar 120 PS, mesin tersebut biasanya bermerek Yanmar, dan Kama. Bahan bakar untuk mesin disel ini adalah solar. Dalam sekali trip paling tidak membutuhkan sebanyak 70 liter solar, dimana harga 1 liter Rp 5000, jadi untuk bahan bakar ini uang yang dibutuhkan 350.000

## 5. Alat Navigasi (GPS)

GPS atau dikenal dengan Global Positioning System. GPS ini digunakan untuk menunjukkan arah dimana nelayan meletakkan rumponnya. Selain itu juga untuk menunjukkan arah untuk pulang ke pantai Puger. Selain GPS ada sebagian nelayan yang dilengkapi dengan alat pendeteksi adanya segerombolan ikan. Alat ini sangat membantu

nelayan dalam menangkap ikan yang akhirnya dapat meningkatkan jumlah tangkapan ikan.

#### 6. Box ikan

Box sebagai tempat penyimpanan es dan ikan. Box ini ada 3 buah, 2 buah untuk hasil tangkapan (ini sekitar 2 ton ikan), sedangkan 1 buah untuk penyimpanan es. Ukuran box es ini sekitar 2x3m, dengan tinggi 2m. Kapasitas box ini bisa mencapai 1 ton untuk satu box. Jumlah batang es yang dibutuhkan untuk perahu skoci lebih kurang 40-50 balok es. Balok es ini bisa bertahan sampai 5 hari. Harga satuan dari balok es ini Rp 7500. Jadi uang yang dihabiskan untuk membeli es balik ini sekitar Rp 375.000.

#### 7. Jangkar

Jangkar merupakan alat yang wajib dibawa oleh nelayan. Jangkar ini digunakan ketika nelayan beristirahat atau ketika menangkap ikan dengan menambatkan perahu di rumpon. Rumpon merupakan alat bantu penangkapan ikan yang berfungsi sebagai pengumpul ikan atau sebagai daerah berkumpulnya ikan.

Keputusan untuk pergi melaut biasanya melihat skoci atau perahu payang yang datang di pelabuhan. Satu rumpon ini dimiliki oleh beberapa nelayan, baik itu nelayan skoci atau payang. Jika salah satu kelompok datang maka perahu skoci atau payang yang lain akan berangkat jadi ada semacam *shif* untuk satu rumpon kelompok (1 rumpon biasanya terdiri dari 5 skoci, 5 payang atau campuran keduanya). Perahu payang biasanya berangkat pada siang hari, sedangkan perahu skoci biasanya berangkat pada malam hari. Biaya pembuatan rumpon itu dari iuran masing-masing perahu. Besarnya iuran tergantung dari harga rumpon. Harga rumpon minimal Rp 75 juta sampai ratusan juta rupiah. Sedangkan masa bertahannya bervariasi tergantung dari kualitas, kuatnya gelombang dan arus air laut. Namun rata-rata rumpon di Puger paling lama bertahan 1 tahun.

Ketika nelayan mau berangkat melaut, juragan mempersiapkan segala sesuatunya. baik itu membeli BBM, perbekalan makanan, buah-buahan, obat-obatan, peralatan tangkap (pancing, jaring) serta balok es. Semua persiapan itu membutuhkan uang sekitar 3 juta baru bisa berangkat. Biaya persiapan berangkat melaut nelayan skoci

lebih mahal bila dibandingkan dengan nelayan yang lain. Hal ini dikarenakan perahu skoci harus sehari-hari berada dilaut. Jika dalam waktu 3-4 hari tidak mendapat ikan, mereka biasanya pergi ketempat yang lain sampai mendapat hasil tangkapan. Karena jika mereka tidak membawa hasil tangkapan, juragan akan mengalami kerugian. Waktu keberangkatan para pandhega diberitahukan lewat seorang "lecanan". Setelah semua peralatan lengkap dan perbekalan siap maka nelayan siap untuk berangkat melaut. Waktu berangkatnya siang dan malam, dan melihat keadaan cuaca pada hari itu. Ketika bulan purnama, nelayan bisanya menangkap ikan pada siang hari sedangkan pada malam hari mereka tidak melaut.

Untuk sistem bagi hasilnya memakai sistem yang disebut "maron" (50:50). 50% untuk juragan atau pemilik perahu dan 50% untuk pandhega. Namun sebelumnya dipotong biaya operasional. Selain mendapat hasil bagian yang seharusnya diterima, nelayan juga mendapat bagian dari "borengan". "Borengan" merupakan bonus dari hasil tangkapan. Ikan yang dibagikan gratis kepada nelayan kemudian dikumpulkan dan dijual, kemudian uang hasil penjualan dibagi sesuai dengan jumlah nelayan tersebut.

Ikan Tuna dan Cakalang merupakan target utama dari nelayan perahu skoci. Jika dalam 4 kali berangkat dan mendapat ikan, modal urunan pembuatan rumpon sudah bisa kembali. Ketika musim baratpun, nelayan skoci atau payang yang menggunakan rumpon pasti mendapatkan ikan meski tidak sebesar biasanya. Jadi bisa dikatakan ada kepastian perolehan hasil tangkapan. Misalnya saja, nelayan bisa mendapatkan minimal 4 kw ikan cakalang dalam operasi penangkapannya. Ikan Tuna yang besarnya mencapai 1ton, terkadang mendapat 10 ikan bahkan bisa lebih dari 10 ekor.

Nelayan perahu skoci menangkap ikan yang berada di sekitar rumpon. Fungsi rumpon sebagai alat bantu dalam penangkapan ikan adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tempat mengkonsentrasi ikan agar lebih mudah ditemukan gerombolan ikan dan menangkapnya.
2. Sebagai tempat berlindung bagi ikan dan pemangsanya.
3. Sebagai tempat berkumpulnya ikan
4. Sebagai tempat daerah penangkapan ikan
5. Sebagai tempat memberi makan bagi ikan, berlindung jenis ikan tertentu dari serangan ikan predator

6. Bagi ikan-ikan kecil dan plankton yang berkumpul disekitar rumpon dimana ikan dan plankton tersebut merupakan sumber makanan bagi ikan besar.
7. Ada beberapa jenis ikan seperti tuna dan cakalang yang menjadi rumpon sebagai tempat untuk bermain sehingga nelayan dapat dengan mudah untuk menangkapnya.

Penggunaan rumpon ini terdapat beberapa manfaat seperti

1. Memudahkan nelayan untuk menangkap ikan, sehingga menghemat waktu tangkap dan menghemat bahan bakar.
2. Mencegah kerusakan ekosistem bawah laut, seperti akibat dari penggunaan bahan peledak dan bahan kimia untuk mendapatkan ikan.
3. Karena rumpon tidak mengenal musim maka dapat meningkatkan produksi dan produktifitas nelayan. Karena keberaaan rumpon memungkinkan nelayan untuk mendapatkan hasil tangkapan yang baik secara konsisten.

Rumpon yang berkembang diwilayah pesisir pantai Puger merupakan jenis rumpon laut dalam. Rumpon laut dalam adalah rumpon yang dipasang diperairan dalam laut untuk mengumpulkan jenis-jenis ikan pelagis besar, seperti Tuna, dan Cakalang. Rumpon yang dipasang oleh nelayan Puger merupakan jenis rumpon modern. Rumpon ini dipasang hingga kedalaman 1000-2000m. Bahan rumpon dari baja, alumunium dan *fibreglass*. Rumpon tersebut dibentuk menyerupai tabung dengan kerucut di salah satu sisinya. Jadi seperti bentuk tong yang besar. Panjangnya 4-4,5 meter, diameter tabung 87 cm. Rumpon tersebut dilapisi dengan "plaster" setebal 3-5 mili. Di bagian rumpon tersebut, ada tempat untuk mengaitkan perahu yang dipasang dibagian samping rumpon.

Selain itu juga ada tempat untuk mengaitkan tali untuk pemberat (*andem*) yang diletakkan didasar laut. Pengait yang lain untuk meletakkan rumbai-rumbai (berupa bambu, ranting, dan bahan-bahan lain yang sejenis). Dibagain bawah rumbai-rumbai ini terdapat pemberat yang berbentuk batu yang tidak sampai kedaras laut. Rumbai-rumbai ini berfungsi sebagai tempat beteduh dan berkumpul ikan. Dipermukaan rumpon ini terdapat bendera dan tanda pengenal berupa tulisan yang di cat di rumpon tersebut. Nama pengenal itu bermacam-macam tergantung dari selera pemilik rumpon. Panjang tali pemberat (*andem*) ini 2000-3000m, dengan pemberat

berupa cor-coran semen yang ditempatkan dalam tong. Panjang tali harus lebih panjang ukurannya dengan kedalaman dinamanya ditanam. Hal ini berfungsi untuk menyeimbangkan rumpon jika ada angin dan arus yang kuat. Tali tersebut bisa dipasang rangkap atau tunggal. Sedangkan untuk pemberat ini jumlahnya ada 4 buah, masing-masing tali ada 2 pemberat (andem) dan 1 jangkar yang panjangnya lebih kurang 2,5-3 meter yang terbuat dari baja. Diantara tali pemberat dengan rumpon (pelampung yang berbentuk silinder) terdapat "cengkirian" atau "kili-kili" (*swivel*). "cengkirian" atau "kili-kili" ini berfungsi untuk menghindari kemungkinan tali berbelit-belit karena perubahan arus dan angin. Umur rumpon bisa bertahan di perairan Puger maksimal 1-2 tahun, ini berlaku untuk rumpon yang memiliki kualitas yang bagus. Jika ada angin dan arus yang kuat dan kondisi rumpon yang kurang berkualitas umur rumpon bisa cuma hitungan hari. Harga pembuatan rumpon jenis ini minimal membutuhkan biaya sebesar 75 juta rupiah. Dengan alat bantu rumpon ini penangkapan dapat dilakukan dengan berbagai alat tangkap seperti payang, pancing dan jaring.

Dari uraian diatas mengenai pola penangkapan ikan pada komunitas nelayan Puger tersebut, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Kelompok tersebut adalah kelompok nelayan yang menggunakan rumpon dan kelompok nelayan yang tidak menggunakan alat bantu rumpon. Kelompok nelayan yang menggunakan rumpon adalah nelayan skoci dan sebagian nelayan perahu payang. Sedangkan nelayan yang tidak menggunakan rumpon adalah nelayan jukung dan sebagian nelayan payang. Masing-masing nelayan yang memakai armada yang berbeda tersebut memiliki pola penangkapan yang berbeda atau ada juga yang hampir sama dalam pola penangkapannya. Semua kelompok nelayan ini tersebar di wilayah pesisir di desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Tempat tinggal semua nelayan tersebut saling bertetangga atau berkatan satu dengan yang lain.

#### **4.4. Perkembangan Rumpon dan Program Rumponisasi**

Berkembangnya rumpon di Indonesia sudah tumbuh dan berkembang sangat lama. Rumpon yang telah lama berkembang di Indonesia adalah rumpon di daerah Sulawesi Selatan. Rumpon tersebut disebut dengan rumpon Mandar. Rumpon ini merupakan bentuk rumpon tradisional. Rumpon tersebut masih berupa rumpon yang terbuat dari rakit dan menggunakan perahu tradisional berlayar. Umur rumpon pun hanya berkisar 3-4 bulan. Rumpon yang

kemudian berkembang adalah rumpon yang pelampungnya menggunakan gabus. Secara terperinci rumpon tersebut terdiri dari pelampung (bambu atau gabus) alat pemikat (berupa daun atau ranting yang dipasang di bawah pelampung) dan juga pemberat (batu). Rumpon ini seperti rakit, dalam bahasa Mandar disebut dengan *ropo* dan dalam bahasa Bugis-Makasar disebut dengan *rumpong*. Rumpon yang dipasang nelayan Mandar merupakan rumpon laut dangkal dan laut dalam. Lokasi rumpon nelayan Mandar ini tersebar di diwilayah teluk Mandar, selat Makasar, Laut Flores, teluk Bone dan Laut Banda. Sebagiaian besar nelayan Mandar menggunakan rumpon ini dalam usaha penangkapannya. Bahkan sampai saat ini penggunaan rumpon sampai ke beberapa wilayah pantai di Sulawesi. Berawal dari rumpon Mandar ini rumpon di perairan di Indonesia mulai berkembang. Menurut Schlais (Alimuddin, 2008) menyatakan bahwa dalam sebuah publikasi PBB, FAO, menyebut bahwa teknologi rumpon diduga pertama kali dikembangkan oleh nelayan Mandar.

Seiring dengan berjalannya waktu rumpon kemudian berkembang diseluruh wilayah di Indonesia. Penggunaan rumpon telah berkembang dengan pesat terutama rumpon laut dangkal diperairan selat Malaka dan laut Jawa. Sedangkan untuk rumpon laut dalam secara umum berkembang diseluruh perairan nusantara, dari bagian timur sampai barat, seperti Sorong, perairan maluku Utara, laut Sulawesi, Sulawesi Tenggara, Sulawesi selatan, Nusa Tenggara Timur, sampai wilayah samudera Hindia (pesisir laut selatan pulau jawa dan Sumatera). Peranan nelayan-nelayan yang berani melaut sampai jauh keluar daerah memberikan kontribusi terhadap penyebaran rumpon ditinjau air. Terutama nelayan Mandar dikenal sebagai nelayan yang berani dan ulet oleh karena itu mereka berekspansi sampai keluar dari daerahnya, seperti di wilayah perairan Puger. Dengan adanya ini maka berkembanglah rumpon seperti rumpon yang sekarang ini. Penggunaan rumpon ternyata terbukti dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Dengan adanya bukti tersebut akhirnya banyak nelayan lain yang mengikuti metode penangkapan ikan dengan menggunakan bantuan rumpon. Selain meningkatkan jumlah produksi ikan, rumpon juga dapat menurunkan biaya operasi penangkapan ikan. Melihat berbagai manfaat itu maka banyak nelayan yang menggunakan rumpon sebagai alat bantu tangkapannya.

Melihat perkembangan rumpon yang sangat pesat, maka pemerintah merespon hal tersebut dengan dibuatnya peraturan tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon untuk nelayan oleh menteri pertanian. Peraturan itu merupakan keputusan menteri pertanian

nomor:51/kpts/IK.250/1/97 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Adapun poin-poin pertimbangan yang tertuang dalam keputusan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa penggunaan rumpon, dapat meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya operasi penangkapan ikan sehingga pemasangan dan pemanfaatannya berkembang dengan pesat.
- b. Bahwa pemasangan dan pemanfaatan rumpon yang meningkat secara pesat sebagaimana butir a apabila tidak diatur dan dikendalikan, dapat merusak pola ruaya ikan dan kelestarian sumber daya ikan serta dapat menimbulkan ketegangan sosial diantara sesama nelayan.
- c. Bahwa untuk mencegah timbulnya kerusakan pola ruaya ikan, sumber daya ikan dan ketegangan sosial diantara sesama nelayan, perlu ditetapkan ketentuan pemasangan dan pemanfaatan rumpon dengan keputusan ini.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut pemerintah akhirnya mengeluarkan keputusan mengenai pemasangan dan pemanfaatan rumpon bagi masyarakat Indonesia. Didalam keputusan itu juga diatur bagaimana pemasangan dan pemanfaatannya. Mengenai pemasangan rumpon perairan dalam, pemasangannya hanya dapat dilakukan oleh :

1. Perusahaan perikanan
2. Instansi Pemerintah, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi, dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Didalam peraturan tersebut izin pemasangan dan pemanfaatan untuk nelayan perorangan/ nelayan kecil tidak diperbolehkan. Akan tetapi nelayan kecil diperbolehkan menangkap ikan disekitar rumpon perairan dalam yang dipasang oleh perusahaan perikanan. Dalam peraturan tersebut pemberian kesempatan nelayan kecil untuk menangkap ikan disekitar rumpon adalah wajib. Jadi dalam hal ini hanya perusahaan yang harus meminta izin jika ingin memasang rumpon di perairan zona ekonomi eksklusif.

Seiring dengan peraturan yang telah dibuat tersebut, perkembangan pemasangan dan pemanfaatan rumpon oleh semua pihak baik nelayan maupun perusahaan semakin meningkat. Pemerintah juga mulai giat untuk mengalakkan penggunaan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ikan. Mengingat potensi perikanan Indonesia yang dirasa masih optimal. Pemerintah mulai memberikan bantuan rumpon disejumlah wilayah di Indonesia. Sebagai contoh daerah yang diberikan bantuan pengembangan rumpon tersebut antara lain: nelayan di kabupaten

Pesisir Selatan (Pessel), Padang, Sumatra Barat. Sejak tahun 2000 rumpon berjenis tradisional dipasang sebanyak 250 unit senilai Rp 575 juta untuk meningkatkan hasil tangkapan nelayan (Bisnis Indonesia Nasional, 2010). Di Sendang Biru, Malang pemasangan rumpon juga sedang digalakkan serta di daerah kepulauan Riau, serta kepulauan Bangka Belitung.

Selain didaerah tersebut, nelayan yang berada di perairan teluk Pelabuhan Ratu, Banten, juga diperkenalkan pemasangan dan pemanfaatan rumpon (Muslim, 2009). Rumpon di nelayan perairan teluk Pelabuhan Ratu mulai diperkenalkan sekitar tahun 2002. Pada saat itu di perairan teluk Pelabuhan Ratu dipasang 5 unit rumpon yang pengelolaan dan pemanfaatannya diserahkan kepada kelompok nelayan pancing. Namun karena pemasangannya dianggap telah mengganggu jalur penangkapan ikan nelayan jaring, terutama nelayan payang dan gillnet maka keberadaannya hanya bertahan sampai 6 bulan. Menurut pengakuan nelayan jaring kepada pihak Dinas Kelautan dan Perikanan keberadaan rumpon tersebut telah menyebabkan jaring mengalami kerusakan akibat tersangkut pada rumpon. Untuk mengatasi hal tersebut nelayan jaring memotong rumpon yang berada di sekitar perairan Teluk Pelabuhan Ratu.

Pada tahun 2005 Yayasan Anak nelayan Indonesia (YANI) kembali memasang rumpon 2 unit di perairan teluk Pelabuhan Ratu, namun letaknya diluar teluk. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tersangkutnya alat tangkap nelayan perahu jaring serta untuk memaksimalkan hasil tangkapan yang berada di Samudera Hindia. Namun demikian ternyata keberadaan rumpon tersebut diprotes oleh kelompok nelayan jaring karena dianggap telah turut memperburuk hasil tangkapan nelayan jaring. Menurut aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Sukabumi konflik ini disebabkan karena adanya salah pemahaman dari kelompok nelayan jaring, khususnya nelayan payang yang beranggapan bahwa penurunan produksi penangkapan perahu payang akibat dari keberadaan rumpon di luar teluk. Sehingga ikan-ikan yang seharusnya berupaya ke dalam teluk tertahan di rumpon yang ada di luar tersebut. Pada tahun 2006 Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten Sukabumi kembali memasang rumpon di dalam teluk sebanyak 4 unit untuk memperpendek jarak jangkauan dan upaya agar dapat dimanfaatkan oleh perahu kecil. Sedangkan diluar teluk dipasang sebanyak 6 unit rumpon dari anggaran APBNP. Kesepuluh rumpon tersebut dikelola oleh kelompok nelayan pancing, payang dan beleketek. Kesepuluh kelompok tersebut membentuk sebuah forum pengelola rumpon yang diberinama Perkumpulan Nelayan Bahtera. Namun demikian pemasangan rumpon tersebut tetap menuai konflik antar nelayan.

Permasalahan rumpon tidak hanya di perairan Pelabuhan Ratu saja, namun didaerah-daerah yang disebutkan diatas. Dari berbagai permasalahan yang ditimbulkan atas keberadaan rumpon di beberapa wilayah di Indonesia, pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 30 tahun 2004. Peraturan itu memperbaharui peraturan menteri Pertanian nomer: 51/Kpts/IK.250/1/97 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut didasarkan pada:

- a. semakin meningkat dan berkembangnya pemasangan dan pemanfaatan rumpon,
- b. menghindari kerusakan pola ruaya ikan serta melindungi kelestarian sumberdaya ikan.

Sedangkan isi mengenai keputusan tersebut antara lain:

a. Wilayah Pemasangan Rumpon (Bab II, pasal 2)

1. Untuk meningkatkan produksi perikanan dan pendapatan masyarakat, perorangan atau perusahaan perikanan dapat memasang dan/ atau memanfaatkan rumpon.
2. Rumpon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipasang di wilayah :
  - a. Perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
  - b. Perairan diatas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, diukur dari garis pantai pada titik surut terendah;
  - c. Perairan diatas 12 mil laut dan ZEE Indonesia

b. Perizinan Pemasangan Rumpon (Bab III, pasal 3)

1. Perorangan atau perusahaan berbadan hukum yang akan memasang rumpon wajib terlebih dahulu memperoleh izin.
2. Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh :
  - a. Bupati/Walikota atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang perikanan, untuk pemasangan rumpon di wilayah perairan 2 mil laut sampai dengan 4 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a;
  - b. Gubernur atau pejabat yang bertanggung jawab dibidang perikanan, untuk pemasangan rumpon diwilayah perairan diatas 4 mil laut sampai dengan 12 mil laut, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b;

- c. Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk, untuk pemasangan rumpon di wilayah perairan diatas 12 mil laut dan ZEE Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c;

Selain itu dalam permohonan izin harus dilakukan pemilaian baik terhadap administrasi pemohon maupun lokasi perairan. Penilaian lokasi pemasangan rumpon harus memperhatikan:

- a. Apakah daerah tersebut bukan merupakan alur pelayaran atau kepentingan lainnya seeperti daerah suaka, atau daerah lainnya. Pemasangan rumpon tidak boleh dilakukan pada daerah perairan tersebut.
- b. Apakah daerah tersebut bukan merupakan konsentrasi penangkapan ikan nelayan-nelayan yang tidak menggunakan rumpon, rumpon tidak boleh dipasang pada perairan tersebut.
- c. Apakah daerah tersebut berbatasan dengan provensi lain, untuk itu maka Dinas Perikanan dan Kelautan dari domisili pemohon ijin rumpon ditujukan kepada provinsi tersebut.

Dengan diterbitkannya keputusan tersebut diharapkan berbagai masalah terhadap pemasangan dan pemanfaatan rumpon dapat terselesaikan dengan baik. Seiring dengan diterbitkannya peraturan itu maka gerakan rumponisasi terus dilakukan diberbagai wilayah di Indonesia, termasuk juga di wilayah perairan selatan Jawa Timur. Diperairan pesisir Jawa Timur rumponisasi tidak hanya dilakukan di wilayah Sendang Biru, Malang, namun juga dilakukan di Ambulu, dan Puger. Terkait dengan rumponisasi tersebut, maka selanjutnya akan di uraikan tentang bagaimana rumponisasi ini berkembang di perairan pesisir Puger, kabupaten Jember.

Perairan peisir pantai Puger merupakan wilayah pesisir yang dihuni oleh suatu komunitas nelayan dengan berbagai latar belakang yang beragam. Puger merupakan satu-satunya wilayah pesisir yang memilik potensi yang besar dibidang perikanan di kabupaten Jember. Wilayah pesisir Puger memiliki jumlah nelayan yang paling banyak dibanding dengan daerah-daerah lain pesisir selatan kabupaten Jember. Jumlah perahu nelayan di pesisir Puger kurang lebih 2.365 unit, dengan berbagai macam alat tangkap seperti Jaring payang, jaring hanyut, pancing "tethel", pancing "methe'an", pancing layang-layang, serta pancing ondel-ondel. Seiring dengan moderniasi, semua nelayan Puger sudah menggunakan mesin dalam operasi penangkapannya. Ketersediaan berbagai macam jenis ikan menjadi hal penting untuk menambah pendapatan mereka. Apalagi didukung dengan adanya pabrik pembuatan es yang bertujuan untuk memasok

kebutuhan balok es nelayan Puger yang digunakan untuk menyimpan ikan. Dengan potensi yang dimiliki tersebut, diharapkan dapat menaikkan kualitas dan kuantitas hidup masyarakat di komunitas nelayan Puger. Salah satu upaya untuk menaikkan pendapatan/ penghasilan mereka adalah dengan pengenalan dan penggunaan teknologi baru dalam bidang penangkapan ikan.

Pengenalan tentang rumpon pada masyarakat nelayan Puger dimulai ketika para nelayan mengetahui ada rumpon yang dipasang di perairan pantai Puger. Nelayan Puger mulai mengetahui rumpon itu dari rumpon milik nelayan Bugis. Rumpon nelayan Bugis itu letaknya sekitar berada 60 mil dari pantai pesisir Puger<sup>15</sup>. Keberadaan rumpon itu diketahui sekitar sebelum tahun 2000-an. Suatu ketika nelayan menemukan sebuah pelampung<sup>16</sup> dilaut ketika mereka sedang melaut. Kemudian mereka membawa pelampung tersebut di pelabuhan. Setelah sampai di pelabuhan, mereka menghubungi pos polairud Puger. Nelayan menduga bahwa apa yang mereka bawa adalah bom. Akhirnya pos Pol Airud beserta nelayan. Karena penasaran atas apa yang mereka temukan itu, mereka kemudian bersama-sama membuka pelampung itu. Setelah mereka membukanya didalamnya terdapat gabus. Mereka kemudian menyadari bahwa itu bukanlah bom seperti yang mereka kira. Dari situlah nelayan di Puger mengenal adanya rumpon yang terbuat dari bahan tong.

Seiring dengan berjalannya waktu nelayan mengetahui informasi dari nelayan di Sendang Biru, Malang tentang keberadaan rumpon. Diperkirakan nelayan di Sendang Biru ada juga yang menggunakan rumpon ketika itu namun jumlahnya hanya sedikit. Mulanya hanya beberapa nelayan Puger yang menggunakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Nelayan yang memanfaatkan rumpon tersebut adalah dari kelompok nelayan Payang. Mereka membuat rumpon tersebut di Sendang Biru, Malang. Kemudian dibawa ke perairan pesisir Puger. Sebagian besar dari mereka yang menggunakan itu berasal dari suku Bugis. Mereka yang menggunakan rumpon ini secara significant memperoleh hasil tangkapan yang pasti, sehingga meningkatkan pendapatan mereka. Karena manfaat tersebut maka banyak nelayan lain yang mengikuti untuk menggunakan rumpon.

Dilain pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Jember mulai mengalakkan rumpon di komunitas nelayan Puger. Dinas perikanan dan peternakan Jember melihat bahwa potensi

---

<sup>15</sup> Menurut informasi nelayan Puger, saat ini diperairan peisir Puger (Samudra Hindia) jauh ke arah selatan juga terdapat rumpon-rumpon milik nelayan luar Puger dan juga diperkirakan ada juga yang milik perusahaan atau milik asing.

<sup>16</sup> Salah satu bagian rumpon yang digunakan nelayan Puger saat ini. Bentuknya seperti roket, yang terbuat dari besi (seperti tong).

perikanan di perairan pesisir Puger belum tergali secara optimal. Dengan adanya rumpon diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan nelayan. Selain itu penggunaan rumpon ini menghemat bahan bakar karena tujuan penangkapan sudah ditentukan. Sehingga nelayan ketika berangkat cukup mengatur arah derajat lintang dan bujur dimana rumpon mereka ditempatkan. Nelayan tidak perlu mencari daerah tangkapan ikan dimana ikan berkumpul. Dengan demikian akan menghemat bahan bakar yang mereka gunakan. Selain itu faktor cuaca dan gelombang merupakan kendala utama bagi nelayan untuk mendapat kepastian hasil tangkapan. Dengan adanya rumpon paling tidak memberikan pemasukan secara kontinyu.

Program rumpon percontohan tersebut dilaksanakan sekitar tahun 2001/2002. Ada 3 rumpon percontohan yang diberikan oleh dinas kepada kelompok nelayan. Rumpon bantuan diberikan secara bertahap kepada nelayan. Rumpon tersebut berasal dari bantuan pengadaan dinas perikanan propinsi Jawa Timur. Rumpon tersebut oleh nelayan di Sendang Biru, Malang, baru kemudian dibawa oleh kelompok nelayan tersebut ke perairan Puger. Rumpon itu dimanfaatkan oleh kelompok yang telah membuat dan memasang rumpon tersebut. Kelompok tersebut terutama kelompok nelayan pancing. Rumpon yang dipasang merupakan jenis rumpon laut dalam. Namun umur rumpon itu tidak berlangsung lama, hanya bertahan dalam beberapa bulan saja (1-2 bulan). Sehingga kelompok nelayan yang menggunakan itu kembali menggunakan alat tangkapnya yang lama. Menurut Dinas perikanan dan peternakan, dengan adanya pengenalan rumpon tersebut setidaknya nelayan sudah mengetahui manfaat dan cara pemasangannya. Dari adanya pengenalan rumpon ini semakin banyak nelayan yang mengetahui bagaimana rumpon itu.

Pada tahun 2004, Dinas Perikanan dan Peternakan kembali memberi bantuan rumpon dan juga perahu skoci kepada nelayan Puger. Bantuan yang tersebut berasal dari dana pemerintah kabupaten Jember. Bantuan rumpon dan perahu skoci tersebut jumlahnya masing-masing 10 buah. Rumpon tersebut dipasang di perairan laut dalam. Bantuan rumpon itu diberikan kepada kelompok-kelompok nelayan. Kelompok-kelompok nelayan ini dibentuk oleh nelayan sendiri atas arahan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Dalam rangka penggunaan itu dinas memberikan arahan bagaimana penggunaan dan pengelolaan rumpon tersebut kepada nelayan. Kelompok nelayan<sup>17</sup> yang terlibat saat itu adalah kelompok dari perahu payang, skoci dan

---

<sup>17</sup> Untuk penggunaan rumpon, nelayan di Puger biasanya dilakukan secara berkelompok. Maksudnya adalah bahwa satu rumpon dimiliki oleh 5 perahu skoci/5 perahu payang atau 7 perahu gabungan dari skoci dan payang. Dalam

pancing. Sosialisasi atau pengarahannya itu porsinya lebih banyak diberikan kepada nelayan perahu Skoci. Sedangkan perahu payang dihadiri oleh 4 orang dan pancing dihadiri oleh 3 orang saja. Meski ada nelayan yang menduga bahwa dalam pembagian bantuan ini, ada nepotisme pemasangan rumpon tetap berjalan. Sedangkan di pihak dinas perikanan sendiri ada rasa enggan untuk mengajak nelayan karena ada beberapa nelayan yang menyepelkan atau tidak kooperatif terhadap teknologi ini.

Rumpon bantuan yang berjumlah 10 itu saat ini hanya tinggal satu rumpon yang tersisa. Begitu juga dengan perahu skoci yang digunakan oleh nelayan. Perahu dan rumpon tersebut memang minim secara kualitas untuk ukuran rumpon laut dalam, sehingga umur rumpon tidak bertahan lama. Rumpon yang masih tersisa tersebut dikelola oleh kelompok nelayan bernama CJDW, dari kelompok nelayan skoci. Cara pengelolanya dengan cara membayar 15 % dari setiap hasil tangkapan yang diperoleh. Dari uang yang terkumpul tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat rumpon kembali jika rumpon yang sekarang sudah putus.

Saat ini rumpon yang ada di pesisir pantai Puger sudah berkembang cukup banyak. Sepanjang tahun 2004-2009 saja diperairan pantai Puger sudah ada sekitar 14 rumpon milik swadaya masyarakat nelayan sendiri. Bahkan sampai saat ini rumpon yang ada diperairan pantai Puger bertambah menjadi 33 rumpon perairan dalam. Rencana kedepan, Dinas Perikanan dan Peternakan Jember akan mengembangkan rumpon perairan dangkal. Rumpon ini khususnya akan dimanfaatkan untuk nelayan jukung. Rumpon tersebut rencananya akan ditaman di sekitar perairan Nuso Barong. Selain bermanfaat untuk menambah hasil tangkapan nelayan rumpon tersebut juga untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak di perairan sekitar pulau Nuso barong.

Jadi seperti yang diuraikan diatas, perkembangan rumpon yang ada di Puger sudah ada sebelum Dinas Perikanan dan Peternakan memperkenalkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Perkembangan itu semakin pesat ketika dinas juga memperkenalkan rumpon pada komunitas nelayan Puger. Meskipun pengenalan tersebut hanya pada beberapa kelompok saja,

---

kelompok tersebut, ada satu orang yang menjadi ketua kelompok. Ketua dipilih secara terbuka/langsug oleh nelayan dengan kriteria seperti memiliki kemampuan untuk mengatur nelayan ketika melakukan penangkapan ikan dilaut, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kelompoknya. Seorang ketua ini bisa saja mengundurkan diri atau diminta untuk mundur jika pertama, ia sudah cukup tua/tidak memiliki kemampuan tenaga sehingga iakemudian mengundurkan diri. Kedua, mengganggu nelayan yang lain ketika menangkap ikan di rumpon. Dan ketiga, dengan segera memasukkan anggota kelompok nelayan lain untuk menangkap ikan disekitar rumpon.

namun hal tersebut memberikan pengaruh yang signifikan. Karena dalam penerapannya ternyata menuai berbagai masalah pada kelompok nelayan yang ada di Puger.

Tujuan pemasangan rumpon yang awal mulanya untuk mengefisienkan usaha nelayan ternyata memiliki dampak lain secara sosial. Disatu sisi dapat meningkatkan pendapatan nelayan sedangkan disisi lain menimbulkan konflik. Konflik ini terjadi antara nelayan yang tidak menggunakan alat bantu penangkapan rumpon dengan yang menggunakan rumpon. Dengan ini berarti menambah panjang deretan konflik yang ada di komunitas nelayan Puger<sup>18</sup>. Adanya rumpon yang telah berkembang diseluruh wilayah mau tidak mau memberikan pengaruh pada masyarakat nelayan yang ada di Puger. Hal ini terlihat dengan adanya rumpon yang berasal dari luar nelayan Puger. Rumpon tersebut kemudian dikenal dan ditiru oleh nelayan Puger.

#### **4.5 Kronologis Aksi Protes Nelayan Non Rumpon**

Munculnya aksi kolektif berupa protes yang dilakukan nelayan dilatar belakangi oleh mulai berkembangnya rumpon di perairan pantai Puger. Rumpon mulai ada diperairan Puger sejak sekitar tahun 2001 yang dimiliki oleh nelayan luar Puger. Nelayan mulai mengembangkan rumpon sebagai alat bantu penangkapan ketika mereka menemukan rumpon. Sampai akhirnya Dinas Perikanan dan Peternakan Jember mulai memperkenalkan rumpon bantuan atau percontohan kepada nelayan Puger. Rumpon bantuan itu dimanfaatkan oleh beberapa kelompok nelayan. Ada 3 rumpon yang dipasang di sekitar perairan Nuso Barong. Rumpon tersebut diberikan secara bertahap kepada kelompok nelayan. Meski ada beberapa nelayan yang memandang sinis tentang pemasangan rumpon tersebut, namun perkembangan rumpon semakin bertambah. Nelayan yang mengetahui manfaat rumpon mulai membuat rumpon sebagai alat bantu penangkapannya. Beberapa nelayan perahu jukung mulai beralih menggunakan rumpon karena mereka melihat hasil tangkapan yang cukup menjanjikan.

Seiring dengan berkembangnya rumpon di komunitas nelayan Puger, Dinas Perikanan dan Peternakan Jember memberikan bantuan rumpon kepada masyarakat nelayan. Bantuan tersebut berupa 10 rumpon dan 10 perahu skoci<sup>19</sup>. Bantuan tersebut diberikan kepada nelayan

---

<sup>18</sup> Konflik-konflik yang ada tersebut antara lain konflik antara nelayan dengan pengambek/tengkulak, konflik antar nelayan terkait dengan pengerusakan laut, konflik nelayan dengan aparat terkait dengan pengerusakan laut, serta konflik antara nelayan dengan Pemkab terkait tidak transparannya hasil retribusi.

<sup>19</sup> Perahu skoci merupakan jenis perahu yang didesain untuk berlayar jauh dan berhari-hari, yaitu untuk perjalanan diatas 30 mil. Jarak ini sesuai dengan letak pemasangan rumpon laut dalam di komunitas nelayan Puger.

yang telah berbentuk kelompok. Pada waktu pemberian itu nelayan-nelayan dikumpulkan<sup>20</sup> untuk kemudian memasang rumpon dilaut. Saat ini rumpon yang tersisa tinggal satu rumpon saja, begitu juga dengan perahu skoci yang diberikan.

Sepanjang tahun 2004-2009 sudah banyak nelayan yang rumpon, tercatat ada sekitar 14 rumpon yang terpasang<sup>21</sup>. Rumpon dimanfaatkan secara berkelompok oleh nelayan. Satu rumpon dimanfaatkan oleh 5 perahu skoci atau 5 perahu payang atau 7 perahu payang dan skoci. Setiap kali melakukan penangkapan ikan nelayan yang menggunakan rumpon selalu mendapatkan ikan. Sedangkan disisi lain nelayan jukung dan pancing hasil tangkapannya selalu mengalami penurunan. Kejadian ini berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketidakpastian hasil tangkapan untuk nelayan jukung semakin hari kian terasa. Bahkan dalam kurun waktu tertentu mereka tidak melakukan penangkapan ikan. Nelayan perahu jukung dan pancing dan nelayan payang yang tidak memiliki rumpon, akan mengalami kerugian jika dalam operasi penangkapan tidak membawa hasil yang maksimal. Karena modal yang digunakan untuk biaya berangkat melaut tidaklah murah. Nelayan jukung dan pancing minimal harus mengeluarkan uang sekitar Rp 300.000-400.000 untuk sekali berangkat kelaut, sedangkan nelayan payang paling tidak harus mengeluarkan uang minimal sebesar Rp 700.000. Jika mereka pulang dengan tidak membawa hasil tangkapan yang cukup maka mereka akan mengalami kerugian<sup>22</sup>. Karena seringnya mereka tidak mendapat hasil tangkapan, maka banyak perahu jukung yang tidak beroperasi.

Menurut pengakuan nelayan selama 2 tahun terakhir sampai akhirnya peristiwa protes itu terjadi, merupakan puncak dari sulitnya mencapatakan ikan. Nelayan perahu jaringan mengeluh tentang hasil tangkapannya yang terus menurun. Mereka menduga bahwa dengan adanya rumpon ikan tidak mau ke wilayah pinggir. Ikan tertahan oleh adanya rumpon. Karena sulitnya mendapatkan maka ada sebagian nelayan jukung yang mencoba menacing di sekitar wilayah rumpon. Mengetahui hal itu, pemilik rumpon melarang nelayan jukung. Terkadang pemilik rumpon melarang dengan kata-kata yang kurang sopan. Padahal jarak nelayan jukung dengan rumpon itu sekitar 20 meter. Salah seorang nelayan jukung jaringan bapak Yakup (50th) menyatakan seperti ini:

---

<sup>20</sup> Nelayan diberikan pengarahan bagaimana kerja rumpon dan manfaat rumpon. Sebagian besar merupakan nelayan yang berminat (kelompok nelayan skoci), nelayan payang 4 orang, nelayan pancing 3 orang.

<sup>21</sup> Jumlah rumpon secara pasti belum bisa diketahui, yang pasti jumlahnya lebih dari 10 rumpon atau bahkan lebih dari 14 rumpon. Karena dalam kurun waktu tersebut banyak nelayan yang memasang rumpon. Saat ini saja (sampai November, 2010) jumlah rumpon bertambah lagi sekitar 19 buah. Jadi jumlah total semua sekitar 33 rumpon.

<sup>22</sup> Jika nelayan mengalami kerugian biasanya mereka akan mengadaikan barang-barang atau pinjam kepada pengambek.

*Engken ngeten, nggih ngapuntene mawon, tiang pancingan mancing teng rumpon dilokaken, "iki donyane mbahmu ta koen pancing?", "iki donyane nyaimu ta koen pancing", "gawe po'o dewe?". umpal-umpal engken digolong trus di banting. Mancingge ngeh cedek, nunut mbak, engken 5 jam pun wangsul, kadang ngeh diobrak-obrak, nggih wangsul..*

Artinya dalam bahasa Indonesia :

(nanti begini, ya maaf saja, nelayan pancingan mancing di rumpon di ejek, "ini hartanya nenekmu apa?", "bikin saja sana sendiri". Nanti pelampung-pelampung digulung kemudian dibanting. Mancingnya ya sekitar rumpon, menumpang mbak, nanti sekitar 5 jam sudah pulang, kadang juga diusir-usir, ya kemudian pulang...)

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Tawan :

*"Masalahnya begini mbak, ada kejadian di tengah lapangan. Bahwa ada orang umum, lain kelompok nangkap ikan di sekitar rumpon, padahal kalo dilapangan saya lihat sendiri memang rumpon itu kalo nggak salah saling menyadari itu masalah mbak, sampe sekarang masalah. Rumpon sama ikannya itu kurang lebih jauhnya 20 meter, jadi rumpon dengan ikan yg dipancing itu 20m, lha itu dilarang punya rumpon. Jadi ya ada cemburu sosial lha. "nggak oleh mancing kene" termasuk kata orang yang punya rumpon. Sampe rame seperti itu, termasuk anggota saya yang dilarang itu."*

Salah seorang anggota LKRN, juga pernah dilarang oleh para nelayan pemilik rumpon. Bapak Tawan sendiri juga melihat kondisi rumpon jika tidak ada rasa saling menghargai akan terjadi masalah. Setelah peristiwa itu, mereka mengadukan kepada bapak Tawan. Bapak Tawan ini merupakan ketua LKRN<sup>23</sup> (Lembaga Kelompok Rukun Nelayan). Lembaga ini kemudian menampung aspirasi nelayan jukung pancingan dan jaringan. Melihat peristiwa tersebut bapak Tawan beserta perwakilan nelayan jaringan, payang kecil, pancingan masing-masing 2 orang, dan beserta pengurus LKRN 3 orang tanya ke Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai jarak dimana sebenarnya rumpon di tanam. Sesampainya di dinas, mereka mendapat jawaban dari salah seorang kabid perikanan (bapak Sholeh) bahwa jarak rumpon yang dipasang sebenarnya

---

<sup>23</sup> LKRN merupakan suatu kelompok nelayan dari berbagai jenis alat tangkap, terutama adalah nelayan perahu jaringan dan pancingan, nelayan skoci. Namun pada saat pembentukan lembaga ini tidak dihadiri oleh nelayan Skoci. Jumlah anggotanya sekitar 800 orang nelayan. Lembaga ini dibentuk untuk menyalurkan aspirasi nelayan dan sebagai kontrol pemerintah dalam pemberian bantuan kepada nelayan yang seringkali tidak tepat sasaran dan disalahgunakan oleh instansi pemerintahan yang terkait. Posisi dengan pemerintah lembaga ini sebagai lembaga untuk bekerjasama dan pengontrol bantuan. LKRN ini memiliki pengurus yang berdomisili di desa Puger Kulon dan Puger Wetan. Lembaga ini dibentuk untuk menyalurkan aspirasi nelayan dan sebagai kontrol pemerintah. LKRN berdiri tahun 2004, dimana susunan organisasinya,

Ketua: Hartawan

Sekretaris: Rifadi

Bendahara: H. Ahmad Jubaeri

adalah 100 mil. Dari keterangan yang diperoleh maka nelayan-nelayan jukung ini memiliki kepercayaan bahwa rumpon yang dipasang oleh nelayan yang menggunakan rumpon itu salah. Karena jarak rumpon tersebut hanya 30 mil dari bibir pantai. Sedangkan nelayan rumpon sendiri tidak mau untuk menjauhkan letak rumponnya, mengingat kapasitas perahu skoci nelayan yang berbahan kayu. Dikhawatirkan jika melebihi jarak tersebut perahu akan pecah dan tidak bisa menahan gelombang/ arus yang besar.

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Tawan :

*”Trus anggota saya itu Tanya ke perikanan. “berapa mil dari bibir pantai, aturanya memasang rumponnya?”. Tanya kesana, 1 mobil, wakil-wakilnya saya ambil, 2 dari payang kecil, 2 dari jaringan, 2 dari pancingan, dan lengkap plus dengan pengurusnya 9 orang. Tanya kesana, jawabnya perikanan salah, dijawab sendiri oleh orang perikanan. “Berapa mil se pak aturanya itu?” jawabnya perikanan sendiri ”sebetulnya 100 mil”. Yang ngomong itu pak saleh, kabidnya perikanan waktu itu. Kemudian orang-orang kami sampai rumah, makin memanas, “lha rumpon itu yang ditengah itu cuma 30 mil paling jauh, padahal aturan dari perikanan 100 mil”. Lha saya ketekan terus pada waktu itu, lha orang itu nggak tau, Lha perikanan menganggap saya provokatornya, padahal saya cuma menyampaikan aspirasinya. Jawabnya perikanan yang salah.”*

Selain hal diatas, faktor istri juga memberikan kontribusi dalam mempertajam konflik ini. Istri-istri nelayan di komunitas nelayan Puger biasanya juga membantu suaminya untuk menjualkan ikan atau berjualan ikan hasil ”bonus” ikan dari juragan. Sudah menjadi kebiasaan umum istri-istri nelayan akan menjemput suaminya ketika mereka datang dari melaut. Disitulah terjadi interaksi antara perempuan-perempuan itu, baik antara istri yang seperahu atau istri yang berlainan perahu. Ketika salah satu perahu nelayan ada yang memperoleh ikan yang lebih banyak, maka ini akan menjadi suatu pemicu bagi istri untuk bertanya mengapa suaminya tidak memperoleh hasil tangkapan yang banyak. Terkadang nelayan tersebut akan menjawab dengan pertanyaan yang bisa menutupi kelemahan nelayan tersebut. Misalnya dengan menjawab bahwa nelayan yang sering mendapat ikan itu menggunakan jasa dukun. Mungkin ini bukan suatu masalah yang besar jika hanya sekali atau dua kali tidak mendapat ikan dengan maksimal. Jika ini terjadi berulang kali akan memberikan masalah bagi istri.

Dalam operasi penangkapan ini istri juga berperan dalam penyiapan keperluan untuk melaut, membeli solar, membeli dan meyiapkan bekal untuk melaut dan persiapan yang lainnya. Terkadang untuk memenuhi semua itu mereka harus hutang pada toko, warung atau pengambek.

Jika semua hutang tidak dilunasi ini akan memberikan beban tersendiri bagi pihak istri. Menanggung rasa malu merupakan tekanan terbesar bagi istri. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Hambali :

*”....Dapat ikan yg tidak dapat ikan.. misalnya ada 1 orang dapat, istrinya kan jual ikan. Yang tidak dapat nggak jual ikan, “kenapa nggak dapat ikan?” Tanya ke suaminya.. untuk menutupi kelemahan suaminya maka suaminya menjawab dengan semaunya dia...”dia kan kedukun..ke manalah”  
itu satu dua kali kalo berkali-kali bagaimana?  
Sedangkan istri kan yang ngurus keperluan untuk melaut, beli solar dan sebagainya...kalo nggak ada uang, ngutang..dan ini kan berperan juga..setiap hari ngebon, ini kan malu...”*

Konflik yang semula mempermasalahkan jarak rumpon dari bibir pantai kemudian menjadi masalah yang kompleks dengan berbagai faktor tersebut. Kelompok nelayan jaringan dan pancingan melihat bahwa masalah jarak tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oleh karena itu kelompok nelayan ini berusaha agar jarak rumpon bisa diusahakan lebih jauh lagi<sup>24</sup>. LKRN sebagai perwakilan nelayan kemudian membicarakan masalah tersebut ke Dinas Perikanan dan Peternakan. Nelayan jaringan dan pancingan menginginkan di pertemukan dengan pihak pemilik rumpon. Pertemuan itu dilakukan 3 kali, dimana sebelumnya sudah dilakukan pertemuan secara informal di kantor desa Puger Wetan, namun tidak ada titik temu. Pertemuan pertama dan kedua itu, dilaksanakan di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan, namun tetap tidak ada titik temu antara kedua nelayan. Sampai akhirnya dipertemuan ke tiga, dilaksanakan di kantor kecamatan Puger.

Pertemuan di kantor kecamatan ini rencananya akan dihadiri oleh pihak pemilik rumpon, nelayan non rumpon, serta Dinas Perikanan dan Peternakan itu sendiri, dengan difasilitasi oleh pihak kecamatan. Tuntutan nelayan non rumpon adalah untuk memutus rumpon. Hal ini dilakukan karena permintaan untuk menjauhkan lagi jarak rumpon yang ada sekarang tidak dipenuhi oleh pihak pemilik rumpon. Pemilik rumpon juga tidak ingin menjauhkan rumponnya karena kapasitas perahunya tidak bisa untuk jarak yang lebih jauh lagi. Pada saat pertemuan di kantor kecamatan tersebut, bapak camat Wahyudi Abdullah tidak berada ditempat. Pertemuan itu diwakili oleh wakil camat bapak Agung Nugroho. Pada pertemuan itu dihadiri oleh Muspika,

<sup>24</sup> Mereka meminta agar rumpon digeser jaraknya menjadi 60-100 mil dari yang awalnya 30 mil. Akhirnya terjadi kesepakatan bahwa rumpon yang dipasang jaraknya 40 mil. Namun selang beberapa waktu kemudian nelayan non rumpon menolak jarak tersebut. Ketika kesepakatan itu memang tidak semua nelayan non rumpon secepat, hanya beberapa nelayan yang secepat. Oleh karena itu aksi pemutusan rumpon muncul kembali.

nelayan non rumpon (6 perwakilan dari nelayan jaringan dan pancingan dan bapak Hartawan)<sup>25</sup>, dan pemilik rumpon (H. Napi). Sedangkan Dinas Perikanan dan Peternakan tidak ada yang menghandiri. Hal ini yang membuat nelayan non rumpon kecewa.

Nelayan non rumpon kemudian meminta muspika untuk memutus rumpon. Tuntutan itu tidak dapat dipenuhi oleh Muspika, karena bukan wewenangnya. Bapak Agung mencoba menengahi antara kedua kelompok ini, namun tuntutan tersebut tetap dipertahankan oleh pihak non rumpon, bahwa rumpon tersebut harus diputus dan ternyata tidak mempunyai izin<sup>26</sup>. Melihat tuntutan yang seperti itu, maka pihak nelayan rumpon kemudian akan mengurus izin sesuai dengan jarak rumpon yang mereka pasang saat itu<sup>27</sup>. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Agung:

*"...Iya dipertemukan. Pemilk rumpon nggak minta apa-apa, nelayan jaring minta diputus, pemilik rumpon hanya ingin untuk taat hukum , hanya untuk tegaknya peraturan, dengan menaati izin pemasangan rumpon".*

Dinas Perikanan dan Peternakan tidak hadir dalam pertemuan itu<sup>28</sup>, padahal dalam konflik ini dinas merupakan pihak yang berkompeten. Nelayan non rumpon yang ketika itu datang beramai-ramai akhirnya mendesak dan menekan Muspika dan kecamatan.

Melihat massa yang begitu banyak, bapak Hartawan (bang Tawan) dipanggil oleh pihak kepolisian ditanya tentang massa yang hadir dalam pertemuan itu. Pihak kepolisian menanyakan izin jika akan melakukan aksi. Namun bapak Hartawan mengatakan bahwa ia hanya menghadiri rapat di kecamatan ini untuk masalah pemutusan rumpon. Menurutnya massa yang datang hanya ingin melihat bagaimana jalannya rapat tersebut yang dilakukan oleh perwakilannya. Massa datang dengan sendirinya, karena mereka ingin melihat apakah perwakilannya itu memang bersungguh-sungguh membela nelayan jukung jaring dan pancing. Akan tetapi dinas perikanan

<sup>25</sup> Nelayan non rumpon yang mewakili (bapak Hartawan) menurut bapak Agung merupakan nelayan yang dulunya menggunakan rumpon dan masih keponakan dari pihak perwakilan yang mempunyai rumpon. Bapak Agung juga menyatakan bahwa sebenarnya jaring yang digunakan nelayan jaringan juga mempengaruhi ketersediaan ikan, karena menginggat mata jaring yang digunakan kurang dari 1 inci. Namun hal ini tidak dikemukakan dalam pertemuan itu, apabila dinyatakan akan terjadi masalah baru lagi.

<sup>26</sup> Pihak pemilik rumpon memiliki surat berita acara penerunan rumpon, yang ditanda tangani atau mengetahui Dinas Peternakan dan Perikanan kecamatan Puger (UPTD) Puger oleh, camat Puger, kepala desa Puger Wetan, kepala satpolair kabupaten Jember serta komandan pos TNI AL kabupaten Jember. Surat ini yang menurut nelayan rumpon sebagai surat izin pemasangan rumpon.

<sup>27</sup> Jarak rumpon yang dipasang adalah rata-rata berada di wilayah 30 mil dari bibir pantai Puger. Nelayan rumpon juga tidak ingin memutus rumponnya karena untuk itu membutuhkan biaya yang sangat mahal.

<sup>28</sup> Disnakan tidak hadir dalam pertemuan tersebut karena mendapat informasi bahwa bapak camat tidak bisa hadir, sehingga pertemuan tidak jadi dilanjutkan.

tidak hadir dalam pertemuan tersebut. Hal ini yang membuat nelayan marah dan kecewa. Berikut pernyataan dari bapak hartawan tentang hal tersebut diatas:

*"Waktu itu mau dipertemukan nelayan non rumpon dan pro rumpon. Diambil kesepakatan, persetujuan lah tentang program rumpon,, saya ambil orang-orangnya 6 orang plus pengurusnya waktu itu. Saya menghadiri rapat dikecamatan, tau-tau Dinas perikanan nggak datang, tiba-tiba massa datang. Massa dari non rumpon, termasuk anggota saya, banyak mbak waktu itu sekitar 10.000 orang. Penuh lapangan..*

*Saya ditanya langsung polres,*

*"kalau mengadakan demo sampean itu mengajukan izin" (polisi)*

*"lho pak saya nggak mengadakan izin, tapi menghadiri rapat" (bang Tawan)*

*"lha kok tau-tau datang semua, ?" (polisi)*

*"lho saya ndak tau, mereka datang sendirinya" (bang Tawan).*

*Rapat itu intinya mau ditemukan pro rumpon, mau ditemukan secara kekeluargaan. Nyatanya Dinas perikanan nggak datang, justru yang dapat undangan yang datang. Ditempatkan di kecamatan Puger, tgl 26, hari Kamis, bulannya lupa"*

Pertemuan yang dilakukan di kantor kecamatan tersebut berlangsung dari pagi sampai sekitar siang hari. Beberapa poin yang dibicarakan dalam pertemuan itu adalah

- a. Rumpon yang ada harus memiliki izin semua.
- b. Aturan jarak rumpon harus sesuai aturan dari pantai ke laut.
- c. Aturan jarak antar rumpon

Setelah aksi protes akibat dari ketidakhadiran Dinas Perikanan dan Peternakan itu. Massa kemudian bergerak ke kantor desa Puger Wetan. Massa bergerak bersama-sama menuntut agar kepala desa Puger Wetan bapak Edy Haryoko menandatangani pernyataan agar rumpon di putus. Massa langsung menodong kepala desa untuk segera menandatangani pernyataan. Akan tetapi ternyata bapak kepala desa hanya didesak untuk menandatangani kertas di buku tulis kosong. Karena desakan massa maka bapak Edy menyanggupi permintaan massa. Proses itu sempat berlangsung alot, karena kepala desa masih ingin minta penjelasan kepada massa tentang apa yang akan ditandatangani tersebut. Melihat kondisi massa yang mulai anarkhis (merusak meja), maka bapak Edy menandatangani pernyataan tersebut. Berikut pernyataan dari bapak Edy Haryoko :

*"..Diam aja, kita pas lagi santai di pendopo...ya udah..massa muncul..saya di kerubuti massa... kayak anak kecil... kok bisa seperti ini*

*Massa : "pokoknya pak, iso gak iso sampean kudu tanda tangan..",*

*Pak kades : "sek ta iki tanda tangan opo iki?"*

*ini kosongan tidak ada pernyataan, Cuma kertas kosong.*

*Pak kades: "se ra jangan mekso-mekso..sek ta, nanti bisa diselesaikan dengan cara lain.." tanda tangan apa ini tanda tangan tolak rumpon.*

*Massa: "nggak iso, pokoknya sampeyan harus tanda tangan".*

*Akhirnya untuk menjaga situasi jadi terkendali maka saya teken saja. Tapi saya..lho kok..ini nggak ada pertanyaan sama sekali..dibuku tulis lagi... meja pecah semua..... yo wes saya teken..’*  
*massa : “nah gitu pak, mulai mau kan enak..”*  
*Jadi mereka marah karena saya lama nggak tanda tangan. Kan saya timbang-timbang dulu..*  
*Saya duduk...dikerubuti ratusan orang...diancam-ancam juga mbak..*  
*Begitu selesai...”lha polisi kok banyak...kenapa ngamankan saya..”*  
*Polisi: ‘gimana pak kades apa perlu saya pegang kan sudah ada yang dirusak..”*  
*Kades :”udah pak nggak usah itu juga warga saya semua yang pro dan kontra..alamnya juga demokrasi”.*

Setelah massa ke kantor desa Puger Wetan, massa bergerak ke kantor desa Puger Kulon. Di desa Puger Kulon keinginan massa untuk mendapat tanda tangan kades untuk menyetujui rumpon didapatkan tanpa adanya kekerasan. Kepala desa Puger Kulon bapak Eko langsung menandatangani dikertas buku kosong. Menurutnya dalam masalah rumpon desa hanya ikut arus apa yang menjadi keinginan massa. Setelah mendapat apa yang diinginkan tersebut, massa nelayan non rumpon juga sempat mendatangi salah satu rumah pemilik rumpon (H. Manaf dan H. Yanti)<sup>29</sup>. Massa merusak pagar dan rumpon yang akan dipasang. Selain itu massa kemudian bergerak ke wilayah TPI, untuk meminta tanda tangan dari pos Pol Airud. Namun massa tidak mendapat tanda tangan, karena menurut kepala Pos Pol Airud masalah tersebut bukan wewenangnya. Massa juga sempat akan merusak perahu skoci yang akan berlabuh, namun hal itu tidak dilakukan. Bapak hartawan, dan bapak Rifadi memang kendali dalam aksi tersebut. Mereka mengarahkan massa untuk melakukan pemblokiran atau yang lainnya. Aksi kemudian mereda setelah pihak kepolisian turun tangan dalam aksi tersebut.

Selang beberapa hari kemudian sekitar 15 hari, pihak Dinas Perikanan dan Peternakan Jember, mengajak perwakilan nelayan non rumpon dan pihak rumpon untuk bertemu kembali. Pertemuan itu diikuti oleh kepala Dinas Perikanan, bapak camat Puger, bapak Kapolsek, kepala Desa Puger Wetan, kepala Desa Puger Kulon ditempatkan di salah satu rumah makan. Bapak Hartawan dan bapak Rifadi sebagai perwakilan tidak menyetujui atas tempat yang dipilih untuk rapat. Menurutnya undangannya di kecamatan, namun tiba-tiba pertemuan dialihkan dirumah makan. Oleh karenanya mereka menolak untuk ikut pertemuan tersebut. Tindakan tersebut

<sup>29</sup> Di rumah H. Manaf, pelampung rumpon di pukuli oleh massa, pagar juga dirusak. Pemilik rumpon ini merupakan salah satu nelayan yang vokal. Maksudnya melalui HT ketika melaut, ia berujar ”ayo kalo bisa rusak rumpon, tak minum kencingnya”. Pernyataan-pernyataan yang seperti itu yang membuat nelayan semakin marah dan dendam.

mereka ambil untuk menjaga keutuhan kelompok non rumpon. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh bapak Hartawan :

*”setelah itu saya didesak lagi, sampai saya ditemukan dimana waktu itu... yang menghadiri pertemuan itu termasuk camat, pak dansek, saya nggak setuju ditempatkan di rumah makan. Saya nggak setuju, Pertemuan lagi dirumah makan. Padahal undangannya di kecamatan, kok tau-tau saya digiring ke tempat rumah makan. Saya nggak bisa plintat plintut...saya takut anggota saya, saya menghindar. “gini pak, Saya tidak menolak menghadiri rapat, cuma sementara ini, maaf, saya mau pulang saja, ini bukan rapat”. Saya tolak itu. Akhirnya bubar, ya makan-makan degan sendirinya waktu itu, lengkap, termasuk camat, kapolsek, ada kades desa puger barat dan puger timur. Ya bukannya menolak, tapi kan bukan tempatnya rapat. Ya nanti anggota saya, saya dikira ada main”.*

Berselang sekitar 2 bulan, sebelum aksi demo yang dilakukan di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan, pihak nelayan non rumpon kemudian berencana akan ke Dinas lagi. Mereka kemudian bekerjasama dengan LSM yang ada di Jember bernama Japer (Jaringan Pemantau Rasional) Jember<sup>30</sup>. LSM ini diketuai oleh Kustiono, yang berdomisili di Jember. mereka meminta bapak Kustiono sebagai koordinator di LKRN. Sebelum menerima tawaran itu, beliau juga mendapat tawaran dari nelayan rumpon. Namun pada akhirnya beliau memutuskan untuk membantu kelompok nelayan non rumpon. Karena menurutnya persoalan ini merupakan persoalan yang besar dan perlu penyelesaian yang komprehensif. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Kustiono:

*”Nah saya dengan setelah melakukan investigasi awal, saya menyimpulkan bahwa ini merupakan persoalan yang cukup besar, saya harus konsen bener, kare ini persoalan yang tidak kecil dan penyelesaian harus komprehensif. Dan disaat gaya birokrasi kita seperti sekarang ini, sulit ini untuk bisa selesai, tapi nggak ada persoalan yang tidak selesai. Tahap awal itu kita minta diputus semua, jagan ada rumpon dulu, kalo toh nanti ada, pasang lagi tapi sesuai dengan aturan yang ada”.*

Sehari sebelum aksi protes tersebut dilakukan, nelayan non rumpon dengan pengurus LKRN mengadakan pertemuan-peertemuan untuk aksi yang akan mereka lakukan. Pertemuan-pertemuan itu dilakukan kurang lebih 10 kali. Sebenarnya aksi akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2009, namun ternyata aksi itu di tunda. Ternyata dilakukan pada keesokan harinya yaitu tanggal 21 Juli 2009. Kustiono sehari sebelum hari H sudah berada di Puger. Dalam kurun waktu

---

<sup>30</sup> Atau LSM FORMAT (Forum Masyarakat Tertindas). Mengenai perbedaan nama LSM, informasi ini peneliti dapatkan dari dua informan yang berbeda yaitu dari bapak Rifadi yang mengatakan bahwa LSM itu bernama JAPER sedangkan bapak Kustiono sendiri menjawab bahwa LSM itu bernama FORMAT.

seminggu sebelum hari H aksi protes dilakukan, beliau bolak-balik dari Jember-Puger. Ia melakukan koordinasi dengan pengurus LKRN dan para nelayan non rumpon. Nelayan non rumpon terutama nelayan jukung jaringan dan pancingan. Para nelayan diperintahkan untuk berkumpul di alu-alun Puger. Mereka membawa poster-poster yang berisikan tulisan-tulisan seperti *"Dengan rumpon kami tidak bisa membiayai sekolah anak kami"*, *"Adili para oknum yang terlibat"*, *"Yo opo tanggung jawabe Perikanan, ojok ngurusi wong sogé, wong kaya bangsat"*, *"Rumpon Engkaulah Penyakit"*. Setiap nelayan jukung dimintai uang 50.000 untuk kelancaran aksi yang mereka lakukan. Pagi itu disiapkan sekitar 12 truk yang mengangkut puluhan nelayan non rumpon baik itu laki-laki maupun perempuan. Truk disiapkan secara swadaya oleh nelayan. Nelayan ini diberikan harapan dan janji-janji bahwa rumpon harus diputus oleh para koordinator tersebut. Salah seorang koordinator yaitu bapak Hartawan pernah suatu kali berkata bahwa jika rumpon ini tidak diputus nanti akan menyebabkan kesengsaraan pada anak-cucu kita. Nelayan diberikan semacam semangat bahwa rumpon memang merugikan nelayan, terutama nelayan jukung jaringan dan pancingan.

Setelah semua persiapan selesai rombongan truk nelayan kemudian berangkat dari alun-alun Puger menuju kantor Dinas Perikanan dan Peternakan. Sesampainya di kantor dinas, aparat sudah berjaga-jaga di depan kantor dinas. Sebelum hari H aksi protes, pihak Pemkab, Dinas Perikanan, Bakesbang, Polisi serta beberapa pihak lain sudah melakukan proses lobi kepada Kustiono selaku koordinator lapangan. Mereka meminta agar aksi tidak dilakukan, namun tekad nelayan sudah bulat bahwa mereka akan melakukan aksi protes di kantor Dinas karena rumpon yang ada tidak diputus. Setelah sesampainya di kantor dinas, Kustiono dengan beberapa pengurus LKRN melakukan orasi dan membuang puluhan ekor ikan dan atraksi pengerusakan rumpon buatan di depan gerbang kantor dinas. Setelah sekian lama berorasi akhirnya kepala dinas bapak Dalhar memberi kesempatan nelayan untuk masuk ke dalam.

Pada pertemuan pertama perundingan dilakukan oleh pihak non rumpon (Kustiono, Muhcid, Anwar, Nasrul, Hartawan, Rifadi dan sejumlah orang yang lain) dengan wakapolres Jember, kepala dinas bapak Dalhar, bapak Mahfud, serta sejumlah orang yang lainnya proses kesepakatan berjalan sangat sulit. Nelayan meminta agar rumpon yang ada sekarang harus diputus karena ternyata tidak ada izin<sup>31</sup>. Sedangkan pihak dinas tidak mau untuk melakukan proses

---

<sup>31</sup> Mengenai ketegasan pemberian surat izin pemasangan rumpon, dinas perikanan (kepala dinas bapak Ir. Dalhar) melalui surat keterangan nomor 523.11/636/419/2009 bertanggal 15 Juli 2009, menerangkan bahwa berita acara

pemutusan tersebut karena itu bukan wewenangnya. Didalam proses pertemuan itu dinas memberitahukan tentang siapa yang berwenang untuk memutus rumpon tersebut. Sesuai dengan Kepmen no 30 tahun 2004 tentang perturan pemasangan dan pemanfaatan rumpon, bahwa rumpon yang terpasang di Puger di perairan pantai Puger tersebut pemutusannya harus dilakukan oleh pemerintah pusat, yaitu direktur jenderal perikanan. Hal ini disebabkan karenan jarak rumpon yang dipasang adalah lebih dari 12 mil laut, itu merupakan wewenang Pusat. Namun nelayan tetap tidak mau menerimanya, mereka beralasan bahwa rumpon yang ada itu sudah salah dalam perolehan izinnya. Ini merupakan kesalahan dari Dinas Perikanan dan Peternakan kenapa membiarkan rumpon tanpa izin beroperasi diperairan pantai Puger. Padahal letak rumpon itu berada pada wewenang pemerintahan pusat. Terjadi perdebatan yang sulit ketika pertemuan itu. Karena tidak ada kesepakatan maka perwakilan nelayan kemudian keluar dari ruangan untuk menemui massa. Massa tetap tidak mau beranjak jika dinas tidak memberikan keputusan untuk memutus rumpon tersebut.

Pada perundingan yang kedua, dinas menawarkan suatu opsi bagaimana jika rumpon yang ada sekarang dibiarkan putus dengan sendirinya, jika sudah demikian baru kemudian dibuat suatu kesepakatan. Nelayan tidak menyepakati hal ini. Nelayan kemudian menawarkan bahwa mereka akan memutus rumpon dengan usaha mereka sendiri jika dinas tidak menyanggupi. Namun hal ini tidak disetujui oleh dinas. Mendengar apa yang disampaikan kepala dinas, suasana semakin panas. Salah satu perwakilan nelayan keluar dari ruang perundingan untuk menemui massa, dia menyampaikan bahwa Dinas Perikanan tidak bertanggung jawab dan pengecut. Mendengar hal tersebut massa akan berencana menduduki kantor dinas, namun beruntung pihak keamanan dapat menenangkan massa yang semakin memanas. Proses kesepakatan terus dilakukan namun juga belum mendapatkan kesepakatan. Nelayan tetap pada pertahannya bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka akan menduduki kantor Dinas Perikanan dan Peternakan. Sampai pada pertemuan/perundingan yang ketiga pada hari yang sama, kepala dinas akhirnya memberikan pernyataan secara lesan bahwa rumpon akan dibongkar. Kepala dinas akan memanggil pemilik rumpon untuk memerintahkan pemilik rumpon memutus rumponnya masing-masing. Akan tetapi nelayan tidak hanya puas dengan pernyataan

---

penurunan rumpon yang dibuat oleh kelompok nelayan puger bukan merupakan surat izin pemasangan rumpon. Izin pemasangan rumpon diatur dalam kepmen kelautan dan perikanan no 30 tahun 2004 tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Bahwa melihat jarak pemasangan tersebut pejabat yang berwenang mengeluarkan surat izin pemasangan rumpon di perairan pantai Puger adalah Direktur jendral Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan, untuk pemasangan rumpon diwilayah perairan diatas 12 mil laut dan ZEE Indonesia

lesan kepala dinas, mereka ingin ada suatu surat tertulis secara resmi yang ditandatangani oleh kepala dinas bahwa dinas memerintahkan pemilik rumpon membongkar rumponnya masing-masing.

Akhirnya dinas menyetujui permintaan nelayan. Dinas akhirnya menuangkan hal itu dalam bentuk surat perintah no 523.11.637/419/2009, beranggal 21 Juli 2009, yang isinya memerintahkan kepada pemilik rumpon yang tidak mempunyai izin untuk membongkar/memutus rumponnya sendiri-sendiri. Surat itu didasarkan pada beberapa hal :

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor: Kep 30/Men/2004 tentang Pemasangan dan Pemanfaatan Rumpon
2. Pertemuan formal dan informal yang difasilitasi oleh Pemkab Jember untuk menyelesaikan masalah rumpon di Puger.
3. Surat Pemberitahuan aksi Dewan Pengurus Lembaga Kelompok Rukun Nelayan, Nomor 02/VII/2009

Setelah surat perintah tersebut dikeluarkan massa mulai mereda. Apalagi ketika bapak Dalhar memberikan keterangan langsung didepan massa bahwa rumpon yang tidak memiliki izin untuk membongkar/memutus rumponnya sendiri-sendiri. Setelah mendengar keterangan itu massa kemudian kembali ke Puger dengan membawa salinan surat perintah pemutusan rumpon. Aksi protes tersebut dilakukan sampai sekitar pukul 16.00.

Pasca dikeluarkannya surat perintah tersebut, suasana sudah mulai kondusif. Disisi lain nelayan yang memiliki rumpon kemudian mengusahakan izin atas rumpon yang dipasangnya kepada Dirjen Perikanan Tangkap Departemen Kelautan dan Perikanan. Sambil menunggu izin tersebut keluar, beredar surat pemberitahuan yang ditandatangani oleh UPTD TPI Puger, Dan Pol TNI AL, Kasat Pol Air Puger serta Camat Puger. Surat pemberitahuan tersebut berisikan bahwa demi kondusifitas menghindari konflik fisik antar nelayan baik didarat maupun dilaut, maka dengan ini melarang semua nelayan untuk tidak menangkap ikan di rumpon-rumpon yang ada selama belum adanya izin/keputusan resmi dari Ditjen Perikanan Tangkap departemen Peternakan Perikanan dan Kelautan. Surat pemberitahuan itu dikeluarkan pada tanggal 3 Agustus 2009. Surat itu merupakan hasil pertemuan antara perwakilan nelayan non rumpon dengan instansi terkait untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan selama jeda waktu tersebut. Karena bagaimanapun juga nelayan harus melakukan operasi penangkapan dilaut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Pasca aksi protes dan berbagai surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan, semua nelayan rumpon sudah mempunyai surat izin resmi dari Ditjen Perikanan dan Kelautan RI. Pengajuan izin nelayan itu difasilitasi oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Setelah turunnya surat izin tersebut konflik sudah semakin kondusif. Selang beberapa waktu kemudian, bapak Hartawan, bapak Rifadi dan H. Ahmad mendapat panggilan dari kabupaten. Mereka menyampaikan aspirasi tentang apa yang selama ini mereka inginkan. Dalam pertemuan tersebut pemerintah menawarkan rumpon untuk membantu nelayan jukung jaringan dan pancingan. Alhasil, mereka mendapat bantuan satu rumpon, padahal anggota LKRN itu ada sekitar 70 orang. Rumpon itu kemudian dipasang dan tidak berumur panjang. Hanya dalam hitungan bulan (kurang lebih 4 bulan) rumpon yang pasang itu putus karena gelombang dan arus. Dari bantuan rumpon itu bapak Hartawan menyatakan bahwa mereka masih harus menyempurnakan rumpon tersebut (rumpon tidak lengkap). Biaya yang dikeluarkan untuk itu sekitar 15 juta. Biaya tersebut berasal dari iuran nelayan jukung, dimana masing-masing jukung dikenakan biaya Rp 100.000.

Saat ini rumpon yang dipasang diperaian pantai Puger jumlahnya semakin banyak, ada sekitar 33 rumpon. Nelayan yang memiliki ada yang dengan suka rela mengizinkan nelayan yang tidak mempunyai rumpon menangkap ikan disekitar rumpon miliknya. Namun ada juga yang tidak mengizinkan nelayan non rumpon menangkap ikan disekitar rumpon miliknya. Dalam situasi ini konflik masih ada diantara nelayan. Konflik semakin tajam jika nelayan non rumpon semakin sulit mendapatkan ikan dan didukung dengan faktor-faktor yang telah diuraikan diatas.

## BAB V

### Analisa Hasil Temuan Studi

#### 5.1 Bentuk-Bentuk Konflik

Berdasarkan dari uraian mengenai bagaimana rumponisasi berkembang di komunitas nelayan serta bagaimana kronologis dari konflik tersebut terjadi, maka bentuk-bentuk konflik itu dapat diuraikan sebagai berikut :

##### 5.1.1 Konflik antara nelayan jukung dan payang yang tidak memiliki rumpon dengan nelayan skoci dan payang yang memiliki rumpon.

Bentuk konflik yang pertama ini merupakan konflik yang terjadi antara nelayan jukung (jaringan dan pancingan) dan nelayan payang yang tidak menggunakan rumpon dengan nelayan skoci dan payang yang menggunakan rumpon. Keberadaan rumpon yang terpasang diperaian pantai Puger merupakan pemicu awal dari adanya konflik di komunitas nelayan Puger. Konflik berawal dari keluhan nelayan jukung tentang jarak rumpon yang di pasang oleh nelayan skoci dan payang. Jarak yang menurut nelayan jukung itu dekat bisa mempengaruhi jumlah tangkapan, oleh karena itu mereka menginginkan agar jarak rumpon diperpanjang. Permintaan nelayan jukung untuk memperpanjang letak rumpon tidak dihiraukan.

Disisi lain ada nelayan jukung juga yang melakukan penangkapan ikan di sekitar rumpon. Maka pertengkaran dan pertentangan secara verbalpun tidak terhindarkan, ini merupakan rangkai awal dari konflik ini muncul. Selain pertentangan secara verbal, pengerusakan atau pembuangan alat tangkap nelayan perahu jukung oleh nelayan rumpon juga dilakukan. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan jukung jaringan:

*"Engken ngeten, nggih ngapuntene mawon, tiang pancingan mancing teng rumpon dilokaken, "iki donyane mbahmu ta koen pancing?", "iki donyane nyaimu ta koen pancing", "gawe po'o dewe?". umpal-umpal engken digolong trus di banting. Mancingge ngeh cedek, nunut mbak, engken 5 jam pun wangsul, kadang ngeh diobrak-obrak, ngeh wangsul.."*

Artinya dalam bahasa Indonesia :

(nanti begini, ya maaf saja, nelayan pancingan mancing di rumpon di ejek, "ini hartanya nenekmu apa?", "bikin saja sana sendiri". Nanti pelampung-pelampung

digulung kemudian dibanting. Mancingnya ya sekitar rumpon, menumpang mbak, nanti sekitar 5 jam sudah pulang, kadang juga diusir-usir, ya kemudian pulang...)

Gambaran mengenai pertentangan antar nelayan tersebut terkait dengan hal hak penangkapan ikan. Maksudnya adalah bahwa perairan yang berada disekitar rumpon itu, diklaim oleh nelayan pemilik rumpon sebagai wilayah yang eksklusif bagi pemilik rumpon. Hal ini berarti nelayan lain tidak diperbolehkan untuk mengakses disekitar wilayah rumpon tersebut. Sedangkan tidak ada kepastian (bervariannya) mengenai jarak wilayah di luar rumpon oleh nelayan pemilik rumpon. hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan konflik diantara nelayan semakin memanas.

Selain itu konflik yang terjadi antara kedua kelompok ini terutama terkait dengan aspek tentang isu "ikan milik siapa". Hal ini terkait dengan model perairan Indonesia yang masih menganut paradigma kelutan yang "open acces". Hal ini menimbulkan masalah di masyarakat nelayan. Gambaran mengenai fenomena ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan Puger, terkait dengan konflik rumpon di perairan pantai Puger :

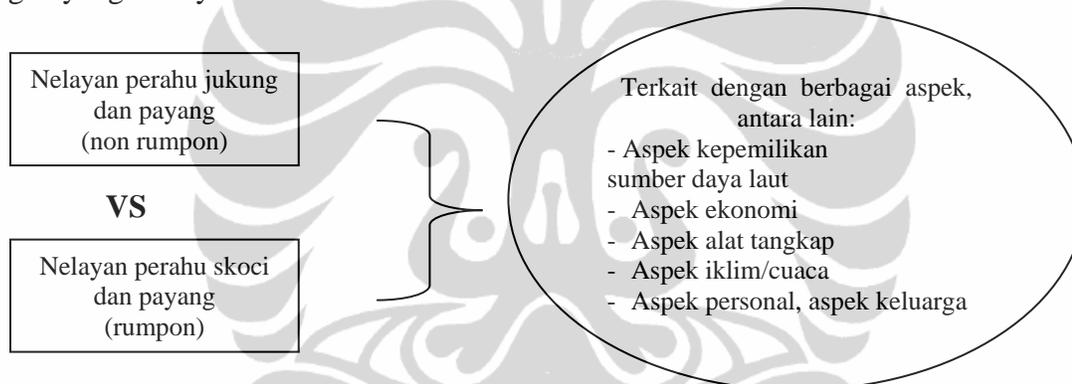
*"Ya saya redam, bisa redam, kan bisa saja mbak, pamong kan harus bisa momong, jadi tujuan saya itu bukan ngesroh program pemerintah,, cuman mau meluruskan masalah rumpon. Memang menguntungkan mbak, bagi yang punya rumpon. Bagi yang tidak punya ya tidak menguntungkan. Jangankan orang lain, masing-masing kelompok kadang-kadang mengadil-ngadili ditengah mbak, misalnya kelompok saya ada ikannya,nggak boleh ngampung disekitarnya, lewat aj dicurigai, Kadang-kadang saya komentar mbak, masing-masing kelompok, "ya betul sampean punya punya izin, rumponnya kan izinya,tapi lautnya kan nggak dikapling,yang di izinkan nggak ada, milik kita bersama,harus kompak". Saya beri masukan, Tanggapannya:" ya gimana harga rumpon kan mahal bang", ya memang repot mbak yang memberi masukan kadang-kadang disalahkan".*

Aspek mengenai paradigma laut yang dianut oleh Indonesia ini memang rentan terhadap berbagai hal seperti *tragedy of common*, kerusakan sumber daya, konflik antar pelaku serta kesenjangan ekonomi. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan tentang apa, kapan, dimana, siapa dan bagaimana sumber daya alam dimanfaatkan, serta bagaimana terjadinya persaingan bebas (Satria, 2009:5).

Aspek selanjutnya adalah yang terkait dengan hasil tangkapan yang menurun pada kelompok nelayan non rumpon. Nelayan non rumpon merasakan kesulitan dalam

memperoleh ikan. Memang, kesulitan dalam memperoleh ikan ini dipengaruhi oleh berbagai macam aspek, seperti iklim/cuaca, keluarga (istri), alat tangkap serta kondisi ekosistem laut setempat. Namun keberadaan rumpon juga patut diperhitungkan jika dalam pemasangan dan pemanfaatnya tidak sesuai dengan kebijakan penerapan rumpon.

Dengan situasi yang sangat kompleks dan saling terkait satu dengan yang lain, maka munculnya konflik dengan sangat mudah mencuat dipermukaan. Laut sebagai tempat dimana mereka bergantung hidupnya menjadi hal yang sangat penting, karena laut merupakan sumber utama dalam kehidupan nelayan. Perebutan sumber daya laut dengan berbagai aspek yang mempengaruhinya merupakan hal yang terjadi dalam komunitas nelayan yang lebih kompleks, baik itu dari segi alat tangkapnya, armada yang digunakan maupun kondisi sosial masyarakatnya. Kesemuanya itu saling terkait satu dengan yang lainnya.



Gambar 5.1 Bentuk konflik nelayan rumpon dan non rumpon

### 5.1.2 Konflik antara nelayan jukung dan payang yang tidak memiliki rumpon dengan pemerintahan desa, kecamatan dan terutama Dinas Perikanan dan Peternakan Jember.

Bentuk konflik yang kedua adalah nelayan jukung dan payang yang tidak menggunakan rumpon dengan pemerintah lokal, terutama dengan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember, sebagai pihak yang terkait dengan aturan pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Konflik ini bisa dikatakan sebagai lanjutan dari bentuk konflik sebelumnya yaitu konflik antara nelayan non rumpon dengan nelayan rumpon. Karena akhirnya konflik ini berkaitan dengan upaya pengenalan rumpon oleh pemerintah setempat. Seperti yang telah diuraikan tentang bagaimana program rumponisasi di

komunitas nelayan Puger, konflik mulai muncul ketika ada sebagian kecil nelayan yang mendapatkan rumpon bantuan dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Program itu diberikan dua kali, yaitu sekitar tahun 2001 dan 2004. Pertentangan semakin menguat ketika nelayan yang memperoleh bantuan rumpon mendapat hasil yang cukup lumayan bila dibandingkan dengan nelayan lainnya.

Konflik mengenai rumpon ini tentu berkaitan sekali dengan ketersediaan sumber daya laut. Terlepas dari keberadaan rumpon yang dipasang diperairan pantai Puger, ketersediaan sumber daya laut serta kondisi perairan pantai Puger mengindikasikan adanya penurunan kualitas serta kuantitas ekosistem dan ikan di laut. Hal ini bukan tidak mungkin jika diperairan tersebut kondisi ekosistemnya tidak berkualitas lagi serta semakin meningkatnya jumlah armada serta penggunaan alat tangkap yang dilarang. Meskipun penggunaan bom serta jaring yang mata jaringnya kurang dari 1 inci dilarang namun penggunaannya beredar secara bebas dan sembunyi-sembunyi. Dengan berbagai kondisi yang demikian itu secara perlahan namun pasti berdampak pada jumlah ikan yang tersedia. Dari tahun ketahun nelayan selalu mengeluh tentang penurunan jumlah ikan. Hal ini terutama di dirasakan oleh nelayan kecil/bemodal kecil. Nelayan jukung merupakan nelayan yang paling merasakan tentang hal ini. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya laut dapat habis jika tidak ada pengaturan dan pencegahan yang baik dan benar. Dengan kondisi yang demikian ini nelayan sudah mengalami banyak kesulitan dan konflik yang dihadapi.

Disisi lain pemerintah yang bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya berusaha untuk bagaimana caranya agar rakyatnya sejahtera. Salah satu cara tersebut adalah dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan atau program. Kebijakan dalam bidang kelautan yang diterapkan adalah dengan pemanfaatan alat bantu penangkapan rumpon. DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) beserta pemerintah daerah setempat terus berusaha mengembangkan keberadaan alat bantu penangkapan ini. Rumponisasi merupakan program yang pemerintah lakukan untuk kondisi perairan laut seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Untuk wilayah kabupaten Jember baru diterapkan secara riil oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Jember sekitar tahun 2002 dan 2004. Dinas Perikanan dan Peternakan Jember memberikan bantuan berupa rumpon perairan dalam untuk nelayan Puger. Rumpon bantuan yang diberikan pada beberapa kelompok nelayan

ternyata menyulut adanya kecemburuan pada nelayan. Apalagi jika rumpon bantuan tersebut diberikan pada golongan atau individu yang sama. Hal ini menimbulkan rasa ketidakadilan pada nelayan yang tidak menerima.

Menurut nelayan bantuan tersebut hanya diberikan pada kelompok nelayan tertentu saja. Kelompok nelayan tersebut terutama adalah kelompok nelayan payang dan skoci. Dari dinas sendiri untuk menerapkan atau memepkenalkan rumpon itu sendiri mereka mencari-cari nelayan yang mau diajak untuk menerapkan tehnologi ini. Pihak yang pro dan kontra terhadap rumpon ketika itu sudah ada sehingga karena faktor inilah yang membuat dinas melakukan sosialisasi dengan cara seperti ini. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Edy Haryoko (kepala desa Puger Wetan):

*Peneliti: "Siapa prioritas dari bantuan rumpon tersebut sepengetahuan bapak, apakah semua nelayan, nelayan tertentu?"*

*Bapak Edy: "Hanya orang tertentu saja pada saat itu".*

*Peneliti: "Orang tertentu itu dari nelayan apa?"*

*Bapak Edy: "Campuran, ada yang dari nelayan payang, nelayan skoci. Jadi dulu itu kayaknya, apa ya.. mungkin karena percobaan dari pemerintah mengenai rumpon, sehingga TPI,BPPI saat itu mencari orang-orang dulu".*

*Peneliti: "Jadi tidak ada prioritas siapa yang dapat?"*

*Bapak Edy: "kayaknya nggak ada, Saya ingat dulu, kepala TPI dulu, saya ...mencari orang-orang yang sekiranya bisa di ajak. Masalahnya mungkin, yang pro dan kontra sudah ada, sehingga Yang dari TPI mencari yang pro dulu yang mau di ajak beralih ke rumpon. Sehingga mereka itu yang dapat bantuan".*

Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan Jember memang terlihat sangat minim. Artinya hanya pada sebagian nelayan saja dan tertentu. Kerjasama antara desa dengan dinas terkait dengan nelayan juga sangat minim atau mungkin tidak sama sekali dilakukan. Padahal disini pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang memegang kendali masyarakat setempat yaitu terutama masyarakat nelayan. Hal serupa juga diungkapkan oleh kepala desa Puger Kulon bapak Eko. Berikut pernyataannya:

*Peneliti: "emm sosialisasi tentang rumpon bagaimana pak?"*

*Bapak Eko: "Belum ada waktu itu. Setelah ada kontflik ini, baru ada, beranggapan yang kaya tok yang punya rumpon, yang menegah kebawah nggak dapet rumpon. Padahal itu program menteri yang harus dijalankan. Sebelum dilaksanakan program itu dilaksanakan motivasi. Jadi waktu itu langsung pada pandhega-pandhega yang mampu, setelah program itu, Pemeritah itu kasih kemudahan, pihak lapangan yang kurang terbuka dan netral..makanya tidak ada yang berani.*

*Pak Yoko aja angkat tangan, Baru saya yang ngomong, coba tanya kalo petik laut BPPI dan TPI nimbang berapa? Tidak ada mbak. Itu...*

*Alasanya ini pihak pusat, saya tidak tau, itu kepala BPPI, Sampean tau, bangunan yang ada ruko-ruko itu saya nggak tau. nggak ada konfirmasi pada saya.*

*Trus saya bilang apa, sekarang otonomi daerah, kalo memang kita menjalankan otonomi daerah...bagaimana....Jadi kalo ada permasalahan, umpunya, kepala desa yang dipanggil... Baru sekarang ini TPI dikepalai pak Rudi, baru agak aman, karena rajin motivasi, baik tingka II dan kecamatan”.*

Konflik ini kemudian semakin berkembang terutama ketika keterlibatan nelayan perahu payang ikut beroperasi menggunakan rumpon. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Edy :

*”Nah ini saya belum paham, soalnya saya baru menjabat, rumpon sudah ada, nah bagaimana rumpon bantuan daaing saya kurang paham, tapi sepengetahuan saya tdak ada konflik atau gejala ke desa. Karena mungkin masih skoci yang menikmati. Nah ketika nelayan payang ikut-ikutan ini yang mulai muncul gejala...ini setelah rumpon bantu maka muncul konflik.”*

Sosialisasi yang diberikan pada hanya sebagian nelayan ternyata juga sosialisasi yang bersifat tehnis. Artinya bagaimana peraturan rumpon pemasangan dan pemanfaatan secara dalam tidak dibahas dalam sosialisasi tersebut. Misalnya sosialisasi bagaimana letak dipasangnya rumpon, jarak antar rumpon, tentang perizinan pendirian rumpon serta berbagai macam aturan tersebut terutama yang terkait dengan keputusan Menteri tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Hal ini seperti yang diungkapkan bapak Mahfud Afandi terkait dengan sosialisasi yang dilakukan.

*Peneliti : ”Mereka punya izin?”*

*Bapak Mahfud : “Mereka nggak punya izin. Aturannya sendiri ini pun dinas baru mensosialisasikannya tahun itu juga awal 2009. Ketika rumpon sudah terpasang dinas baru ngerti aturan-aturan yang detail itu. Setelah kita informasikan tentang aturan itu, jaraknya minimal sekitar 10 mil, tidak boleh dipasang zig zag, dan macam-macam kan. Kata nelayan” oh ada rumpon yang jaraknya kurang dari 10 mil pak”. Akhirnya kita coba petakan, memang ada beberapa rumpon yang tidak memenuhi aturan itu. Jadi kita tidak bisa menyalahkan nelayan juga, karena mereka juga tidak tahu.*

*Peneliti : ”Jadi memang apa ya, diaturannya sendiri dinas belum sosialisasi?”*

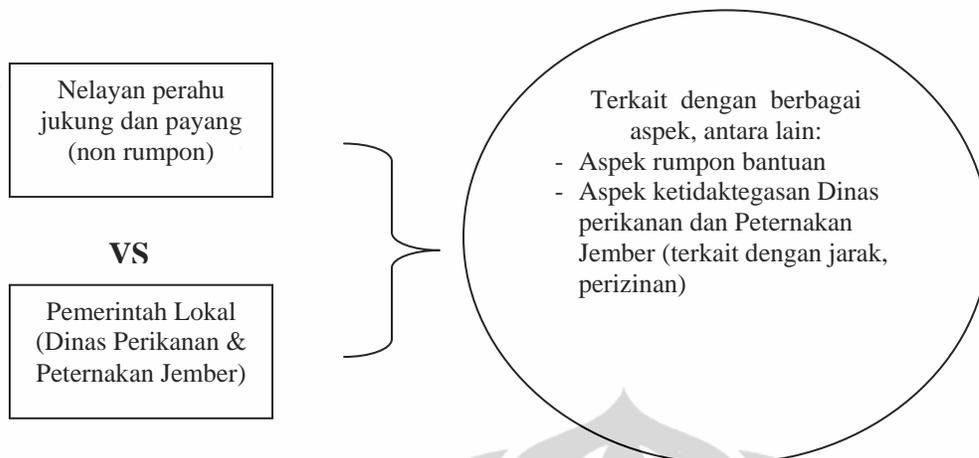
*Bapak Mahfud: “Iya belum sosialisasi, nelayan sudah memasang rumpon, dan ada beberapa rumpon nelayan yang melanggar aturan. Ini juga di jadikan alasan. Minta kabupaten mutus rumpon bukan kewenangan kabupaten tapi*

*kewenangan pusat. Jadi tuntutannya rumpon yang ada harus ada izin. Setelah kita fasilitasi untuk izin, izin keluar dari pusat, setelah itu sudah mereda”.*

Dinas Perikanan dan Peternakan sendiri mengakui bahwa sosialisai yang dilakukan juga sangat minim. Menurut bapak Dalhar, dinas baru mendapat surat keputusan itu sekitar tahun 2008, padahal peraturan tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon yang baru sudah ada sejak tahun 2004. Selain itu alasan bahwa tenaga UPTD TPI yang minim bukan suatu kendala yang utama jika dinas tidak dapat bersosialisasi dengan masyarakat nelayan. Jadi apapun alasannya pihak Dinas Perikanan dan Peternakan seharusnya mendekati diri, berkoordinasi serta bersosialisasi dengan masyarakat pemerintahan desa dan khususnya nelayan. Dinas Perikanan dan Peternakan merupakan agen yang memegang peranan penting dan berwenang dalam urusan perikanan oleh karena itu hendaknya dapat secara maksimal bekerja demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Hal lain yang memicu konflik antara kedua belah pihak ini adalah semakin berkembangnya rumpon yang dipasang di perairan pantai Puger. Namun yang menjadi masalah kemudian adalah jarak rumpon. Jarak rumpon yang menurut nelayan jukung terlalu dekat memberikan dampak pada hasil tangkapan nelayan jukung. Pembahasan tentang jarak ini tidak memperoleh kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini disebabkan karena ketidaktegasan Dinas perikanan dan peternakan dalam aturan pemasangan dan pemanfaatan rumpon. Selain itu juga adanya kesimpangsiuran informasi dari Dinas Perikanan dan Peternakan tentang penetapan jarak pemasangan rumpon juga menambah peliknya konflik ini. Masalah akhirnya merambat pada isu perizinan rumpon. Dimana rumpon yang terpasang tidak memiliki izin sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dinas Perikanan dan Peternakan lepas tangan terhadap perizinan ini karena bukan wewenangnya. Padahal seharusnya sebelum rumpon tersebut dipasang izin pemasangan harus sudah dimiliki oleh nelayan.

Masalah perizinan ini terkait dengan surat berita acara penurunan rumpon oleh kelompok nelayan yang menurut mereka surat itu adalah izin. Karena dalam surat tersebut diketahui dan ditandatangani oleh beberapa pihak yang terkait seperti UPTD kecamatan Puger, camat Puger, kepala desa Puger Wetan, kepala Satpolair Jember, serta komandan pos TNI AL Jember.



Gambar 5.2 Bentuk konflik nelayan non rumpon dengan pemerintahan lokal

## 5.2 Aspek-aspek Tindakan Kolektif Konflik Rumpon di Komunitas Nelayan Puger

Dari uraian mengenai bagaimana rumponisasi berkembang dikomunitas nelayan Puger serta melihat bagaimana kronologis dari konflik ini, serta bentuk-bentuk dari konflik, peneliti mengidentifikasi adanya beberapa aspek yang mempengaruhi tindakan kolektif pada konflik rumpon dikomunitas nelayan Puger. Aspek-aspek tersebut saling terkait satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu berikut akan diuraikan mengenai beberapa aspek tersebut :

### 5.2.1 Aspek kepemilikan sumber daya laut

Aspek kepemilikan sumber daya ini terkait dengan isu bahwa "ikan milik siapa". Hal ini mejadi hal yang wajar karena model paradigma kelautan Indonesia bersifat *open acces*. Maksudnya adalah bahwa laut tersebut merupakan sumber daya alam yang dimiliki bersama. Sehingga semua orang bisa mengakses sumber daya laut itu tanpa ada yang memonopoli. Rumpon yang dipasang diperairan pantai Puger itu dimiliki oleh beberapa kelompok nelayan, oleh karenanya akan dimanfaatkan oleh kelompok itu sendiri. Hal ini berarti rumpon sebagai alat bantu penangkapan yang gunanya untuk mengumpulkan ikan itu membuat suatu batasan bagi nelayan lain untuk menangkap ikan. Padahal tidak ada batasan yang formal sampai sejauh mana nelayan pemilik rumpon bisa mengakses sumber daya tersebut. Disisi lain nelayan perahu jukung—bermodal kecil, juga berhak atas akses sumber daya laut tersebut. Oleh karenanya nelayan kecil—perahu jukung cenderung mengalami kekalahan/keterbatasan dalam pengaksesan sumber daya ikan.

Hal ini sering dikeluhkan oleh nelayan Puger. Banyak nelayan jukung yang tidak bisa dengan leluasa menangkap ikan dilaut dikarenakan kekhawatiran mereka jika wilayah tangkapannya adalah wilayah nelayan yang menggunakan rumpon. Padahal mereka juga memiliki hak yang sama atas sumber daya laut. Nelayan jukung tidak bisa seenaknya menumpang di rumpon. Terkadang harus ada izin dari pemilik rumpon. Hal-hal yang seperti inilah yang memicu konflik ini terjadi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh nelayan jukung bapak Hartawan :

*"....Ya saya redam, bisa redam, kan bisa saja mbak, pamong kan harus bisa momong, jadi tujuan saya itu bukan ngesroh program pemerintah,, cuman mau meluruskan masalah rumpon. Memang menguntungkan mbak, bagi yang punya rumpon. Bagi yang tidak punya ya tidak menguntungkan. Jangankan orang lain, Masing-masing kelompok kadang-kadang mengadil-adili ditengah mbak. Misalnya kelompok saya ada ikannya,nggak boleh ngampung disekitarnya, lewat aja dicurigai.*

*Kadang-kadang saya komentar mbak, masing-masing kelompok, "ya betul sampean punya punya izin, rumponnya kan izinya, tapi lautnya kan nggak dikapling, yang di izinkan nggak ada, milik kita bersama, harus kompak". Saya beri masukan, Tanggapannya "ya gimana harga rumpon kan mahal bang", ya memang repot mbak yang memberi masukan kadang-kadang disalahkan".*

### **5.2.2 Aspek ekonomi**

Aspek ekonomi ini maksudnya adalah aspek pendapatan nelayan. Hal ini berhubungan dengan jumlah hasil tangkapan yang diperoleh nelayan jukung. Dengan adanya rumpon yang digunakan oleh nelayan secara langsung dapat menambah hasil tangkapan dan nantinya meningkatkan pendapatan nelayan. Pendapatan nelayan jukung dengan nelayan yang menggunakan rumpon semakin berbeda jauh. Perbedaan pendapatan inilah yang memicu terjadinya konflik ini. Apalagi jika ada sebuah kelompok nelayan atau salah seorang nelayan memiliki rumpon lebih dari satu. Hal ini yang nantinya menimbulkan kecemburuan sosial.

### **5.2.3 Aspek alat tangkap**

Aspek alat tangkap ini terkait dengan perbedaan alat tangkap diantara nelayan. Alat tangkap nelayan yang bisa merugikan pihak atau nelayan yang lain. Nelayan perahu jukung yang terutama menggunakan alat tangkap jaring dan nelayan payang disinyalir dapat mengurangi jumlah ikan lemuru atau ikan kecil. Hal ini karena jaring yang meraka

gunakan dapat menangkap jenis-jenis ikan kecil. Padahal ikan kecil-kecil atau ikan Lemuru merupakan makanan bagi ikan besar seperti Tuna dan Cakalang. Ikan pelegis besar tersebut merupakan tangkapan utama nelayan perahu skoci (rumpon). Meskipun nelayan jukung jaringan berasumsi bahwa ikan-ikan kecil atau ikan Lemuru tidak ketepi karena rumpon, akan tetapi tidak menutup kemungkinan sedikitnya atau tidak adanya ikan tersebut adalah karena alat tangkap yang mereka gunakan sendiri. Fenomena inilah yang terjadi pada komunitas nelayan Puger. Sampai akhirnya konflik pun terjadi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Agung:

*"...Mereka tidak menyadari, kenapa kok tidak ada makanan, ini salahnya nelayan jaring sendiri. Karen mereka menggunakan jaring setet yang kurang dari 1 inci. Ikan kecil-kecil akhirnya terjaring semua, disini bebas dipakai. Kedua, pemerintah kurang memperhatikan. Ikan "maos" saja kena, ini sudah tidak benar, ikan untuk ikan besar sudah tidak ada".*

#### 5.2.4 Aspek iklim/cuaca

Sebelum konflik rumpon di nelayan Puger berubah menjadi terbuka, nelayan pada saat itu, kira-kira dalam kurun waktu satu-dua tahun itu, nelayan mengalami kondisi yang sangat sulit. Hasil tangkapan terutama nelayan perahu kecil (jukung) mengalami penurunan pendapatan. Kondisi cuaca tidak menentu, musim hujan, musim kemarau tidak dapat diperkirakan. Meskipun belum ada bukti yang kuat terhadap faktor ini diperairan pantai Puger, namun peneliti melihat ada indikasi bahwa perubahan iklim dunia juga mempengaruhi kondisi lautan.

Paling tidak terdapat 4 hal yang bakal terjadi terkait dengan dampak perubahan iklim (Diposaptono, 2009) : *Pertama*, terjadi perubahan pola migrasi ikan akibat perubahan suhu permukaan air laut. Peningkatan suhu air laut akibat pemanasan global bisa mempengaruhi keanekaragaman hayati di wilayah pesisir dan laut. Secara umum, dengan meningkatnya suhu sebesar 1,5-2,5 derajat celcius, maka 20-30 persen spesies tumbuhan dan hewan terancam (Satria, 2009:77). Beberapa jenis ikan seperti ikan Lemuru sudah jarang sekali bisa ditangkap oleh nelayan. Pergerakan ikan cenderung mencari kondisi air yang suhunya lebih dingin dalam suatu perairan. Oleh karena itu jika dalam kondisi perairan tertentu suhunya naik maka bisa dipastikan ikan tidak banyak yang berada di wilayah laut tersebut.

*Kedua*, terjadi stratifikasi kolom air yang mempengaruhi proses *upwelling*. Seperti diketahui *upwelling* biasanya berkorelasi positif dengan gerombolan ikan (*fish schooling*). Perubahan stratifikasi dengan sendirinya mengakibatkan nelayan sulit menangkap ikan. *Ketiga*, terjadi perubahan kawasan penangkapan (*fishing ground*). Dan *keempat* nasib nelayan kian terpuruk, hal ini disebabkan oleh karena nelayan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk melaut karena migrasi maupun rusaknya habitat perikanan dan *fishing ground*. Kondisi yang seperti ini mungkin juga terjadi di perairan pesisir pantai Puger. Nelayan sudah semakin sulit bagaimana menentukan kapan waktu yang tepat untuk melaut, karena "musim ikan" semakin sulit untuk diprediksi.

Selain itu dampak perubahan iklim juga berpengaruh pada keberadaan terumbu karang. Perubahan iklim global mengakibatkan terumbu karang sulit beradaptasi. Menurut Westmascott (Diposaptono, 2009) menyatakan bahwa pengaruh perubahan iklim terhadap terumbu karang dibedakan atas perubahan fenomena fisik-kimia perairan seperti kenaikan permukaan laut, kenaikan temperatur laut, penurunan laju klasifikasi, perubahan pola sirkulasi samudera dan peningkatan frekuensi kejadian badai.

### 5.2.5 Aspek personal

Aspek ini dilihat dari segi manusianya (nelayan). Watak serta karakter seseorang juga berperan dalam konflik ini. Ada nelayan yang memberikan kesempatan kepada nelayan jukung untuk menumpang di rumpon miliknya. Akan tetapi ada juga nelayan yang keberatan dengan hal tersebut, melewati rumpon miliknya saja sudah dicurigai. Selain itu komunikasi yang digunakan juga bisa memberikan kontribusi terhadap berkembangnya konflik ini. Misalnya saja, ada salah seorang nelayan yang mendapatkan hasil tangkapan yang banyak, mereka kemudian berkomunikasi melalui HT. Dalam interaksi komunikasi tersebut tidak jarang menimbulkan rasa cemburu atau iri (mengejek) karena nelayan tersebut mendapatkan ikan sedangkan nelayan yang lain tidak atau sedikit mendapat ikan.

Selain sikap personal/komunikasi yang ada dilaut, sikap nelayan di darat juga harus diperhitungkan. Ketika seorang nelayan mendapat bagian pendapatan yang besar maka mereka akan membeli barang yang mungkin bisa dikatakan kurang efisien/pemborosan. Misalnya nelayan yang sudah memiliki sepeda motor, akan membeli

sepeda motor lagi. hal ini seperti yang di ungkapkan oleh salah seorang nelayan bapak Hambali:

*”Kawan-kawan nelayan tidak menghitug puluhan juta, tapi sekarang sudah ratusan juta. Jadi ini ada peningkatan ekonomi, cuma ada arogansi dari pihak yang berhasil ini yang menjadi masalah dan kecemburuan. Cara berpakaian, berbicara. Yang sukses kalung nya besar-besar, daftar haji sudah berapa? Ini adalah pembawaan, ini ibu-ibu nya....  
Bapak-bapak nya juga gitu, sepeda motor ada 3...  
Yang tidak punya kemampuan ini yg membuat cemburu, marah sensitive”.*

### 5.2.6 Aspek keluarga

Peranan keluarga seperti istri dan anak-anak, bisa menjadi pendorong suatu konflik, begitu juga dalam konflik rumpon ini. Sikap atau respon istri bisa memicu tindakan nelayan untuk berbuat diluar apa yang dipikirkannya. Ketika istrinya bertanya kepada suaminya, kenapa tidak membawa ikan, sedangkan nelayan yang lain mendapat ikan, suaminya akan menjawab dengan semaunya dia, misalnya dengan menjawab bahwa nelayan itu memakai jasa dukun. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menutupi kelemahannya. Mungkin tidak akan berakibat buruk jika hal ini terjadi hanya sekali, apabila terjadi berkali-kali maka hasilnya akan buruk. Hal ini wajar, karena istri juga berperan dalam kegiatan melaut suaminya. Istri nelayan biasanya mengurus perbekalan, biaya membeli solar, atau membeli umpan dan peralatan lainnya. Ia kan mengupayakan sedemikian rupa agar suaminya bisa melaut, meskipun biaya itu berasal dari pinjaman di toko/warung atau pengambek. Jika ia terus terusan meminjam dan tidak bisa melunasinya ini akan menimbulkan rasa malu dan tertekan.

### 5.2.7 Aspek kepentingan

Kepentingan dalam konflik ini adalah kepentingan dari beberapa orang yang memanfaatkan kesulitan nelayan. Peneliti melihat adanya unsur kepentingan dalam aksi yang dilakukan oleh nelayan non rumpon. Ada satu atau dua orang yang dengan sengaja memanfaatkan keterpurukan nelayan untuk kepentingannya sendiri. Misalnya kepentingan untuk mendapatkan materi, bantuan atau kepentingan untuk nama dan eksistensinya. Pihak-pihak ini yang kemudian memberikan motivasi dan kepercayaan pada nelayan atas apa yang akan dilakukannya. Setelah nelayan percaya dan yakin atas

tindakannya tersebut dan berhasil, pihak-pihak tersebut kemudian mencari peluang bagian mana yang harus ia ambil. Ironisnya setelah apa yang menjadi kepentingannya tercapai, pihak-pihak ini kemudian pergi begitu saja.

### 5.2.8 Aspek rumpon bantuan

Beradaan rumpon bantuan yang diberikan pemerintah secara langsung memicu terjadinya konflik yang terjadi diantara nelayan. Hal ini disebabkan oleh karena pendistribusian rumpon bantuan yang tidak tepat sasaran. Rumpon tersebut hanya diterima oleh beberapa golongan nelayan saja. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh bapak Yakup:

*”Skoci baru 6 tahun, lha pancingan dari dulu...dapet bantuan. Mesin juga tidak dapat, kok nggak ada koordinasi.. Rumpon bantuan terus. Katanya orang pancingan dapat bantuan rumpon, 100rb yang narik pak tawan... Saya nggak percaya sekarang. Ya tawan meskipun nggak ada kerjaan tetap dapet uang”.*

Bapak Yakup menyatakan dalam wawancaranya bahwa hanya nelayan skoci yang selalu mendapatkan bantuan terutama bantuan rumpon. Sedangkan nelayan jukung pancingan dan jaringan jarang sekali mendapatkan bantuan. Hal senada juga nyatakan oleh bapak Rifadi, ia menyatakan bahwa ketika sosialisasi mengenai bantuan rumpon tersebut hanya beberapa orang tertentu yang diundang. Berikut pernyataannya:

*”Tokoh-tokoh nelayan dari nelayan-nelayan itu harus diundang, pada saat itu hanya sosialisasi pada nelayan skoci, dan payang cuma 3 gelintir orang. Pada prinsipnya itu sebagai pengurus LKRN, hanya sekedar mengaspirasikan keinginan mereka dari beberapa nelayan yang saya sebut tersebut. Ternyata nyatanya program tersebut mandul, permasalahannya 80% hanya menguntungkan nelayan rumpon, dan 20 % menderita nelayan tadi itu. Tidak ada pemerataan rumpon”.*

Disalurkannya rumpon bantuan kepada masyarakat nelayan ternyata menimbulkan suatu kecemburuan jika tidak dilakukan secara benar dan pengsosialisasian yang tepat. Hal ini rentan sekali terhadap munculnya konflik antar nelayan yang memiliki armada dan alat tangkap yang berbeda.

### 5.2.9 Aspek ketidaktegasan Dinas Perikanan dan Peternakan Jember

Aspek ketidaktegasan dinas dalam menangani atau menanggapi keinginan/kesulitan nelayan membuat nelayan semakin marah dan kecewa. Dinas Perikanan dan Peternakan Jember terlihat kurang memahami seperti apa jarak sebenarnya rumpon yang semestinya harus dipasang oleh nelayan. Hal ini disebabkan karena Dinas Perikanan sendiri yang kurang mengetahui atau tidak tahu bagaimana aturan pemasangan itu dilaksanakan. Nelayan mengharapkan dinas perikanan dan peternakan dapat mengatasi permasalahan mengenai jarak rumpon yang terpasang. Namun seiring berjalannya waktu dinas tidak bisa memberikan alternatif solusi dari pertentangan ini sehingga sampai pada akhirnya nelayan menyalurkan aksi protesnya kepada Dinas Perikanan dan Peternakan. Selain itu masalah sosialisasi peraturan tentang pemasangan dan pemanfaatan rumpon juga belum optimal dilakukan. Dinas baru mengerti dan mensosialisasikannya ketika konflik ini mulai berkembang. Surat berita acara penurunan rumpon juga ikut andil dalam masalah ini. Karena hal itu digunakan nelayan sebagai surat izin pemasangan rumpon, padahal surat bukan merupakan surat izin pemasangan dan pemanfaatan rumpon.

### **5.3 Analisa Aksi Protes Kelompok Nelayan Non Rumpon**

#### **5.3.1. Isu atau interest : munculnya isu yang berkembang pada komunitas nelayan Puger**

Konflik rumpon di komunitas nelayan Puger kemudian menimbulkan suatu aksi kolektif yang berwujud dengan aksi protes yang dilakukan oleh nelayan non rumpon. Aksi kolektif menurut Tilly adalah aksi yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai kepentingan bersama. Aksi kolektif yang dilakukan bisa berbentuk suatu aksi yang terjadi jika dua kelompok atau lebih saling bersaing untuk memperebutkan sesuatu hal. Aksi kolektif yang dilakukan oleh nelayan dilatarbelakangi oleh perebutan sumber daya laut. Aksi kolektif yang dilakukan oleh nelayan Puger diwujudkan dengan aksi protes yang dilakukan secara bersama-sama atas keberadaan rumpon yang berada di perairan pesisir pantai Puger. Aksi dalam konflik ini terutama dilakukan oleh kelompok non rumpon<sup>32</sup>. Aksi protes yang dilakukan secara bersama-sama oleh kelompok ini kepada berbagai pihak, terutama pada Dinas Perikanan dan Peternakan Jember.

---

<sup>32</sup> Kelompok non rumpon ini terdiri dari nelayan-nelayan yang tidak menggunakan rumpon sebagai alat bantu penangkapan. Nelayan-nelayan tersebut antara lain nelayan perahu jukung (jaringan dan pancingan) serta sebagian nelayan perahu payang.

Tilly menyatakan bahwa dalam aksi kolektif yang dilakukan oleh suatu kelompok ini, diawali dengan isu atau interest. Menurut Tilly yang dimaksud *interest* disini adalah apa yang menjadi isu atau kepentingan dari suatu kelompok. *Interest* ini terkait dengan interaksi yang dijalin dalam komunitas itu atau antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. *Interest* atau isu yang ada dalam kelompok non rumpon ini adalah isu tentang berkurangnya ikan akibat pemasangan rumpon. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh salah seorang nelayan perahu payang bapak Ismail:

*"Sangat terasa, padahal sebelum orang puger punya rumpon, sebelum orang puger punya orang bugis udah punya duluan, dari sini kerumpon dilalui sekitar 2 hari tapi sekarang ½ hari kerumpon udah nyampe, kalo orang bugis nggak nyalahi, tapi orang-orang sini tidak mengikuti menteri kelautan batas-batas tertentu atau zona kelautan ZEE". "Sekarang ikannya sudah diborong 67-an rumpon, sehingga merugikan nelayan tradisonal".*

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa hasil tangkapan nelayan yang tidak menggunakan rumpon mengalami penurunan jumlahnya. Menurut mereka ini sangat berkaitan dengan jarak rumpon yang dipasang oleh nelayan yang menggunakan rumpon. Kepentingan kelompok non rumpon untuk mendapatkan hasil tangkapan yang maksimal ternyata tidak tercapai. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan jukung ini akan berimplikasi pada pendapatan yang mereka peroleh. Berkurangnya hasil tangkapan yang berdampak pada pendapatan ini merupakan isu yang sangat sensitif, karena ini menyangkut dengan keberlangsungan hidup keluarga mereka. Penjualan ikan merupakan sumber utama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga nelayan. Ini merupakan isu realistik karena menyangkut dengan masalah ekonomi keluarga. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi secara maksimal maka konflik akan muncul.

Isu mengenai berkurangnya ikan akibat rumpon<sup>33</sup> yang berimbas pendapatan atau penghasilan nelayan menjadi faktor yang sensitif karena ini menyangkut dengan keberlangsungan

---

<sup>33</sup> Hasil penelitian Arifin tahun 2008 (Besweni, 2009) menyarankan, bahwa perlu pengaturan kepadatan rumpon, yaitu dengan mempelajari jumlah hasil tangkap, sifat ekologi, wilayah, karakteristik lingkungan perairan dan kebutuhan ekonomis masyarakat sekitar teknologi rumpom dan alat tangkap yang digunakan. Dengan demikian kepadatan rumpon di suatu wilayah penting dipertimbangkan. Hasil penelitian Barus 1982 (Besweni, 2009) menunjukkan bahwa pada awalnya hasil tangkapan terus meningkat pada saat jumlah rumpon sedikit dan penambahan jumlah rumpon akan meningkatkan hasil tangkapan dan sampai suatu ketika akan mencapai suatu kondisi maksimum. Kondisi maksimum ditandai oleh penambahan rumpon tidak lagi diikuti dengan penambahan jumlah hasil tangkapan melainkan dengan penurunan yang cukup signifikan sehingga secara ekonomis akan tidak menguntungkan lagi.

hidup mereka. Masyarakat nelayan di Puger, sangat tergantung dari ketersediaan sumber daya laut, sedangkan alternatif pekerjaan sangat minim. Alternatif pekerjaan tidak bisa lepas dari seputar laut, seperti membuat trasi udang, kerupuk, pemindangan ikan. Semua pekerjaan itu biasanya dikerjakan oleh pihak perempuan, sedangkan untuk nelayannya sendiri tidak ada alternative pekerjaan yang cukup *compatible* untuk mereka lakukan. Sehingga jika mereka tidak melaut mereka hanya memperbaiki alat tangkap atau yang lainnya. Hal ini akan menjadi masalah jika musim paceklik terjadi berkepanjangan. Mereka akan berutang, menjual atau mengadaikan barang-barang yang ada. Isu yang berawal dari berkurangnya hasil tangkapan akhirnya menjadi isu ekonomi bagi nelayan non rumpon.

Masalah penangkapan ikan bisa memicu konflik, ketika nelayan merasakan berkurangnya hasil tangkapan. Apalagi didorong oleh adanya nelayan-nelayan kaya/bermodal besar untuk membuat rumpon. Ketika jumlah nelayan semakin banyak, alat tangkap semakin beragam, maka pengaksesan terhadap sumber daya laut semakin padat. Hal tersebut diatas tersebut yang kemudian bisa memicu konflik. Pihak nelayan non rumpon yang tidak memiliki modal yang besar merasa bahwa tidak ada rasa keadilan bagi mereka. Mereka juga berhak atas pendistribusian sumber daya laut yang pada suatu saat bisa habis jika tidak dikelola secara benar. Oleh karena itu mereka menuntut suatu keadilan kepada pemerintah. Hal ini seperti yang diungkapkan dalam proposisi penyebab konflik yang diungkapkan oleh Coser yang menyatakan bahwa anggota-anggota subordinat dalam sistem ketidaksetaraan lebih mungkin untuk memulai konflik karena mereka mempertanyakan legitimasi dari distribusi sumber daya yang semakin langka. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat mobilitas untuk posisi yang istimewa.

Dalam masalah rumpon ini nelayan non rumpon merupakan nelayan yang kurang memiliki modal sebagai cara untuk menaikkan posisinya ketingkat yang lebih tinggi yaitu sebagai nelayan yang bisa memiliki rumpon. Oleh karena itu kelompok ini akan memulai pertentangan terlebih dahulu. Selain itu juga faktor-faktor yang mendorong konflik semakin melebar. Baik itu yang menyangkut isu-isu yang realistik maupun yang non realistik. Dalam konflik rumpon yang terjadi ini kedua isu ini saling terkait satu dengan yang lain. Isu ini bisa dikatakan berjalan bersamaan, yaitu ketika nelayan mempermasalahkan tentang jarak rumpon yang berpengaruh pada pendapatan nelayan, mereka akan mencari kompromi atau sarana untuk mewujudkan kepentingan mereka dengan dialog dan lobi atau pertemuan-pertemuan diantara nelayan rumpon dan nelayan non rumpon. Disisi lain ketika proses ini sedang berjalan, isu non

realistik mulai muncul. Isu non realistik yang melibatkan unsur emosional ini seperti mengejek atau rasa sentimen antar nelayan membuat intensitas konflik semakin tinggi.

Konflik mejadi semakin meningkat ketika isu yang dilontarkan tidak hanya tentang berkurangnya hasil tangkapan, namun dengan adanya aspek personal. Aspek personal ini terkait dengan perilaku nelayan rumpon yang membuat nelayan non rumpon menjadi marah. Perilaku tersebut misalnya dengan mengolok-olok nelayan non rumpon karena tidak mendapat hasil tangkapan yang banyak, mengusir nelayan jukung yang menangkap ikan di sekitar wilayah rumpon atau hanya sekedar melewati rumpon. Menurut Coser isu-isu yang dilontarkan tersebut merupakan isu-isu yang bersifat non realistik. Artinya didalamnya terdapat suatu gairah emosional, yang menyangkut nilai-nilai inti dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga kecenderungan yang terjadi adalah konflik tersebut bertahan dari waktu ke waktu. Konflik yang terjadi tersebut bisa dikatakan terjadi secara bersamaan sehingga mendorong terjadinya ketegangan-ketegangan yang bertahan dari waktu ke waktu. Kepentingan yang sama antara kedua kelompok nelayan dengan latar belakang alat tangkap yang berbeda membuat perebutan dalam perolehan sumber daya yang maksimal semakin ketat. Kombinasi dari isu realistik dan non realistik ini yang kemudian mendorong intensitas konflik semakin tinggi.

Menurut Coser anggota-anggota subordinat dalam sistem ketidaksetaraan lebih mungkin untuk memulai konflik karena mereka mempertanyakan legitimasi dari distribusi sumber daya langka yang ada. Dalam konflik ini nelayan non rumpon mempertanyakan tentang legitimasi dari sumber daya yang ada tersebut. Mereka melihat bahwa laut merupakan milik umum yang dimanfaatkan untuk semua orang. Seorang orang dapat mengakses sumber daya laut tersebut. Namun ketika ada sebagian kelompok nelayan yang mengklaim bahwa laut yang berada disekitarnya merupakan hak wilayah tangkapnya ini menjadi hal yang kemudian dipertanyakan. Dalam hal ini nelayan non rumpon merasa adanya perampasan dan ketidakadilan dalam pengaksesan sumber daya laut yang seharusnya terbuka untuk semua nelayan.

Kesulitan dalam penangkapan ikan nelayan jukung ini awal mulanya hanya dialami oleh satu dua orang nelayan. Sering dengan berjalannya waktu, dan berkembangnya pemasangan rumpon yang ada di perairan pantai Puger, semakin banyak nelayan jukung yang mengalami kesulitan dalam penangkapan ikan. *Individual interest* yang hanya dialami oleh satu dua orang nelayan perlahan-lahan menjadi suatu *collective interest* ketika isu itu dirasakan oleh semakin banyak nelayan. Masing-masing nelayan ini (nelayan jukung dan payang yang tidak memiliki

rumpon) merasakan hal yang sama, yaitu berkurangnya pendapatan hasil dari kerja mereka di laut. Rasa senasib dan sepenanggungan ini yang kemudian mendorong nelayan untuk mengorganisir dirinya menjadi suatu kekuatan untuk melawan pihak yang menurut mereka bertanggung jawab atas masalah mereka. Dalam penelitian ini *collective interest* yang menjadi perhatian utama. Tilly menyatakan bahwa dalam aksi kolektif suatu kelompok *collective interest* merupakan hal yang penting untuk terwujudnya aksi kolektif. Individual interest *Collective interest* yang kuat merupakan modal untuk terjadinya suatu pengorganisasian diantara nelayan. Dengan ini berarti *collective interest* menjadi suatu kekuatan nelayan untuk mengorganisir dirinya untuk kemudian menjadi suatu aksi kolektif.

### 5.3.2. Formasi sosial/ pengorganisasian kelompok non rumpon

Setelah nelayan non rumpon merasakan adanya ketiakadilan dalam pemanfaatan sumber daya laut tersebut. Mereka kemudian mencoba untuk mengorganisir dirinya karena dengan cara ini mereka dapat melawan kelompok yang ordinat. Kelompok nelayan non rumpon yang terdiri dari nelayan jukung jaringan, pancingan dan beberapa nelayan perahu payang memulai untuk mengorganisir diri. Berawal dari keluhan atas kesulitan mendapat ikan dan jarak rumpon yang menurut mereka kurang jauh<sup>34</sup>, nelayan jukung jaringan ini saling mengeluh dan mengutarakan kesulitannya masing-masing. Mereka kemudian berunding dan berbicara bagaimana seharusnya tindakan yang harus mereka lakukan untuk menghadapi masalah ini. Sebelumnya mereka sudah pernah membicarakan masalah jarak rumpon dengan pemilik rumpon namun hal ini tidak membawa hasil. Akhirnya nelayan jukung, pancingan dan sebagian nelayan payang mengeluhkan kesulitan mereka kepada bapak Hartawan (bang Tawan). Bapak Hartawan dan bapak Rifadi<sup>35</sup> yang notabennya seorang nelayan jukung juga menanggapi hal tersebut dengan sangat antusias.

Dalam proses pengorganisasian nelayan-nelayan non rumpon ini berarti terdapat suatu dasar pembentukan identitas, yaitu nelayan yang tidak menggunakan alat bantu rumpon dan nelayan bermodal kecil. Besarnya identitas itu menjadi semakin meningkat ketika semua nelayan merasakan hal yang sama. Disini berarti ada suatu ikatan solidaritas yang terjadi antara mereka. Tilly menyatakan bahwa pengorganisasian suatu kelompok masyarakat didalamnya akan ada

<sup>34</sup> Jarak rumpon yang ada sekitar 30 mil dari bibir pantai, nelayan non rumpon meminta agar rumpon dipasang lebih jauh lagi sekitar 60-100 mil.

<sup>35</sup> Mereka juga pengurus LKRN.

proses identitas yang dibentuk, yaitu Identitas bahwa mereka merupakan kelompok nelayan yang dirugikan. Proses identitas sebagai nelayan yang terampas hak-hak ini terbentuk ketika mereka tidak menggunakan alat bantu rumpon dalam penangkapan ikan dan tidak memiliki modal yang cukup untuk membuat rumpon. Hal ini berarti dalam pembentukan organisasi ini selalu berhubungan dengan interest/isu yang sebelumnya terjadi.

Seperti yang diungkapkan oleh Tilly, dalam organisasi ini yang menjadi perhatian adalah berbagai aspek dalam struktur sebuah kelompok yang secara langsung berdampak pada kapasitas suatu tindakan dalam interesnya. Oleh karena itu dalam aspek pengorganisasian ini berbagai macam aspek seperti diadakannya pertemuan juga dibahas. Dalam proses pengorganisasiannya tersebut nelayan-nelayan non rumpon mulai mengadakan pertemuan-pertemuan yang dipimpin oleh bapak Rifadi dan bapak Hartawan<sup>36</sup>. Bapak Rifadi dikenal warga nelayan sebagai nelayan yang vokal dan berani. Ia dulunya seorang nelayan besar namun kemudian mengalami kebangkrutan dan beralih pada aramda perahu jukung. Hal ini seperti yang di ungkapkan oleh seorang nelayan bapak Hambali:

*”(tertawa)...itu pak hartawan..dulunya nelayan besar, bangkrut...sekarang punya jukung besar, dia nggak punya apa-apa, rumahnya di puger wetan. Ada lagi pak Rifadi, mantan pejabat koperasi nelayan. Trik-triknya dia tahu”.*

Mereka ini merupakan salah seorang dari pengurus LKRN yang tinggal di desa Puger Wetan, sedangkan pengurus yang lain bertempat tinggal di desa Puger Kulon. Nelayan non rumpon yang berada didesa Puger Kulon ini yang kemudian mengatur bagaimana aksi nelayan. Sampai akhirnya kedua nelayan di kedua desa ini bisa bersama-sama melakukan aksi protes. Dalam pengkoordiniran tersebut pertemuannya dilakukan di Desa Puger Wetan, tepatnya di rumah pengurus atau rumah nelayan non rumpon. Kedua orang ini kemudian secara kontinyu mengadakan pertemuan-pertemuan. Mereka memasukkannya kedalam suatu wadah LKRN itu yang merupakan lembaga kelompok nelayan yang berfungsi sebagai wadah tempat penyampaian aspirasi nelayan. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut nelayan meminta kepada perwakilannya yaitu bapak Rifadi dan Hartawan, untuk meyampaikan ini kepada instansi yang terkait. Salah satunya mereka menyampaikan kepada kantor kepala desa Puger Wetan. Dalam pertemuan itu mereka meminta kepada kepala desa agar menjauhkan jarak rumpon dari yang selama ini

<sup>36</sup> Menurut informasi yang diterima dari beberapa nelayan oleh peneliti kedua orang ini merupakan seorang yang vokal dan berani. Mereka tidak memiliki pekerjaan yang pasti. Mereka juga mengalami kesulitan dalam keuangan. Bapak hartawan dulunya pemilik perahu besar dan bapak Raifadi seorang mantan ketua pengawas TPI, dulu ia juga termasuk pengurus KUD mina (1982-1988).

dipasang. Oleh karena ini menyangkut dengan pemilik rumpon maka pemilik rumpon juga disertakan dalam pertemuan itu. Selain kedua nelayan tersebut desa juga meminta Dinas Perikanan dan Peternakan ikut serta dalam pertemuan itu. Berikut pernyataannya kepala desa Puger Wetan bapak Edy Haryoko:

*”Kalo desa pertemuan resmi pertemuan rumpon dan non rumpon 1 kali sebelum gejala. Perikanan minta ditempatkan di desa. Monggo kita ketemuan, tapi cuma sebagaian. Itu dah disepakati. Hasilnya yang non rumpon sepakat dengan jarak minimal kalo nggak salah minimal 40 mil. Sebelumnya permintaannya nggak masuk akal kalo nggak salah sampai 60 mil keatas. Akhirnya terjadi musyawarah-musyawarah akhirnya deal 40 mil. Sebenarnya saat itu sudah enak..sudah ada solusi tapi nggak tahu tiba-tiba kok rame lagi..ya mungkin setelah pertemuan itu dibahas oleh non rumpon. sekitar beberapa bulan kemudian terjadi aksi itu. Pemilik rumpon juga sepakat degan disaksikan kamla, pol airud. Kesepakatan itu dah disepakati, namun memang ada yang nggak sepakat tapi cuma 1 orang. Ya mungkin ini yang kemudian menularkan kepada semuanya., mungkin seperti itu”.*

Dalam pertemuan yang dihadiri oleh lebih kurang 50 orang tersebut sebenarnya sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai jarak rumpon. Kedua belah pihak sepakat bahwa rumpon dipasang minimal 40 mil dari bibir pantai meski ada satu orang yang tidak sepakat dengan jarak minimal tersebut.

Setelah pertemuan itu kondisi ternyata konflik tidak mereda, namun semakin meningkat. Hal ini diindikasikan karena jarak rumpon masih dalam jarak sekitar 30 dari bibir pantai. Sehingga kesulitan mendapatkan hasil tangkapan tetap terjadi dan peristiwa-peristiwa non realistik yang memicu emosi nelayan jukung tetap terjadi. Dari peristiwa itu nelayan-nelayan non rumpon kembali mengorganisir diri dengan dipimpin oleh kedua pengurus LKRN. Menurut informasi yang diterima peneliti, dalam salah satu suatu pertemuan tersebut ada salah seorang nelayan tidak sepakat tentang aksi yang kemukaan oleh bapak Hartawan, pada saat itu nelayan tersebut hampir terkena pukulan/tamparan dari bapak Hartawan. Sikap ini merupakan menurut peneliti sebagai salah satu sikap untuk mempertahankan argumen bapak Hartawan, yang bersifat memaksa. Selain itu untuk memperlancar aksi yang dilakukan pengurus LKRN (bapak Hartawan dan Rifadi) meminta sumbangan sebesar Rp 50.000 kepada setiap nelayan non rumpon.

Setelah pertemuan itu dilakukan, kelompok nelayan non rumpon melauai perwakilannya juga melakukan pertemuan dengan Dinas Perikanan dan Peternakan mengenai jarak rumpon ini. Pertemuan tersebut dilakukan dalam 3 kali peretemuan. Pertemuan pertama dan kedua dilakukan di Dinas Perikanan dan Peternakan sedangkan pertemuan ke tiga dilakukan di kantor kecamatan

Puger. Pada pertemuan pertama dan kedua tidak ada kesepakatan yang diperoleh sedangkan pada pertemuan ke tiga yang dilakukan di kantor kecamatan Puger tidak berjalan secara lancar. Hal ini dikarenakan nelayan secara bersama-sama datang sehingga seperti aksi demonstrasi yang mengerahkan banyak massa.

Dalam aksi tersebut pihak nelayan rumpon yang diwakili oleh bapak Hartawan, dan dari kelompok rumpon serta difasilitasi oleh kecamatan belum mencapai kesepakatan tentang jarak pemasangan rumpon. Apalagi dipicu oleh ketidakhadiran dinas perikanan dan peternakan Jember sebagai pihak yang berwenang. Hal ini memicu kekecewaan dan kemarahan nelayan sehingga massa mulai mengamuk. Pada saat kejadian tersebut, bapak Hartawan dimintai keterangan sehubungan dengan aksi yang dilakukan nelayan. Namun beliau menjawab bahwa ia tidak menggerakkan massa. Ia hanya menghadiri rapat di kecamatan. Berikut pernyataan dari bapak Hartawan :

*Sekitar 2 bulan mbak baru mengadakan demo. Waktu itu yang rame demo ke kecamatan waktunya sekitar 15 hari. Waktu itu mau dipertemukan nelayan rumpon dan pro rumpon. Dimambil kesepakatan, persetujuan lah tetang program rumpon,, saya ambil orang-orangnya 6 orang plus pengurusnya waktu itu. Saya menghadiri rapat dikecamatan, tahu-tahu Dinas perikanan nggak datang, tiba-tiba massa datang. Massa dari non rumpon, termsuk anggota saya, banyak mbak waktu itu sekitar 10.000 orang. Penuh lapangan..*

*Saya ditanya langsung polres, “kalo mengadakan demo sampean itu mengajukan ijin”  
“lho pak saya nggak mengadakan izin, tapi menghadiri rapat”*

*“lha kok tau-tau datang semua, ?”*

*“lho saya ndak tau, mereka datang sendirinya”*

*Rapat itu intinya mau ditemukan pro rumpon, mau ditemukan secara kekeluargaan. Nyatanya Dinas perikanan nggak datang, justru yang dapat undangan yang datang. Ditempatkan di kecamatan Puger, tanggal 26, hari kamis, bulannya lupa, dapet satu tahun..*

*Akhirnya rapat gagal, polres turun, banyak orang mbak..*

Pertemuan tersebut tetap tidak menghasilkan kesepakatan. Sampai akhirnya nelayan non rumpon menginginkan agar rumpon diputus. Akan tetapi pihak nelayan rumpon tidak mengizinkannya karena rumpon miliknya memiliki izin. Akhirnya masalah rumpon mengalir pada proses perizinan rumpon. Dari pernyataan nelayan yang memiliki rumpon, rumpon miliknya sudah mengantongi izin. Izin itu berdasar dari surat tentang berita acara penurunan rumpon yang dibuat oleh kelompok nelayan Puger yang ditanda tangani oleh UPTD Perikanan dan Perikanan Puger,

camat Puger, Kepala Desa Puger Wetan, kepala satpolair Jember, dan komandan pol TNI AL kabupaten Jember. Nelayan rumpon menyatakan bahwa surat itu merupakan surat izin.

Massa yang semula berada di kantor Kecamatan, kemudian mengarah kepada desa sebagai pihak yang ikut dalam menandatangani dipasangnya rumpon. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh bapak Hartawan:

*“Sebelum pertemuan, ramai kan, padahal itu bukan demo tujuannya. Menghadiri rapat. Dikecamatan dulu, baru ke desa. Karena masalah dari kecamatan ke desa, disurat peberitahuan itu, desanya yang memberi izin. Minta harus tanda tangan, harus diputus rumpon. Maksudnya masyarakat non rumpon itu... Akhirnya ditanda tangani itu, tapi degan buku kosong. Saya sendiri tidak menyuruh waktu itu. Saya dari kecamatan, Karena tenaga lemah saya tidur waktu itu, saya tidak tahu, termasuk di desa, pokoknya keliling orang-orang waktu itu. Saya yang membubarkan waktu itu mbak, saya dibangunkan anak saya”.*

Dari pertanyaan yang dikemukakan oleh bapak Hartawan terlihat bahwa apa setelah ia mengadakan pertemuan di kecamatan beliau langsung pulang ke rumahnya. Sedangkan massa dibiarkan berdemonstrasi dari kantor kecamatan ke kantor desa Puger Wetan dan Puger Kulon. Menurut informasi yang peneliti dapatkan, pada saat kejadian itu berlangsung bapak Hartawan berada disekitar lokasi kejadian. Pernyataan beliau juga diragukan karena dalam proses datangnya massa tidak serta merta karena inisiatif dari nelayan itu sendiri. Hal ini dilihat dari bagaimana massa bisa berkumpul di kantor kecamatan yang kemudian melanjutkan aksinya di kantor desa Puger wetan dan Puegr Kulon. Hal ini seperti yang nyatakan oleh bapak Moh. Yakup:

*” Saya itu sebenarnya tidak mau, tapi di ajak-ajak gimana.. ”sulit nanti anak putumu”. Saya itu lagi ngarit, semua orang payagan yang ikut, saya liat dibalai desa, lah pas pulang saya di catetin.. Untuk ikut demo. Terserah yang disana, saya di ajak demo ke dinas, cuma demo, cuma ikut saja..setelah itu ya pulang”.*

Dari pernyataan itu bapak yakup diajak oleh nelayan non rumpon yang lain untuk ikut berdemonstrasi di kecamatan, dan di kantor desa. Mereka mengajak dengan mengatakan bahwa jika hal ini tidak dilakukan maka anak cucu kita akan mengalami kesulitan dikemudian hari jika rumpon tetap terpasang di perairan pantai Puger. oleh karena itu ia ikut dalam demonstrasi tersebut karena memang sekarang kondisi yang dialami juga sulit. Dalam aksi tersebut nelayan juga mendatangi rumah salah seorang pemilik rumpon. Massa disana merusak pagar dan rumpon milik nelayan. Selain itu nelayan juga melakukan pengerusakan berbagai perlengkapan seperti

meja di kantor desa Puger Wetan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh bapak kepala desa Puger Wetan bapak Edy Haryoko:

*Jadi mereka marah karena saya lama gak tanda tangan. Kan saya timbang-timbang dulu..*

*Saya duduk...dikerubuti ratusan orang...diancam-ancam juga mbak..*

*Begitu selesai...”lha polisi kok banyak...kenapa nggak mengamankan saya..”*

*Polisi: ‘gimana pak kades apa perlu saya pegang kan sudah ada yg dirusak..”*

*Kades :”udah pak nggak usah itu juga warga saya smua yang pro dan kontra..alamnya juga demokrasi”.*

Dari adanya pertemuan-pertemuan antara kelompok nelayan, ada rasa saling mengingatkan, menguatkan serta ditariknya iuran untuk masing-masing nelayan, maka hal ini berarti ada suatu pengorganisasian diantara nelayan non rumpon untuk menentang keberadaan rumpon. Dan dalam pengorganisasiannya itu ada beberapa tokoh atau orang bertindak sebagai pemimpin atau pelopor. Isu mengenai keputusan rumpon mulai dicetuskan dalam pertemuan di kecamatan Puger tersebut. Dari proses pengorganisasian massa ini terlihat bahwa ada suatu proses pembentukan identitas dan bagaimana besarnya identitas yang terbentuk pada kelompok nelayan non rumpon. Yaitu identitas sebagai nelayan yang tidak bermodal besar serta tidak memperoleh keadilan dan terpinggirkan. Identitas itu kemudian tumbuh dan berkembang seiring dengan proses interaksi dalam pertemuan-pertemuan internal yang dilalukan serta interaksi dengan nelayan non rumpon. Selain aspek komunikasi, interaksi, pembentukan identitas, dan dikuatkan dengan berbeberapa pertemuan yang mereka lakukan, aspek kepemimpinan merupakan hal yang penting dalam pengorganisasian ini.

Dalam konflik rumpon pada nelayan Puger ini terlihat adanya unsur kepemimpinan dalam aksi kolektifnya. Adanya tokoh seperti bapak Hartawan dan bapak Rifadi menambah terorganisi aksi ini. Tokoh ini merupakan salah seorang dari sekian banyak nelayan yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan mengerakkan orang lain. Mereka ini merupakan orang-orang yang menurut nelayan jukung merupakan masyarakat yang berani dan mau berjuang untuk nelayan<sup>37</sup>.

Dari uraian diatas terlihat bahwa konflik terjadi ini bisa dikatakan berkepanjangan. Coser menyatakan bahwa hal ini disebabkan pertama, derajat kesepakatan yang rendah antara pihak

<sup>37</sup> Setelah apa yang diperjuangkan dirasa cukup berhasil, yaitu dengan dikeluarkannya surat perintah keputusan rumpon, nelayan-nelayan non rumpon mulai mengalami ketidakpercayaan kepada kedua tokoh tersebut. Hal ini sebabkan kedua tokoh tersebut menerima bantuan rumpon dari pemerintah, sedangkan nelayan yang lainnya tidak mendapatkan bantuan.

yang berkonflik dan kedua tujuan kelompok yang bertikai sangat luas. Kesepakatan antara kelompok non rumpon dan pemilik rumpon sangat rendah. Masing-masing kedua belah pihak saling mempertahankan argumennya yang mereka anggap benar. Pihak non rumpon menganggap bahwa rumpon tersebut harus diputus karena mempengaruhi hasil tangkapan dan tidak memiliki ijin. Sedangkan pihak nelayan rumpon menganggap bahwa rumpon miliknya ini dipasang sesuai dengan rekomendasi Dinas Perikanan dan Peternakan dan jika ini di putus atau dibongkar berarti membuang modal yang telah mereka keluarkan yang jumlahnya tidak sedikit. Selain itu faktor pemimpin dalam aksi ini juga menentukan panjang atau pendeknya durasi konflik yang terjadi. Ketika pemimpin dalam aksi tersebut tetap meyakinkan atau mengajak pengikutnya meneruskan konflik maka konflik akan tetap berjalan, dan begitu juga sebaliknya. Faktor integrasi dengan kelompok yang berkelompok juga menentukan bagaimana durasi konflik yang terjadi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Coser tentang proposisi durasi konflik bahwa konflik bisa terjadi berkepanjangan dan terjadi tidak berkepanjangan tergantung dari elemen-elemen yang mendukungnya.

### **5.3.3. Mobilisasi sosial kelompok non rumpon**

Pergerakan nelayan non rumpon yang awal mulanya bersifat pasif, kemudian mengarah pada pergerakan yang bersifat aktif. Maksudnya bahwa selama itu nelayan sudah melakukan peretemuan-pertemuan dengan berbagai pihak di lingkup desa dan kecamatan, namun selanjutnya mengarah pada Dinas Perikanan dan Peternakan yang berada di Jember. Hal ini berarti ada suatu mobilisasi yang dilakukan kelompok nelayan non rumpon. Dalam mobilisasi ini berbagai macam sumber daya nelayan di akumulasi serta di klaim. Sumber daya itu antara lain bagaimana nelayan-nelayan non rumpon itu dikumpulkan, bagaimana modal dikumpulkan, jaringan kerjasama yang dibentuk serta berbagai klaim-klaim seperti rumpon yang dipasang tidak berizin, laut adalah milik umum sehingga siapa saja bisa memanfaatkannya. Selain itu juga dalam mobilisasi ini terjadi perubahan kepuasan partisipan dalam kelompok. Nelayan-nelayan non rumpon dibuat menjadi kelompok yang tidak puas hanya dengan menjauhkan jarak rumpon yang dipasang, yang ternyata dalam dialognya tidak membuahkan hasil. Nelayan non rumpon akhirnya meminta agar rumpon tersebut dibongkar. Dalam proses ini kelompok nelayan non rumpon melihat adanya respon atau kemungkinan untuk merealisasikan kepentingan atau tujuannya. Semua sumber daya itu dikumpulkan dan dikuatkan dalam mobilisasi ini yang untuk

selanjutnya bergerak pada aksi kolektif yang berupa protes yang dilakukan di Dinas Perikanan dan peternakan Jember.

Dalam pemobilisasian aksi ini nelayan non rumpon juga bekerjasama dengan sebuah LSM yang ada di Jember. LSM ini diketuai oleh Kustiono, yang menurut pengakuannya ia juga warga Puger dan memiliki keluarga yang berdomosili di Puger<sup>38</sup>. Nelayan non rumpon yang dalam hal ini diwaliki oleh bapak Hartawan dan Rifadi meminta bantuan kepada bapak Kustiono dalam rangka aksi protes yang akan dilakukan di kantor Dinas Perikanan dan Peternakan Jember. Pemilihan Kustiono dari sebuah LSM ini karena ia dianggap mampu dan menguasai arena yang berhubungan dengan pemerintahan. Kustiono dianggap mampu mengkomunikasikan dan mengerti tentang seluk-beluk hukum yang berhubungan dengan pemerintahan. Dengan bergabungnya Kustiono dalam aksi protes yang dilakukan nelayan non rumpon diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari aksi ini.

Dalam aksi ini Kustiono melakukan koordinasi dengan nelayan dan pengurus LKRN. Bapak Hartawan dan bapak Rifadi menunjuk Kustiono sebagai koordinator aksi ini karena mereka merasa Kustiono mampu memperjuangkan aspirasi nelayan. Sedangkan Kustiono sendiri melihat bahwa pergerakan nelayan tidak sesuai dengan sasaran oleh karena itu ia membantu menyampaikan aspirasi nelayan ini. Berikut pertanyaan Kustiono mengenai hal tersebut diatas:

*"Jadi awalnya memang konflik sudah sangat tinggi, sampe terjadi karena ketidak tauhan penyaluran aspirasi, waktu itu sebelum saya dampingi, mereka itu 'ngeluruk' kantor desa, karena dianggapnya desa adalah simbol pemerintahan, mereka kenalnya desa akhirnya datang ke desa, kecamatan.*

*Ya nggak menyelesaikan masalah, justru, karena dilapangan nelayan kan family semua. Ya antar keluarga akhirnya.. baik yang pro maupun yang kontra ada hubungan family.*

*Kebetulan saya memang dari keluarga sana terus tokoh-tokoh konsultasi kesini, terkait persoalan mereka, akhirnya saya datang untuk investigasi. Dari situ saya mencoba mendalami, Apa sih persoalannya, mereka minta bantuan ke saya. Dan kebetulan karena baik yg pro maupun kontra satu saudara. Sempat rebutan lah...*

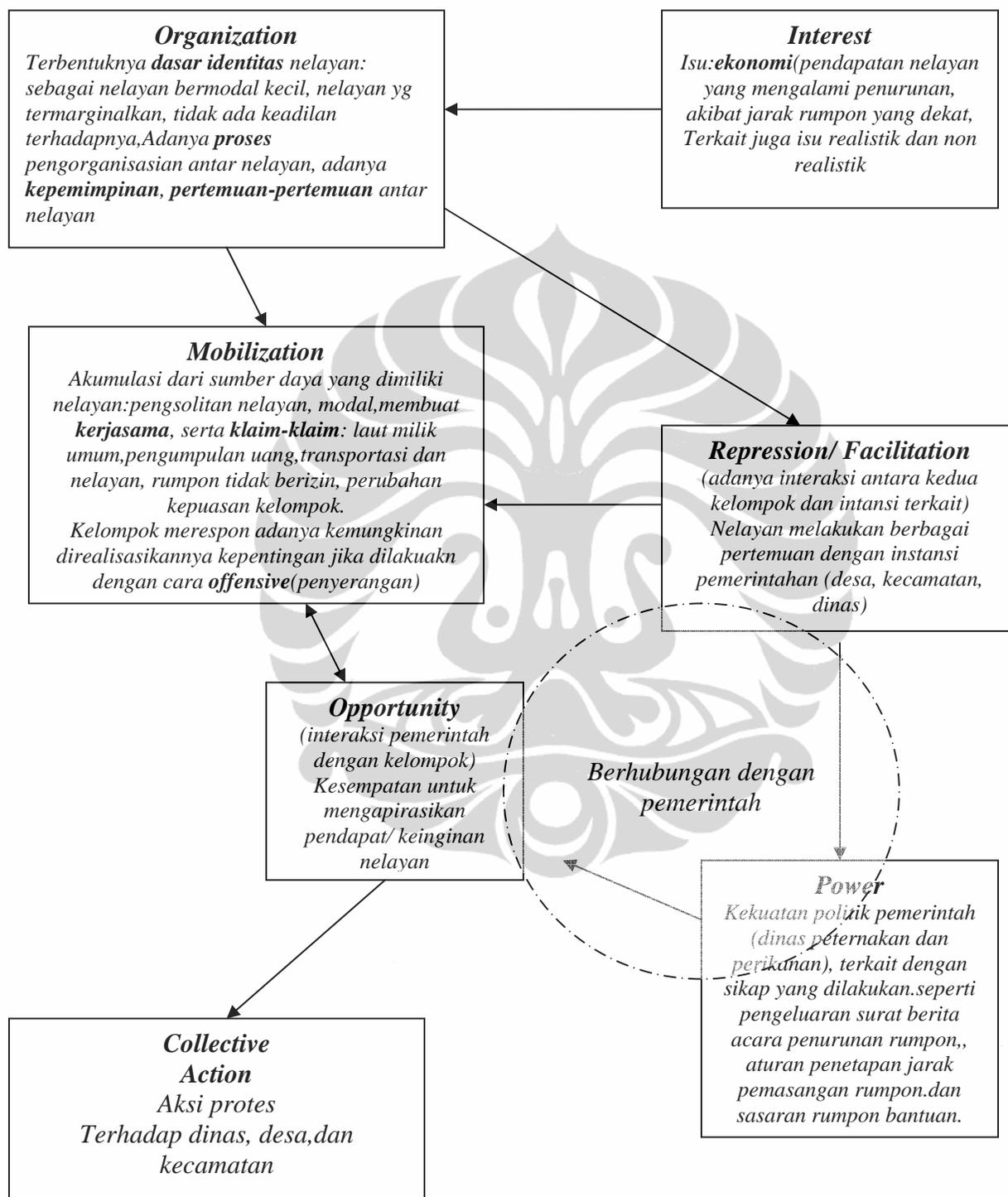
*Begitu saya masuk ke yang kontra, kelurga yang pro menghubungi saya juga supaya....jadi ada tarik ulur begitu, tapi karena pertimbangan saya yang kontra kaum marginal, Pikir saya lebih cocok ke sana, jadi saya putuskan mendampingi masyarakat yang lebih luas. Itu awal saya masuk,nah ternyata setelah saya masuk kesana kesimpulan awal saya, ini memang ada peran pemerintah yang tidak tanggap terhadap potensi konflik, rumpon itu sendiri dengan peraturan menteri yang ada, ada warning akan ada potensi konflik".*

<sup>38</sup> Saat ini Kustiono bertempat tinggal di Jember.

Dengan adanya kerjasama tersebut usaha nelayan untuk memutuskan rumpon yang ada di perairan Puger bisa tercapai. Hal itu dilakukan dengan 3 kali proses dialog antara dinas perikanan dan peternakan serta perwakilan nelayan non rumpon. Aksi protes yang dilakukan di dinas diwarnai juga dengan aksi pengerusakan replika rumpon serta aksi pelemparan ikan lemuru di depan gerbang pintu masuk dinas perikanan dan peternakan. Nelayan juga membawa poster-poster yang berisikan pemutusan rumpon Puger. Tercapainya kesepakatan itu direalisasikan dengan dikeluarkannya surat perintah Dinas Peternakan dan Perikanan nomor 523.11//637/419/2009 yang memerintahkan kepada pemilik rumpon yang tidak mengantongi ijin untuk membongkar/ memutuskan rumponnya sendiri-sendiri. Usaha yang dilakukan nelayan untuk memutuskan rumpon ini ternyata berhasil. Nelayan akhirnya dapat menekan pemerintahan lokal (Dinas perikanan dan peternakan Jember) untuk mengeluarkan surat pemutusan rumpon. Nelayan non rumpon merasa bahwa ini merupakan kemenangan mereka. Dalam semua rangkaian aksi ini terdapat beberapa hal yang perlu diuraikan yaitu bahwa dalam aksi ini ada ada satu kesempatan yang dijalin antara nelayan dan kelompok nelayan. Tilly menyebutkan hal ini dengan adanya *opportunity* dimana didalamnya ada satu proses relasi, koalisi, kekuatan serta *political opportunity* yang saling terkait yang akhirnya mengerakkan aksi kolektif. Kekuatan politik juga bermain dalam konflik ini. Kekuatan pemerintah untuk memberikan kesempatan nelayan untuk bermediasi, berkoalisi atau berkonfrontasi dengan nelayan non rumpon.

Jika dilihat dari bentuk hubungan antara kelompok nelayan non rumpon dengan pemerintahan, bahwa terdapat beberapa anggota dari kelompok non rumpon (*challenger*) kemudian beralih menjadi nelayan rumpon (*member*) dari pemerintahan. Hal ini disebabkan karena anggota-anggota kelompok non rumpon (dalam hal ini pemimpin aksi) diberikan bantuan berupa rumpon oleh pemerintah. Sehingga konflik yang muncul menjadi tidak berkepanjangan. Ini merupakan salah satu strategi dari pemerintah untuk meredam bagaimana suatu aksi kolektif dilakukan oleh *challenger*. Meskipun ada beberapa anggota kelompok non rumpon menjadi *member* pemerintah, dan terkesan konflik tidak ada. Namun hal ini berbeda jika melihat anggota kelompok non rumpon lain yang tetap ada konflik dengan nelayan rumpon. Oleh karena itu konflik yang bersifat laten ini bukan tidak mungkin akan menjadi konflik yang terbuka jika adanya pemimpin yang mengorganisir, memobilisasi untuk melakukan suatu aksi kolektif secara bersama-sama.

Secara singkat proses bagaimana aksi kolektif nelayan non rumpon terhadap pemerintah dapat dilihat dalam bagan berikut :



Gambar 5.3 Alur bagan aksi kolektif konflik rumpon nelayan Puger

Dari alur proses bagaimana aksi kolektif yang dilakukan nelayan non rumpon ini terlihat bahwa pergerakan dimulai ketika interest atau isu mengenai berkurangnya hasil tangkapan mulai mencuat dipermukaan. Isu ini merupakan isu yang sangat sensitif karena ini berhubungan dengan keberlangsungan masing-masing keluarga nelayan. Laut merupakan satu-satunya sumber penghidupan bagi mereka. Isu realistik ini dalam perjalanan komprominya ternyata tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Masing-masing kelompok tetap berada dalam pendirannya masing-masing. Seiring dengan berjalannya waktu, isu non realistik juga mulai berkembang dalam komunitas ini. Isu non realistik berupa luapan emosional banyak muncul dipermukaan terutama ketika para nelayan berada di laut untuk melakukan operasi penangkapan ikan.

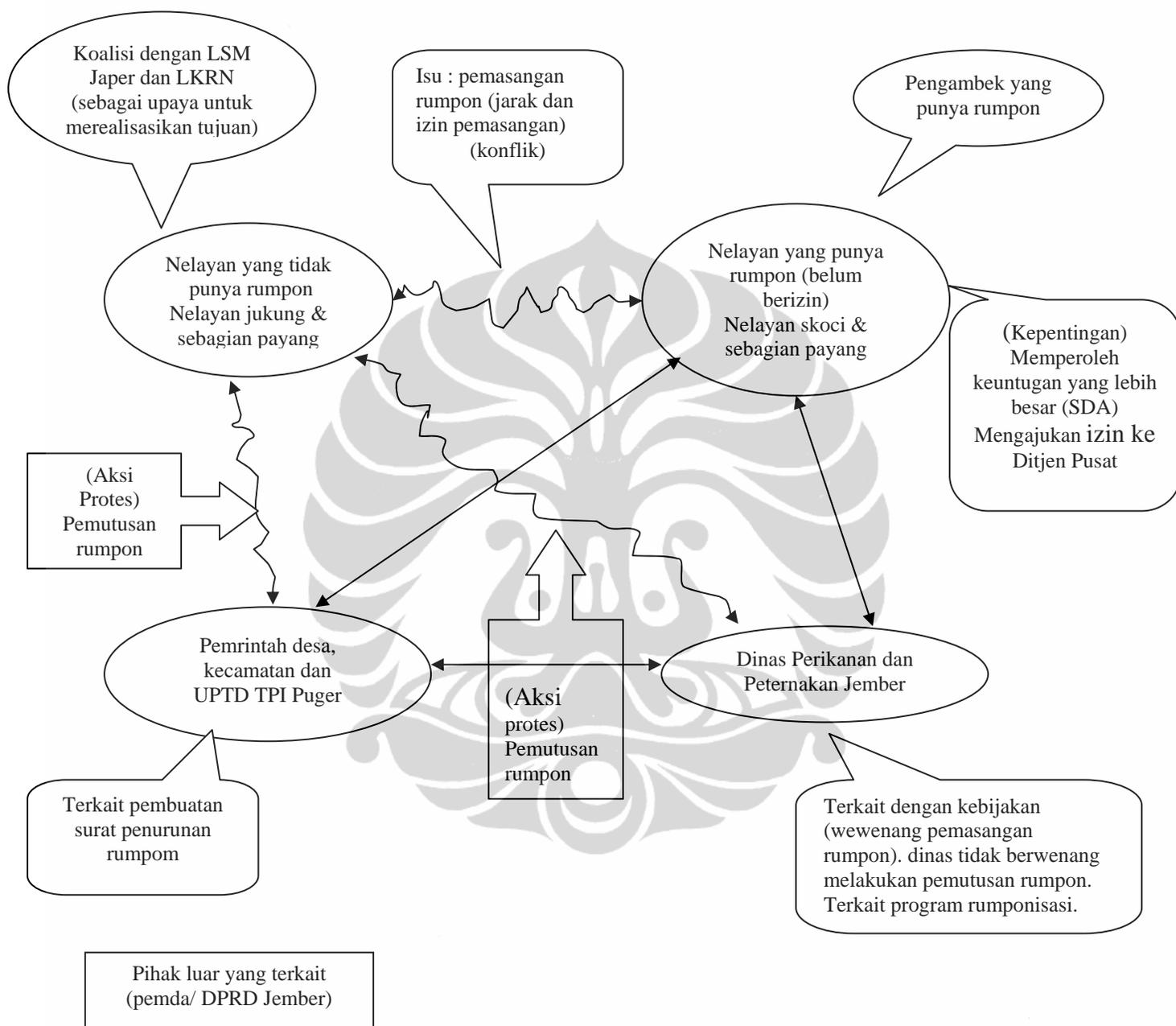
Seiring dengan berjalannya waktu, banyak nelayan yang tidak menggunakan rumpon yang merasakan kesulitan ini. Untuk mengatasi kesulitan ini mereka menyampaikan keluhannya kepada nelayan yang lain. Dari interaksi ini yang berjalan dalam sekian waktu itu, proses pembentukan identitas dalam diri nelayan mulai terbentuk secara perlahan-lahan. Identitas ini diperlukan untuk menguatkan mobilisasi yang nantinya akan dilakukan. Selain pembentukan dasar identitas nelayan, interaksi yang intens dalam bentuk pertemuan-pertemuan juga dilakukan. Peneliti melihat dalam kegiatan pertemuan tersebut ada pihak-pihak yang terlihat menonjol. Pihak-pihak ini kemudian dipercaya sebagai pemimpin dalam interaksi tersebut. Adanya kepemimpinan ini dirasanya sangat membantu nelayan non rumpon lainnya untuk mengatasi kesulitannya. Hal ini mengingatkan potensi sumber daya manusianya yang masih rendah, sehingga aspek pemimpin diperlukan dalam aksi ini. Nelayan yang dijadikan pemimpin dalam aksi ini adalah bapak Hartawan dan bapak Rifadi, yang merupakan pengurus sebuah lembaga kelompok rukun nelayan. Pertemuan-pertemuan dengan nelayan-nelayan yang mengalami nasib yang sama itu dilakukan secara intens. Hal ini berarti terjadi suatu proses penguatan solidaritas, dan identitas. Pertemuan-pertemuan secara informal juga dilakukan kepada pemerintah desa dan dinas perikanan dan peternakan Jember. Namun pertemuan-pertemuan tersebut tidak membuahkan hasil. Akhirnya nelayan kemudian melakukan pemobilisasiaan berbagai sumber daya dalam rangka melakukan aksi kolektif.

Mobilisasi ini merupakan proses dimana semua sumber daya yang ada diakumulasi, dan ini merupakan modal utama untuk pergerakan yang aktif. Akumulasi sumber daya dalam kelompok nelayan non rumpon ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan modal—uang, nelayan, tingkat kepuasan nelayan, namun yang lebih penting adalah munculnya bentuk koalisi

dengan pihak lain. Koalisi tidak hanya dilakukan pemerintahan lokal saja namun *chalangger* – nelayan non rumpon, juga bisa melakukan hal yang serupa. Upaya ini dianggap perlu oleh kelompok nelayan rumpon, karena mereka sadar akan kualitas kemampuan sumber daya yang mereka miliki. Dalam tindakan ini terlihat bahwa nelayan bukanlah golongan masyarakat yang tidak memiliki potensi. Mereka merupakan kelompok masyarakat yang bekerja keras, dan tekun. Sehingga ketika sumber pengasilan utama mereka mengalami permasalahan, maka tindakan yang brutal rentan untuk dilakukan. Setelah akumulasi berbagai sumber daya yang dimiliki dirasa cukup maksimal, maka langkah selanjutnya adalah dilakukan aksi protes kepada pemerintah lokal. Terwujudnya aksi ini juga didukung oleh adanya iklim demokrasi yang lebih terbuka antara pemerintah lokal dengan nelayan. Terbukanya kesempatan untuk berkomunikasi dengan pemerintah lokal sangat mendukung aksi kolektif yang nantinya akan dilakukan. Pemerintah lokal dalam masalah ini berusaha dengan semaksimal mungkin mengakomodir aspirasi nelayan. Karena ketidakjelasan siapa yang bertanggung jawab dalam keputusan rumpon ini yang kemudian membuat nelayan non rumpon menjadi lebih agresif dalam menyalurkan aspirasinya. Sehingga hal ini melibatkan pihak kepolisian sebagai aparat keamanan untuk menjaga kondisi ini.

Penekanan-penekanan yang dilakukan nelayan ini kemudian mendorong pemerintah lokal memberikan tindakan/sikap untuk meredam aksi protes nelayan. Tindakan tersebut adalah dengan dikeluarkannya surat perintah pemutusan rumpon. Tindakan tersebut cukup efektif untuk meredam aksi massa pada waktu itu. Namun jika dilihat lebih dalam, peneliti melihat bahwa tindakan dikeluarkannya surat perintah tersebut belum menyelesaikan masalah utama yang dihadapi nelayan, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara maksimal. Oleh karena itu peneliti melihat bahwa konflik rumpon pada komunitas nelayan Puger ini masih ada secara laten, karena dalam kenyataannya pihak pemilik rumpon tidak memutuskan rumponnya. Mereka kemudian mengajukan izin pemasangan rumpon pada pemerintah Pusat. Sedangkan disisi lain isu-isu realistik dan non realistik masih ada di komunitas nelayan Puger. Konflik yang lebih terbuka dapat dimungkinkan dalam kondisi yang demikian, jika isu mengenai berkurangnya pendapatan semakin tinggi dan beberapa aspek pendukung seperti adanya kepemimpinan dan akumulasi sumber daya dilakukan secara maksimal tersebut tersedia dan berjalan sempurna maka aksi kolektif ini akan terus berlangsung dikemudian hari. Atau jika tidak maka nelayan non rumpon (nelayan yang bermodal kecil) akan semakin terpuruk dengan kondisi yang seperti ini.

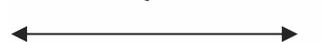
Sedangkan secara keseluruhan gambaran bagaimana konflik rumpon ini terjadi, isu/kepentingan dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya dapat dilihat dalam gambar berikut :



Gambar 5.4 Gambaran keseluruhan konflik rumpon nelayan Puger

Sumber: diolah peneliti

Keterangan :

-  : konflik dan aksi protes
-  : pihak yang juga terlibat
-  : hubungan
-  : isu dan kepentingan